



LAPORAN SDGS NTB TAHUN 2023

Disusun Oleh
Sekretariat SDGs NTB



ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi NTB, berdasarkan data capaian tahun 2023 adalah jumlah indikator yang tercapai 155 indikator, yang akan tercapai sebanyak 6 indikator dan sisanya adalah indikator tidak tercapai yang perlu perhatian khusus terutama intervensi program/kegiatan untuk mendukung pencapaian target pada masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan 62 indikator dan indikator yang tidak ada data karena indikator yang bukan kewenangan provinsi atau indikator yang sudah tidak ada lagi pada Perangkat Daerah sebanyak 52 indikator. Untuk capaian pada Empat Pilar; Pilar Sosial tercapai 65 indikator, akan tercapai 5 indikator, tidak tercapai 32 indikator dan tidak ada data 11 indikator. Pilar Ekonomi, Tercapai 40 indikator, akan tercapai 1 indikator, Tidak tercapai 12 indikator dan Tidak ada data 11 indikator, Pilar Lingkungan Tercapai 33 indikator, tidak tercapai 15 indikator, tidak ada data 20 indikator. Pilar Hukum dan Tata Kelola, Tercapai 17 indikator, tidak tercapai 6 indikator dan tidak ada data sebanyak 7 indikator. Secara umum capaian indikator SDGs pada tahun 2023 adalah 56 persen, sama dengan capaian tahun 2022.

Tantangan yang cukup dinamis yang sedang dihadapi pemerintah provinsi NTB pada tahun 2023 yang masih sangat dirasakan dampaknya diberbagai sektor pembangunan, untuk itu Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan pemulihan sektor-sektor pembanguan yang terpuruk. Disamping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan strategi dan arah kebijakan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2023 yang merupakan bagian internalisasi dan harmonisasi RAD tentang percepatan dan pencapaian TPB/SDGs Provinsi NTB tahun 2019-2023. Upaya percepatan dan pencapaian target indikator melalui intervensi program/kegiatan yang di fokuskan untuk mendukung program prioritas dan program unggulan. Keberhasilan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan komitmen bersama dengan memastikan sinergitas program/kegiatan dapat berjalan secara optimal.



KATA PENGANTAR

Pada tanggal 25 September 2015, Negara-negara anggota PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium, atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berlangsung dari tahun 2000 sampai 2015. TPB sendiri menyertakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tanggal waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet.

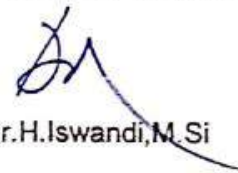
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016 - 2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan - tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan SDGs Provinsi NTB tahun 2023 yang disusun menggambarkan progres capaian 17 tujuan SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

Dengan adanya TPB yang dicanangkan oleh PBB diharapkan dapat mendorong semua Pemerintah Daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat untuk terlibat dan mensukseskannya. Adapun langkah startegis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB guna memastikan terlaksanakannya TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 tentang rencana aksi daerah percepatan pencapaian TPB/SDGs tahun 2019 – 2023 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 dan telah di revisi menjadi Peraturan Presiden nomor

111 tahun 2021 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun substansi muatan yang diintegrasikan dalam dokumen dimaksud diantaranya, sasaran, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Guna memastikan terwujudnya capaian tujuan TPB/SDGs, maka diharapkan peran masing-masing stakeholder yang terkait sesuai tupoksi dan kewenangannya agar mengoptimalkan implimentasi kegiatan-kegiatan strategisnya dengan menggunakan instrumen analisa dan data yang terukur sesuai standar akademik.

Akhirnya kami berharap semoga laporan TPB/SDGs tahun 2023 yang menggambarkan peran berbagai stakeholder dalam berkontribusi membangun daerah NTB dapat bermanfaat dan juga menjadi referensi pertimbangan perencanaan pembangunan daerah NTB di masa mendatang. Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini baik dari sisi konten, materi maupun tata naskah masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan laporan selanjutnya sangat kami harapkan.

Mataram, Maret 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB



Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs).....	5
BAB III PEMBELAJARAN BAIK TPB/SDGS	126
BAB IV PENUTUP	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	138

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang tidak tercapai. TPB/SDGs dalam pencapaiannya mengutamakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah : Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ditingkat Nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk

rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaanya.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” yang akan diwujudkan melalui 6 misi, yaitu : 1) NTB Tangguh dan mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah 2) NTB Bersih dan melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi 3) NTB Sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah 4) NTB Asri dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 5) NTB Sejahtera dan mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi 6) NTB Aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari visi dan misi ini, terlihat jelas keselarasan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023.

Pembangunan daerah yang selaras dengan agenda pembangunan nasional ini menunjukkan kontribusi yang positif dari provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2019-2023, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan

konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Sinergi antara RPJMN 2020-2024 RPJMD dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDGs, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDGs di daerah.

Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan agar dapat memfasilitasi generasi sekarang sekaligus generasi yang akan datang. Konsep pembangunan adalah mengurangi sampah dari hasil pembangunan yang tidak efisien, maka SDGs mendorong cara-cara pencapaian dengan beberapa nilai, yaitu diantara kesetaraan, inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan

TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah terutama terkait data capaian indikator, program/kegiatan yang mendukung capaian serta pembelajaran dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun non pemerintah.

BAB II

TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)



Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

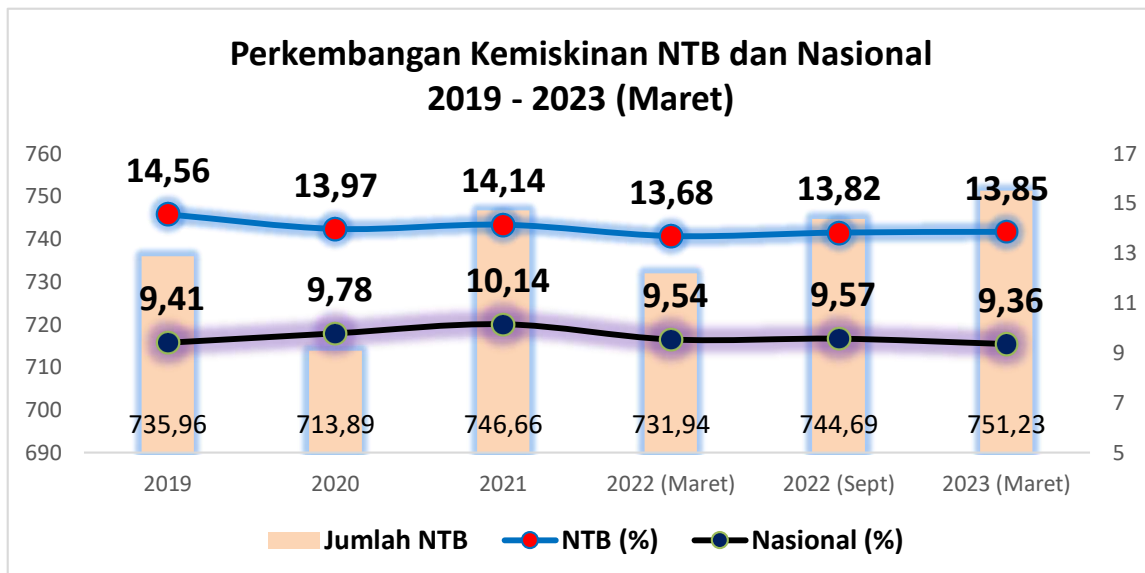
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.								
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.(PPP: \$ 1,9 per hari)	BPS/Suse nas	%	PM	PM	2,64	Semua OPD	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	TNP2K	jiwa	PM	PM	19.659	Semua OPD	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1.2.1*	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis Kemiskinan	BPS/suse nas, BDT	%	14,75 (2018)	9,75	13,85	Semua OPD	
1.2.2*	Penduduk Miskin	BDT	Orang	737.460	453.902	744.69	Semua OPD	
Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sisitem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS)/ P BPJS	BPS	%	PM	PM	64,50	Dinas Kesehatan	
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJS N-K	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	%	68,83	92,21	33,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan	Dinas Sosial Provinsi NTB	%	5,7	9,2	100	Dinas Sosial Provinsi NTB	

	inklusivitas / P DMMR							
1.3.1 (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial Provinsi NTB	Orang	165.362	527.372	493.983	Dinas Sosial Provinsi NTB	
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat.								
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan/P Salifaskes (Kelompok Penduduk 40% Terbawah)	BPS/Suse nas	%	85.72 (2016)	89,01	95,91	Dinas Kesehatan	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap / PIDL	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	69,11	BKKBN	
1.4.1.(c)	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin /CPR-SC	BPS (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia	%	PM	PM	60,3	BKKBN	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML	BPS/Suse nas	%	69.58 (2016)	79,75	96,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL	BPS/Suse nas	%	58.31 (2016)	71,09	85,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Kesehatan	
1.4.1.(f)	Persentase rumah	BPS/Suse	%	PM	PM	7,95	Dinas	

	tangga kumuh perkotaan / P RTKP	nas					Pemukiman dan Perumahan Rakyat	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat / APM SD	BPS/Suse nas	%	100.57	100.78	100,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat / APM SMP	BPS/Suse nas	%	94.84	103.60	99,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-laki di SMA/MA/ sederajat / APM SMA	BPS/Suse nas	%	106.99	100	106,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0 - 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran / PKAL	BPS/Sus enas	%	PM	PM	98,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	●
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN / PSPU	BPS/Sus enas	%	PM	PM	99,68 178 orang miskin	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	●
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi ketahanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan dan bencana								
1.5.1.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	lokasi	PM	PM	133	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	●
1.5.1.(e)	Indeks resiko bencana	BPBD	resiko	PM	PM	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	●
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	JIBI/JITU PASNA	rupiah	PM	PM	184 miyar (2022)	BPBD Provinsi NTB	●

1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	BPBD	dokumen	2	-	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Bappeda Provinsi NTB	Rupiah (Juta)	104.555,4 (2018)	4.775.424	2.505.831.812.919	Bappeda	

Kedaaan dan Kecendrungan



Sumber data: BPS NTB 2023

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,66

persen, naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 0,5 ribu orang (dari 384,03 ribu orang pada September 2022 menjadi 383,53 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 7,04 ribu orang (dari 360,66 ribu orang pada September 2022 menjadi 367,70 ribu orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp498.996,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.441,- (75,04 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp124.555,- (24,96 persen)

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi Provinsi NTB saat ini adalah belum optimalnya koordinasi TKPK provinsi dengan TKPK kabupaten/kota serta belum optimalnya sinergitas program/kegiatan antara Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Data sasaran program P3KE belum dipakai sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan, strategi pelaksanaan yang belum berjalan efektif dan kualitas SDM yang rendah dan bantuan adalah bantuan berupa kebutuhan dasar. Monitoring dan evaluasi juga bermanfaat sebagai pembelajaran bersama antara pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif. Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku atau pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Provinsi NTB, Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Amanat dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas adalah secara garis besar memerintahkan kepada Daerah untuk penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan berbagai program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah Sistem monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk mengetahui output dan outcome dari berbagai upaya program/kegiatan yang sedang dan telah berjalan terkait penanggulangan kemiskinan.

Upaya Percepatan Pencapaian

Penguatan kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangna kemiskinan memerlukan upaya antara lain; membangun keterpaduan dan sinergisitas dalam system monitoring dan evaluasi yang memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi secara regular dan terpilat, mengembangkan standarisasi indikator, variabel, dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, memperluas kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi tentang kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, melaksanakan survey dan kunjungan lapangan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagai respon terhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah NTB tahun 2023 diantaranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan perangkat Daerah. Adapun pagu dan realisasinya sebagai berikut :

NO	OPD	Pagu (DPA)		Pagu (DPA) Total	REALISASI		Total Realisasi
		APBD	APBN		APBD	APBN	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,311,025,000	6,613,400,000	7,936,775,000	3,954,517,525		3,954,517,525
2	Dinas Tenaga Kerja	2,428,773,200	4,482,074,000	6,910,847,200	1,303,275,651	4,446,128,790	5,749,404,441
3	Badan Riset dan Inovasi Daerah	31,470,748,000		31,470,748,000	27,381,325,203		27,381,325,203
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3,131,876,564		3,131,876,564	2,625,000,000		2,625,000,000
5	Dinas Pariwisata	2,535,840,000		2,535,840,000	1,192,335,500		1,192,335,500
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	352,696,800		352,696,800	352,169,600		352,169,600
7	Dinas Kesehatan	89,346,918,047		89,346,918,047	71,550,470,147	17,796,447,900	89,346,918,047
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12,288,957,967	3,416,200,000	3,416,200,000	2,854,689,400		2,854,689,400
9	Dinas Lingkungan Hidup	30,973,012,400	17,635,020,000	48,608,032,400	20,843,764,227	11,801,450,867	32,645,215,094
10	Dinas Ketahanan Pangan	412,500,000			412,500,000		412,500,000
11	Dinas Perdagangan	14,019,570,850		14,019,570,850	12,878,951,410		12,878,951,410
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Dukcapil		874,499,900	874,499,900		870,919,000	870,919,000
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24,000,450,000	1,680,720,000	25,681,170,000	24,000,450,000	1,680,720,000	25,681,170,000
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	188,600,000		188,600,000	161,950,000		161,950,000
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	238,365,235		238,365,235	236,863,775		236,863,775
16	Dinas Sosial	19,826,014,960	2,491,455,700,000	2,511,281,714,960	19,093,312,919	2,486,738,500,000	2,505,831,812,919

Tabel diatas terdapat 16 perangkat daerah yang melakukan program yang mengarah pada kemiskinan dan terdapat dan beberapa perangkat daerah yang telah melaporkan dana anggaran APBD beserta dana APBN total anggaran APBD Provinsi sebesar 235.525.367.023- dan total anggaran APBN Provinsi NTB sebesar 2.526.157.613.900.-



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	BPS	%	PM	PM	2,24	Dinas Ketahanan Pangan	
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita/PKG AB (5)	Dinas Kesehatan	%	22,6	15.0	5,67	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan	
2.1.2*	Parvelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	7,54	4.42	7,86	Dinas Ketahanan Pangan	
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400kkal/kapita/hari	BPS	%	7,54	4,42	2,89	Dinas Ketahanan Pangan	
Target 2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk pendek anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula								
2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)	Balitban gkes melalui kesehata n dasar (Risksd as), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	37,2	31	13,78	Dinas Kesehatan	
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/baduta	Balitban gkes melalui kesehata n dasar (Risksd as), Direktorat Bina Gizi	%	23,5	16	14,8	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
		Melalui PSG						
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), Direktorat Bina Gizi Melalui PSG	%	8,6	5,5	5,4	Dinas Kesehatan	
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), survei indikator kesehatan nasional (sirkesnas)	%	56,5	47		Dinas Kesehatan	
2.2.2 (b)	Presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif	Balitbangkes melalui kesehatan dasar (Riskesdas), BPS/Susenas	%	41,2	80	96,65	Dinas Kesehatan	
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan	DKP	%	78,3 (2018)	83,30	94,70	Dinas Ketahanan Pangan	

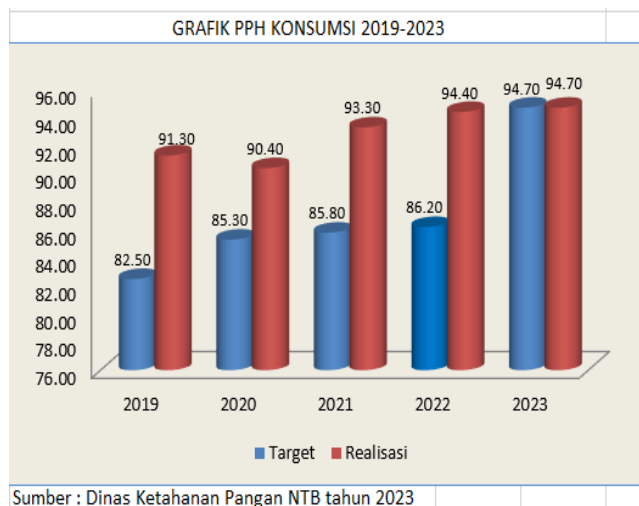
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	(PPH Point)							
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	30,18	30.65	53,29	Dinas Kelautan dan Perikanan	
2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sector pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Data nilai tambah pertanian BPS/Sakernas	Rp	32.821,82	27.350	35.719.396,3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

Keterangan : "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*

Keadaan dan Kecendrungan

Kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Kondisi rentan rawan pangan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya produksi pangan di wilayah itu dibandingkan dengan kebutuhan, kemudian tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk miskin di daerah rentan rawan pangan tersebut.

Selaras dengan itu, FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 (empat) komponen, yaitu: 1) Kecukupan ketersediaan bahan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan, dan 4) Kualitas/keamanan bahan pangan yang digunakan



Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya,

yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan.

Provinsi NTB terlihat bahwa Pola Pangan Harapan setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat dari angka 91.30 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 94,70 persen pada tahun 2023. Terdapat peningkatan sebesar 3,40 persen artinya status pangan dan gizi Masyarakat NTB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Program Pola pangan harapan juga berdampak pada stunting di NTB yang terus mengalami penurunan dan telah mencapai target yang diharapkan, dengan capaian lima tahun terakhir sesuai data e-PPGBM. Tahun 2019 sebesar 25,9 persen dari target nasional 26,7 persen, dengan input data e-PPGBM 70,50 persen. Tahun 2020 sebesar 23,51 persen dari target nasional 24,10 persen dengan input data e-PPGBM 82,70 persen. Kemudian tahun 2021 sebesar 19,23 persen dari target nasional 21,10 persen dengan input data e-PPGBM 98,53 persen. Tahun 2022 sebesar 16,84 persen dari target nasional 18,40 persen dengan input data e-PPGBM 98,54 persen, dan data terbaru per September 2023, sebesar 13,78 persen dari target nasional 16 persen, dengan input data e-PPGBM 98 persen.

Sementara itu, data dari 10 kabupaten dan kota di NTB, delapan di antaranya mencapai perkembangan stunting dengan tren penurunan positif. Sumbawa Barat 7,64 persen; Sumbawa 8,47 persen; Dompu 10,89 persen; Bima 11,78 persen; Lombok Barat 12,38 persen; Kota Bima 12,39 persen; Lombok Tengah 12,39 persen; dan Kota Mataram 14,24 persen.

Tantangan dan Pembelajaran

Permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan menjadi tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat adalah :1. Masih adanya daerah terkategori desa rentan rawan pangan. masih terdapat 6 Kecamatan atau 5,13% dari total 117 kecamatan se NTB yang terkatogori Rawan dan Rentan Rawan Pangan 2. Fluktuasi harga dan pasokan pangan pokok strategis. 3. Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan 4. Rendahnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar. Permasalahan lainnya adalah tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : a) perilaku masyarakat yang merasa belum makan jika belum makan nasi; b) masih rendahnya daya beli masyarakat; c) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan; d) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.

Untuk penurunan angka stunting masih ada dua kabupaten lainnya yang masih menjadi PR Pemprov NTB yang saat ini harus dan terus dilakukan pendampingan secara konsisten dan berkesinambungan, adalah Kabupaten Lombok Timur 17,24 persen dan Lombok Utara 18,03 persen

Kebijakan dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan provinsi NTB untuk mencapai target adalah meliputi; adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan, serta meningkatkan diversifikasi pangan

local, dengan proram-program pemanfaatan pekarangan yang ada dirumah-rumah masyarakat. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) B2SA goes to School, b) Pengembangan Desa B2SA, c) Pemberian bantuan hibah berupa bantuan pangan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan dan d) Gelar Pangan Murah

Upaya Percepatan Pencapaian

Pemerintah provinsi NTB terus berupaya melalui program/kegiatan untuk kebijakan pola pangan harapan meliputi peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, tersedianya lumbung pangan masyarakat, terbina dan tertatanya kelembagaan desa mandiri pangan, memperbanyak kawasan rumah pangan lestari, serta terpantaunya arus keluar masuk komoditas pangan strategis.

Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Program Pekarangan Pangan Lestari;
- b) Gerakan Tanam Mendukung Ketahanan Pangan;
- c) Pengembangan Pangan Lokal;
- d) Peningkatan produksi dalam negeri (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun rehabilitasi) dan impor;
- e) Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumber daya lokal seperti pisang, jeruk, pepaya serta sayuran hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut;

- f) Pengembangan komoditas umbi-umbian perlu dilakukan melalui penyiapan teknologi budidaya (panen dan pasca panen) serta upaya promosi dan sosialisasi teknologi industri pengolahan;
- g) Peningkatan konsumsi pangan hewani asal ikan yang mempunyai kandungan protein dan berbagai mineral mikro yang cukup tinggi melalui program/kegiatan Gemar Makan Ikan;
- h) Peningkatan konsumsi telur dan daging unggas melalui program/kegiatan Gemar Makan Telur;
- i) Sosialisasi dan kampanye menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massif;
- j) Meningkatkan Kerjasama dengan organisasi/Lembaga/institusi terkait



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	SDKI (2012), AKI se-Nusa Tenggara, Papua Tahun 2015	orang	251 (2012)	-	257 (LPSP 2020)	Dinas Kesehatan	
		Dinas Kesehatan	%		84	85,3	Dinas Kesehatan	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (%)	BPS/Susenas	%	99,47	100	98,29	Dinas Kesehatan	
3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan	BPS/Susenas	%	90.42	95	98,60	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS),B KKBN /SDKI	Orang	75 (2012)	-	29.37 (LPSP 2020)	Dinas Kesehatan	▲
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS),B KKBN /SDKI	Orang	33 (2012)	-	24,64 (LPSP 2020)	Dinas Kesehatan	▲
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	BPS (Sensus Penduduk dan SUPAS),B KKBN /SDKI	Orang	57 (2012)	-	25 (LPSP 2020)	Dinas Kesehatan	▲
3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	Dinas Kesehatan	●
Target 3.3 Pada Tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	Kemenkes	Kasus	98	57	174	Dinas Kesehatan	▲
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Kasus	170	110	9.009	Dinas Kesehatan	▲
3.3.3*	Kejadian Malaria per	Dinas	%	0,25	0.20	0.06	Dinas	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	1.000 orang	Kesehatan					Kesehatan	
3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	3	8	6	Dinas Kesehatan	▲
3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Kemenkes	%	90	100	100	Dinas Kesehatan	●
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta)	Kemenkes	Orang	221	150	296	Dinas Kesehatan	▲
3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	Kab/kota	0	0	8	Dinas Kesehatan	●
3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis	Dinas Kesehatan (Survey Mikro Filaria Rate/MFR), BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan	
3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	Kab/kota	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan	
Target 3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	5,9	4,6	32,79	Dinas Kesehatan	●
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas dan Sirkesnas	%	42	21,74	49,7	Dinas Kesehatan	●
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Riskesdas	%	2,00	0,60		Dinas Kesehatan	
3.4.2*	Angka kematian (Insidens rate) akibat bunuh diri	Kepolisian	Orang	13	0	0	Kepolisian	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Kab/kota	10	10	10	Dinas Kesehatan	●
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Dinas Kesehatan, BNN	Orang	775	275	473	BNN	●
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi	Dinas Sosial	Orang	20 (2018)	20	124	Dinas Sosial	●
3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan	Dinas Sosial, BNN	Orang	5	20	0	BNN	▲
3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Dinas Sosial	Lemba ga	8 (2018)	13	2	Dinas Sosial	▲
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN	%	1,77	1,69	1,73	BNN	▲
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas								
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Kepolisian	Orang	PM	PM	83	Kepolisian	●
Target 3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksusal dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan Pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana	BKKBN	%	50,9	60,8	60,2	BKKBN	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern							
3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	BKKBN	%	50,9	52,9	60,3	BKKBN	●
3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang sama dan menyatakan dalam persentase	BKKBN	%	74,77	76,65	60,2	BKKBN	●
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	BPS (LP SE 2020)	%	23,7	13,32	41,8	BKKBN	▲
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BPS (LP SE 2020)	%	2,5	1,3	2,39	BKKBN	▲
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	BPS/Susenas	%	6,49 (2016)	4,50	9,04	Dinas Kesehatan	▲
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	BPS/Susenas	%	PM	PM	92,6	Dinas Kesehatan	●
3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan, BPJS	%	66,74	80,00	92,6	Dinas Kesehatan	●
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥	Bappenas/Susenas	%	5,9	3,00	32,79	Dinas Kesehatan	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	15 tahun							
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	%	74,05	95	97,14 (Obat), 87,93 (Vaksin)	Dinas Kesehatan	●
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan:	Dinas Kesehatan	%	PM	PM		Dinas Kesehatan	●
	Dokter					2.295 (2022)		
	Perawat					12.652		
	Bidan					8.088		
	Tenaga Kefarmasian					1.959		
	Tenaga Kesehatan Masyarakat					1.059		
	Tenaga Kesehatan Lingkungan					618		
	Tenaga Gizi					1.104		
	Tenaga Medis					2.228		
	Psikologi klinis					26		
	Tenaga Keterampilan Fisik					259		
	Tenaga Keteknisan medis					1.381		
	Tenaga Teknik biomedika					1.931		
	Tenaga Kesehatan Tradisional					2		

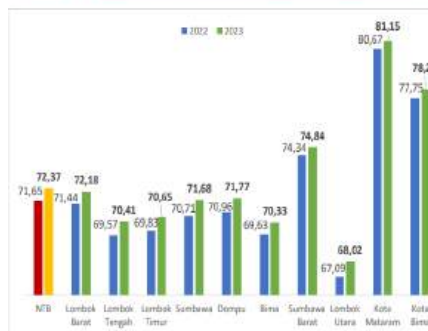
Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*

Kadaan dan Kecenderungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 mencapai 72,37. Selama tahun 2020-2023, IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat sebesar 0,90 persen per tahun. IPM Provinsi NTB

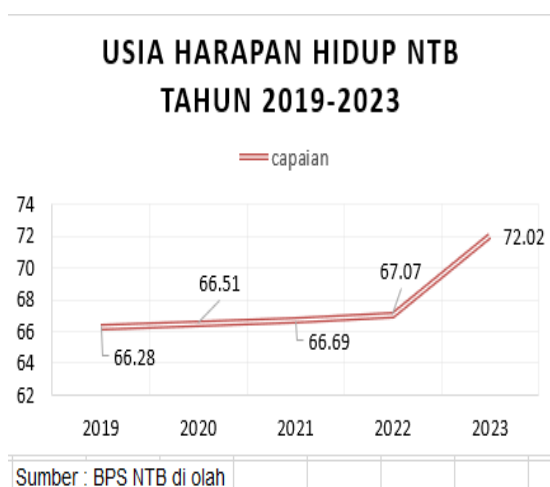


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB TAHUN 2022 - 2023



- IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022
- Kota Mataram menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebesar 81,15
- Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan angka IPM terendah sebesar 68,02

mengalami peningkatan dari 71,65 di tahun 2022 menjadi 72,37 pada tahun 2023. Capaian IPM Provinsi NTB 2023 berada pada kategori tinggi. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2023 mencapai 1,00 persen. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, bayi yang lahir pada tahun 2023 di Provinsi NTB memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,02 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,36 tahun dibandingkan tahun 2022. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Dimensi pengetahuan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata



Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2023 Provinsi NTB mencapai 13,97 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022. Sedangkan RLSnya sebesar 7,74 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,13 tahun dibanding tahun sebelumnya. Dari dimensi standar hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang

disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2023 sebesar 11,10 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 414 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022.

Kasus kematian ibu dan bayi di Provinsi NTB tercatat mengalami penurunan. Misalnya angka kematian ibu sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 26 kasus. Sementara sebelumnya, di tahun 2022 sebanyak 97 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak 144 kasus. Adapaun kasus kematian bayi sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 196 kasus. Sebelumnya di tahun 2022 tercatat sebanyak 788 kasus, menurun dari tahun 2021 sebanyak 811 kasus. Sementara di tahun 2023 hingga bulan Februari angka stunting turun menjadi 14,76 persen dengan input data mencapai 97 persen lebih.

Dengan demikian, Pemprov NTB optimis persentase stunting di daerah ini menjadi 14 persen di tahun 2024 seperti target nasional

Epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya mulai tahun 2019 – 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat semakin meningkat. Hal ini juga di dukung dengan sarana prasarana pendukung dan tenaga kesehatan yang semakin membaik di seluruh kabupaten kota di NTB.

Tantangan dan Pembelajaran

Tahun 2023 pada bidang kesehatan masih pada isu kematian ibu dan bayi yang masih tinggi disebabkan starting point penetapan target pada baseline data terlalu tinggi sehingga walaupun capaian sudah berprogres lebih baik tetapi masih tetap berada di bawah target RPJMD maupun secara nasional. Beberapa program yang telah mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan seperti program Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Tantangan yang masih dihadapi pada bidang kesehatan di NTB adalah angka Harapan Hidup masih jauh dibawah AHH Nasional, Masih tingginya jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi, Penyakit Menular dan Tidak Menular masih tinggi dan Stunting masih menjadi masalah.

Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai target Angka Harapan Hidup didukung dengan 8 (delapan) program yang tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit HL Manambai, RS Jiwa Mutiara Sukma dan RS Umum Daerah Provinsi NTB.

Pemerintah provinsi NTB telah menginisiasi program Generasi Emas NTB (GEN), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak. Program ini dimulai dari pemantauan ibu hamil

yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh tenaga terlatih GEN, yaitu Kader GEN dan Pendamping Desa. Dengan Program “PARANA” yaitu Program Pasangan ramah anak, dari 8.366 sasaran program GEN yang mendapatkan intervensi GEN yaitu mendapatkan kelas parana dan multi mikro nutrient (MMN) berupa caviplex dan sasaran ini diintervensi pada tahun 2017 – 2018, Sehingga tahun 2019 mulai untuk sertifikasi parana penentuan sasaran termasuk parana melalui penilaian skor 45 indikator, sasaran yang sudah teridentifikasi atau tersertifikasi sebanyak 3.993 dan yg sudah parana sebanyak 2009. Proporsi sampel atau sasaran terbanyak dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, masing-masing 26,3 %. Meskipun jumlah lokasi desa/kelurahan per kabupaten/ kota dalam program GEN adalah sama-sama 10, namun jumlah sasaran ibu hamil berbeda antar kabupaten/kota.

Selanjutnya ada program Posyandu Keluarga di Provinsi NTB yang hingga saat ini mencapai 7.676 yang ada di setiap dusun di NTB. Dimana terdapat 41.682 kader yang mayoritasnya merupakan Perempuan. Keberadaan Posyandu Keluarga mampu menurunkan angka stunting di NTB, dimana pada tahun 2019 sebesar 25,5 persen turun menjadi 23,3 persen tahun 2020. Angka tersebut kembali turun menjadi 19,2 persen di tahun 2021 dan progresnya makin bagus di tahun 2022 dengan persentase sebesar 16,8 persen. upaya target STBM di seluruh kabupaten/kota se-NTB, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit hingga Program Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui sosialisasi di Posyandu

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu program unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembangunan bidang sosial adalah revitalisasi posyandu. Terkait dengan pelaksanaan GEN, jajaran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB melaksanakan kegiatan Aksi Kepedulian yang dikenal dengan program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan bagian dari program Aksi Seribu Hari atau disingkat ASHAR. Program GEN merupakan program jangka panjang

Pemerintah Provinsi NTB, dengan tujuan pada tahun 2025 akan lahir generasi unggul, generasi emas dari NTB. Untuk tahun 2022 Program GEN adalah Program PARANA. Selain konsumsi makan dan factor infeksi, stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan Balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan. Intervensi utama Program Generasi Emas NTB (GEN) perbaikan pola asuh anak, sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan standar. Untuk pertumbuhan, indikator yang digunakan adalah angka atau prevalensi stunting.

Posyandu Keluarga yang digalakkan Pemprov NTB terbukti mampu menurunkan angka stunting, serta angka kematian ibu dan bayi. Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga didorong untuk rutin berkolaborasi dengan 10 kabupaten/kota di NTB.



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 4.1 pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1*	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan (ii) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	PM	PM	52,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan	%	68,32 (2018)	72,62	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
		Kebudayaa n						
4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	%	63,53 (2018)	72,61	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Badan Akreditasi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	%	74,71 (2018)	84,21	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	BPS/Susen as	%	109,63	116,00	102,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	%	107,83	108,23	102,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	BPS/Susen as	%	94,97	96,57	108,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	%	110,16	110,99		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Seder ajat	BPS/Susen as	%	93,89	99,86	104,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	%	97,93	100.76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk	BPS/Susen as	%	7,66	7,99	8,39	Dinas Pendidikan dan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	umur ≥ 15 tahun						Kebudayaan	
4.1.1 (h)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK sederajat	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	100,76	104,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.1(i)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	BPS/Dinas Pendidikan	%	67,22 (2016)	68,32	86,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang	BPS/survey sosial ekonomi Nasional (susenas)	%					●
	SD/ sederajat	BPS/survey sosial ekonomi Nasional (susenas)	%			98,11		
	SMP/ sederajat	BPS/survey sosial ekonomi Nasional (susenas)	%			92,95		
	SMA/ sederajat	BPS/survey sosial ekonomi Nasional (susenas)	%			63,66		
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	BPS/survey sosial ekonomi Nasional (susenas)	%			7-12 Tahun: 0,21 13-15 Tahun: 3,85 16-18 Tahun: 15,48		●
Target 4.2 pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, Pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh menempuh Pendidikan Dasar								
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	BPS/Susenas	%	37,57 (2016)	41,39	61,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
		Dinas Pendidikan	%	75,72	83,22		Dinas Pendidikan dan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		dan Kebudayaan					Kebudayaan	
Target 4.3 pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	BPS/Susenas	%	93,89	99,86	104,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	97,93	100,76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS/Susenas, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	%	21,57 (2016)	26,3	31,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
Target 4.4 pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	46,63 (2016)	67,90	91,58 (2022)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)	BPS	%	23,71 (2016)	41,79	58,69 (2021)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.5 pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS/Susenas	%	100,57	100,78	100,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMP/MTs/Sederajat	BPS/Susenas	%	99,75 (2016)	100,10	99,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,02	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMA/SMK/MA/ Sederajat	BPS/Susenas	%	86,18 (2016)	92	106,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/laki-laki di PT (%)	BPS/Susenas	%	118,84 (2016)	161,31	80,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.6 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi								
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS/Susenas	%	87,14	96	89,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	BPS	%	100	100	99,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	BPS	%	87,14	96	93,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	98 (2016)	100	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%SD	97,62	99,12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	98,42	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100		Dinas .Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) Internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	45,59	57,39	69.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	54,70	71,5	90.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	1,8	7,2	96.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Dapodik	%SMK	33,99	79,22	97,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	31,73	50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (c)Komputer tujuan pengajaran	Dapodik	%SD	58,51	63,91	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	47,90	47,90	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	72,07	77,47	18,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke : (d) Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik	%SD	PM	PM	78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	PM	PM	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	PM	PM	81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	PM	PM	81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	PM	PM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke:	Dapodik	%SD	100	100	51	Dinas Pendidikan dan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	(f)fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin						Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	100	100	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100	62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g)fasilitas cuci tangan (terdiri dari,sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%SD	100	100	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMP	100	100	69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMA	100	100	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SMK	100	100	73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dapodik	%SLB	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.		kasus		PM	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	SD		%			23		
	SMP		%			50		
	SMA		%			13,5		
Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.								
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Dikbud	%	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Target 4.c Pada tahun 2030, Secara signifikanmeningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negaraberkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dikbud : Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan	%	51,42	71,82	NA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▲
	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik		orang	PM	PM	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	94,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik		%	PM	PM	98,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik		orang	3289	5119	98,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Jumlah Kepala SMK yang bersertifikat pendidik		orang	1741	2593	97,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	76,88	93,28		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minima S1/D4		%	83,26	98,88		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru SD/SDLB dengan		%	77,51	97,76		Dinas Pendidikan dan	

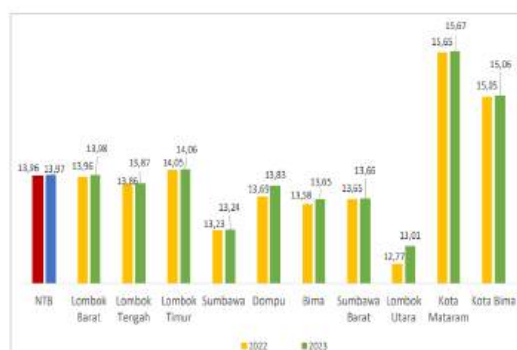
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	kualifikasi minima S1/D4						Kebudayaan	
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	95,77	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minima S1/D4		%	99,22	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minima S1/D4		%	99,48	100,00	98,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4		%	98,96	99,58	96,7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Guru Negeri yang bersertifikat		%	80,03	96		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Guru Swasta yang bersertifikat		%	13,89	20		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Keadaan dan Kecenderungan

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi



PERKEMBANGAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB TAHUN 2022-2023 (tahun)

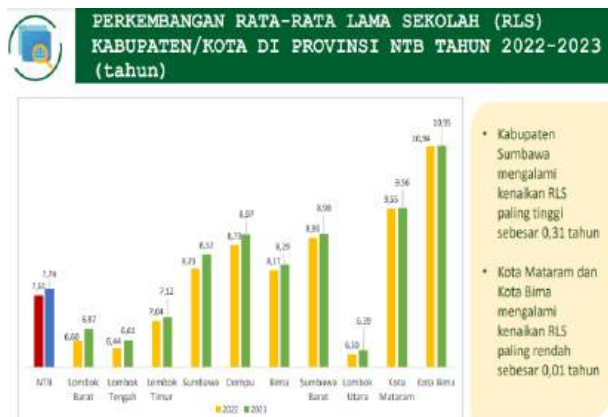


Kabupaten Lombok Utara mengalami kenaikan HLS paling tinggi sebesar 0,24 tahun

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. RLS didefinisikan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam

pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang. Dimensi pengetahuan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2023 Provinsi NTB mencapai 13,97 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022. Sedangkan RLSnya sebesar 7,74 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,13 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Lombok Utara mengalami kenaikan HLS paling tinggi sebesar 0,24 tahun

Tantangan dan Pembelajaran



Tantangan yang di hadapi adalah masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di NTB disebabkan banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan survei yang dilakukan, penduduk di atas usia 25

tahun juga banyak yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolahan. Dari hasil analisis ditemukan beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; 1) Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA cenderung meningkat. Posisi Provinsi NTB sebagai daerah tujuan wisata dan mobilitas tenaga kerja ke luar negeri telah memungkinkan pesatnya perkembangan peredaran. 2) Perkelahian pelajar dan antar warga masih terjadi sebagai akibat dari interaksi dan kesenjangan di bidang ekonomi, sosial dan SARA. 3) Adanya komitmen global yang mengikat untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan, dalam kerangka aksi Dakkar mengenai Pendidikan untuk Semua (Pendidikan Untuk Semua (PUS), Education for All), dan 4) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia disadari amat ditentukan oleh kualitas dan akses pendidikan, sehingga upaya untuk melaksanakan pemberantasan

buta aksara dan angka partisipasi sekolah disadari merupakan upaya pokok dalam mencapai IPM yang tinggi.

Sekalipun demikian, terdapat beberapa peluang yang dapat mendukung pengembangan pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB; 1) Sistem perdagangan dunia yang terbuka memberikan peluang dalam meningkatkan mutu pendidikan. 2) Laju perkembangan IPTEK dunia semakin cepat dan memerlukan perbaikan mutu pendidikan yang terus menerus berkesinambungan. 3) Meningkatnya permintaan dunia usaha/industri terhadap tenaga kerja terampil. 4) Semakin luasnya akses informasi melalui teknologi komunikasi dan informasi (TIK, Web dan sejenisnya) membuka peluang bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar terus menerus meningkatkan kemampuan diri, dan 5) Meningkatnya permintaan dunia usaha/industri terhadap tenaga kerja terampil

Kebijakan dan Strategi

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu memahami kondisi eksisting pendidikan NTB. Kondisi eksisting yang dimaksud adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan pembangunan pendidikan kita saat ini adalah (a) komitmen politik kuat, baik Gubernur-Wakil Gubernur maupun DPRD; (b) dukungan SDM dan sarana-prasarana relatif memadai; dan (c) aplikasi IT yang mudah diakses.

Selain itu pembangunan pendidikan NTB memiliki beberapa peluang, di antaranya (a) program pengiriman 1000 mahasiswa ke luar negeri; (b) NTB Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) yang erat kaitannya dengan penyiapan SDM; dan (c) SDA Nusa Tenggara Barat sangat andal, baik sektor pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, maupun kelautan dan perikanan.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan selain untuk mendukung pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, juga untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah: Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas) tahun 2022

sebesar 100 persen dari target capaian 100 persen dan indikator persentase digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul) sebesar 32,76 dari target 31,89 persen.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya-upaya untuk percepatan pencapaian Peningkatan IPM adalah: Pertama, akselerasi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Mengacu pada rapor mutu pendidikan NTB yang diterbitkan oleh LPMP NTB, mutu guru dan tenaga pendidik masih sangat rendah (mencapai 40% dari 100% yang diharapkan) diantaranya adalah: (a) peningkatan kapasitas guru (kuantitas dan kualitas); (b) peningkatan komitmen kerja Guru dengan pola “Penghargaan dan Hukuman”; serta (c) persemaian guru unggul dengan membidik siswa-siswa SMA terbaik, untuk dilakukan pembimbingan minat menjadi guru terutama untuk mata pelajaran sains dan matematika, atau pelajaran lainnya yang dipandang urgen.

Kedua Program revitalisasi SMK. Program ini dimaksudkan untuk memastikan agar output SMK siap menjadi pewirausaha muda berbakat, yang memiliki kompetensi kerja, dan dapat diterima di pasar kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (a) mengevaluasi kesesuaian program studi yang ada dengan minat masyarakat, relevansi permintaan pasar kerja, dan keseusian dengan sumber daya lokal dan potensi pendukung di lingkungan sekolah; (b) penguatan lembaga dengan pemenuhan 8 standar pendidikan, serta regrouping sekolah; (c) SMK harus menjadi lokomotif menumbuhkan sektor industry, setiap SMK diwajibkan membuat suatu produk unggulan sebagai hasil karya siswa atau “one school one product” (OSOP).

Ketiga, wajib belajar 12 tahun. Program ini diharapkan dapat mendongkrak APK-APM dan IPM (pada variabel angka lama sekolah [schooling year]). Secara kumulatif Angka Lama Sekolah (ALS) di NTB sekitar 8 tahun. Artinya, penduduk NTB tingkat pendidikan penduduk NTB rata-ratanya setara kelas VIII SMP/MTs (belum tamat SMP/MTs), yang jauh di bawah ALS provinsi lain. Program ini tidak terlalu mahal karena biaya PSB telah ditangani oleh BOS sehingga butuh penguatan dari Komite Sekolah dan BOS Daerah. Program ini

harus dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai sosialisasi yang masif.

Keempat, gerakan penuntasan buta aksara. Gerakan Penuntasan Buta Aksara jauh lebih penting karena menyangkut kebutuhan literasi dasar masyarakat dan menjadi penyebab lemahnya kemajuan berinteraksi pada zaman serba digital ini dan penahan laju IPM. Implementasi program ini membutuhkan banyak pihak, yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta, Dinas Dikbud tetap sebagai pengendali program

Kelima, Persemaian Pemuda Bintang. Yaitu suatu program yang bertujuan untuk: (a) menemukan Siswa Berbakat (*gifted*) (untuk kemudian dibina, diarahkan dan dibiayai) dalam bidang sains, matematika, dan teknologi untuk dipersiapkan menjadi calon peserta kompetisi sains, matematika dan teknologi di tingkat nasional dan internasional; (b) menemukan calon siswa ataupun mahasiswa (lalu diarahkan dan dibiayai) yang siap dikirim ke luar negeri atau ke perguruan tinggi terbaik di luar maupun dalam negeri sehingga dapat menjadi andalan pembangunan, baik daerah maupun nasional. Data beasiswa Dalam Negeri tahun dari tahun 2018-2023 sebanyak 7107 orang sedangkan Beasiswa ke Luar sebanyak 503 orang; (c) mengefektifkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dapat membangun daya saing positif dan wadah aktualisasi (seperti Pramuka, PMR, Pencinta Alam, Kelompok Ilmiah Remaja, Sanggar Seni, klub-klub olahraga siswa, dan lain-lainnya); serta (d) menangkal serangan pemakaian narkoba dan kenakalan remaja dengan melahirkan segudang prestasi dari anak-anak berbakat (*gifted and talented student*).

Keenam, Persemaian Pelaku Budaya dan Kesenian Daerah. Program ini dimaksudkan untuk menemukan secara masif bibit-bibit pelaku seni dan budaya NTB baik Sasak, Samawa, dan Mbojo. Sebab, selama ini “kebudayaan” dipahami secara sempit sebagai “berkesenian” dan masih pola pembangunannya masih bersifat parsial. Transfer budaya harus dilakukan secara masif dan kontinyu sehingga beregenerasi serta dapat melahirkan pola budaya baru berkarakter Sasambo. Selain itu, program ini berorientasi pada

apresiasi dan penguatan sanggar-sanggar seni dan budaya, baik yang dikelola oleh masyarakat, sekolah, ataupun kampus.



Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2K B Provinsi NTB	%	0,069	0,06	141	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Sosial	Anak	301	110	519	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3AP2K B Provinsi NTB	%	0,014	0,014	751	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial	
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap	BPS melalui	%	0,035	0,042	0,76	Dinas Sosial (Unit PPA	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
	perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	SPHPN					Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)	
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun	BPS/Suse nas	%	0,62 (2016)	0	1,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	▲
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.	BPS/Suse nas	%	18.86 (2016)	7	17,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BKKBN	%	20 (2016)	10,2	20,8	BKKBN	▲
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS melalui SDKI atau BPS melalui SP dan SUPAS	%	75 (2012)	-	41,8	BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	●
5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS melalui Susenas	%	91.25 (2016)	99,86	104,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara Nasional								
5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)	KPU Provinsi NTB	%	21,43 (2014)	-	20 (2019)	KPU	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat Parlemen daerah (DPRD Provinsi NTB)	KPU Provinsi NTB	%	9.23 (2014)	-	1.54 (2019)	KPU	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD, BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	24	BKD	
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan Kesehatan	BKKBN, BPS melalui SDKI	%	77,9 (2012)	-	73,4	BKKBN	
5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang kontrasepsi modern).	BKKBN	%	15,6	3,1	5,2	BKKBN	
5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang	BKKBN	%	99.6	100	74,54	BKKBN	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Pena nggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	metode kontrasepsi modern.							
	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual	Biro Hukum, BKKBN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UU / PP	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN	
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1	Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	BPS	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	BPN	%	PM	PM	PM	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, BPN	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS melalui Sensus	%	48,96	63,3	61,11	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	▲
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.								
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan	OPD	2	2	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan,	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	gan Perempua n, Anak dan Keluarga Berencana					Anak dan Keluarga Berencana	

Keadaan dan Kecenderungan

Kesetaraan gender merupakan salah satu target utama yang ingin dicapai dalam pembangunan manusia Indonesia maupun secara global. Isu kesetaraan gender dapat diangkat menjadi tujuan kelima "Gender Equality" dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pembangunan pada hakikatnya adalah membangun manusia Indonesia seluruhnya tanpa memandang wilayah, kemampuan ekonomi, etnis, maupun gender. Kesenjangan gender terjadi pada semua aspek pembangunan, seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Kesenjangan pada sektor politik dapat dilihat dari persentase wakil rakyat perempuan di DPRD, pada sektor ekonomi dapat terlihat perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan, lapangan kerja yang hanya mensyaratkan tenaga kerja laki-laki, sedangkan pada sektor sosial budaya dapat dilihat dari Tingkat pendidikan dan posisi pengambil keputusan dalam rumah tangga dan masyarakat yang cenderung dimiliki oleh laki-laki.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan, dalam 4 (empat) tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023 sebanyak 519 kasus yang tersebar di 10 kabupaten kota di provinsi NTB. Angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak ada di kabupaten Lombok Timur dengan 109 kasus dan terendah ada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 13 kasus. Jenis kasus terdiri dari kekerasan fisik 40 kasus, psikis 44 kasus, seksual 301 kasus, eksploitasi 2 kasus, trafficking 16 kasus, pelelelaturan 8 kasis dan lain 132 kasus. Pelaku kekerasan khususnya kekerasan seksual pada anak paling besar dilakukan oleh teman/pacar, tetangga dan keluarga. Sedangkan kekerasan

yang di alami oleh perempuan dewasa banyak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tantangan dan Pembelajaran

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender



Dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN. Namun, dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya, ternyata masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki. Papua,

Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang paling banyak memiliki indikator ketimpangan gender di atas ketimpangan nasional disertai pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah nasional selama rata-rata sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan indikator ketimpangan dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki skor IDG sebesar 91,08 pada tahun 2022.

Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen yang paling rendah, dimana saat ini hanya ada 1 anggota perempuan dari total 65 kursi di DPRD. Hal ini menyebabkan keterlibatan 94 perempuan dalam parlemen turun signifikan di tahun 2019-2020, yakni hanya sebesar 1,52 - 1,54 persen, dimana pada periode tahun 2010 hingga 2018 berada pada level 9 – 10 persen. Selain itu, komponen ekonomi dan ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh sumbangan pendapatan perempuan dan tenaga profesional perempuan juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, berdasarkan indikator

ketimpangan yang digunakan dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG provinsi Nusa Tenggara Barat dalam tren meningkat dari tahun ke tahun meskipun masih di bawah rata-rata nasional. Sebagian besar indikator ketimpangan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat memperlihatkan ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan nasional. Sebanyak 6 (enam) indikator termasuk ke dalam kategori yang memiliki ketimpangan di atas nasional, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Keluhan Kesehatan, Tenaga Profesional, serta Sumbangan Pendapatan. Sementara itu, hanya ada dua indikator yang relatif lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional, yakni indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pengeluaran Per Kapita. Dapat disimpulkan dari indikator ketimpangan yang cukup besar terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan, sementara ketimpangan di sektor ekonomi relatif lebih baik. Tingginya ketimpangan gender dari sisi aspek pendidikan secara umum disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Hasil survey yang dilakukan oleh UNICEF memperlihatkan hanya 39 persen anak SD mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan 19 persen anak dalam kemampuan matematika. Kondisi ketimpangan di sektor pendidikan tersebut diperparah dengan masih kentatnya budaya patriarki yang dianut masyarakat, sehingga hal ini turut membatasi akses perempuan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, masyarakat Sasak sebagai suku terbesar di pulau Lombok (yang merupakan pulau terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat) mengantut sistem patrilineal, yakni menarik garis keturunan pihak laki-laki. Dengan adanya sistem patrilineal ini turut mendorong melekatnya budaya patriarki sehingga anak laki-laki akan menjadi prioritas pertama dalam mengakses pendidikan (Nursaptini,2019).

Di sisi lain, berdasarkan survey UNICEF terlihat bahwa akses terhadap proses persalinan di Nusa Tenggara Barat mencapai 93 persen kelahiran sudah dibantu oleh tenaga kesehatan, dimana hal ini memperlihatkan kecenderungan kematian 95 perempuan saat proses melahirkan sudah relatif kecil. Namun

demikian, jika dilihat dari layanan kesehatan reproduksi masih perlu ditingkatkan, terutama akses alat kontrasepsi modern. Kurangnya penggunaan alat kontrasepsi disebabkan beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan laki-laki di Nusa Tenggara Barat terhadap program Keluarga Berencana (KB), masih adanya keterbatasan distribusi alat kontrasepsi modern bagi laki-laki di provinsi Nusa Tenggara Barat, serta masih kentatnya budaya patriarki sehingga hal ini turut memaksa perempuan untuk tunduk kepada laki-laki (Permono, 2020).

Sementara itu, jika dilihat dari aspek ekonomi, ketimpangan di Nusa Tenggara Barat relatif lebih baik karena berada di bawah ketimpangan nasional. Hal ini salah satunya ditopang oleh rendahnya ketimpangan dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar perempuan di Nusa Tenggara Barat memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Meskipun angka TPAK di Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan cukup baik, namun sebagian sektor pekerja tersebut masih terpusat di sektor informal terutama di sektor pertanian, yang sebagian besar bekerja untuk mengolah lahan pertanian milik keluarga sendiri. Perempuan pedesaan di Nusa Tenggara Barat tersebut bekerja untuk membantu suami karena rendahnya pendapatan keluarga, sehingga banyak angkatan kerja perempuan yang berstatus menjadi pekerja keluarga tidak dibayar. (Kusuma, 2017). Ditambah lagi, tingkat pendidikan perempuan banyak didominasi oleh pendidikan rendah, yaitu SD maupun tidak tamat SD sehingga hal ini juga turut menyebabkan masih rendahnya kualitas TPAK di provinsi Nusa Tenggara Barat (Permono, 2020).

Isu lain yang juga mengemuka terkait ketimpangan gender di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah isu perkawinan anak. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia setelah provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkawinan anak merupakan permasalahan multidimensi yang memberikan dampak terhadap berbagai

aspek kehidupan perempuan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan ketenagakerjaan.

Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mencapai target 100 persen Perangkat Daerah dalam pembangunan berbasis responsif gender. Pencapaian 100 persen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama seluruh OPD terkait di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. dalam proses penganggarannya dan eksekusinya sehingga dapat mendorong terwujudnya indikator bidang pembangunan yang berbasis gender seperti adanya keterwakilan perempuan yang 30 persen di legislatif.

Kesetaraan Gender dapat digambarkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sehingga menjadi output kegiatan dan outcome program responsif gender di instansinya. Setiap OPD harus menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), yaitu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dari analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ program/kegiatan hingga rencana aksi. Instansi juga mampu menyusun Gender Budget Statement (GBS), yaitu dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran sampai ke desa. Selanjutnya PPRG menjadi strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, yang secara konsisten tertuang dalam RPJMD 2019-2023 dan RKPD.

Kebijakan dan Strategi

Dari sisi penganggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan telah memiliki komitmen yang cukup besar untuk mengurangi ketimpangan gender, dimana hal ini terlihat dari adanya Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah Nusa Tenggara Barat serta tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023, yang secara eksplisit menyebutkan salah satu misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mempercepat perwujudan masyarakat madani yang beriman dan 96 berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan,

keberagaman, dan kesetaraan gender yang proporsional. Meskipun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki political will terhadap anggaran yang responsif gender melalui regulasi dan misi pembangunan yang ditetapkan, namun terlihat belum maksimal dalam perencanaan dan implementasi anggaran. Selain itu, komunikasi lebih banyak berlangsung secara internal pemerintahan, sementara komunikasi eksternal dengan stakeholder yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan perempuan masih minim, sehingga hal ini menyebabkan masih terbatasnya informasi program kesetaraan gender kepada khalayak umum. Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah; penguatan kelembagaan PUG dan anak melalui keserasian kebijakan pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup Provinsi NTB, pada tahun 2020 telah diresmikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari kabupaten/kota. Selain itu, melalui APBD perubahan untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, telah didirikan UPTD bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten 9 Kabupaten/Kota kecuali Kota Mataram yang belum memiliki. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam upaya mencegah, menangani dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, perangkat daerah terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.



Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua..								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS : Susenas	%	69.58 (2016)	79,75	96,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penataan	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PU	Liter /detik	299,196	299,196	0	Dinas PU	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	74.20	87,10	79,11	Dinas PU	
Target 6.2 Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	BBPS : Susenas (Modul Kesehatan dan Perumahan)	%	43,07 (2016)	59,2	74,25 (2022)	Dinas Kesehatan	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	BPS :Susenas	%	58,31 (2016)	71,09	85,11	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Desa/ Kelurahan	1100	1100	702	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
6.2.1 (d)	Jumlah desa/Kelurahan yang Open Defecation free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	%	1100	10	10	Dinas Kesehatan	
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan dan komunal.	Dinas PU	Kab/Kota	10	10	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat	Kab/Kota	1	1	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM	
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas ESDM	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM	
Target 6.5 : Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LHK	Jumlah RPDAST	1	1	1	Dinas LHK	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Stasiun	62	62	153	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Kegiatan	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding(MoU) lintas Negara.	Dinas LHK	DAS	1	-	PM	Dinas LHK	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas LHK	Ha	200	200	5194.23	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Wilayah sungai	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lembaga	25	52	140	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas LHK	DAS	2	-	-	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas LHK	DAS	1	-	-	Dinas LHK/BPDASHL Dodokan Moyosari	
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas LHK	Danau	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari	●
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas LHK	NA	1	1	1	BPDASHL Dodokan Moyosari	●
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas LHK	NA	1	1	-	BPDASHL Dodokan Moyosari	
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LHK	NA	4090	6000	5179.01	BPDASHL Dodokan Moyosari	●
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LHK	DAS	2	5	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ BPDASHL Dodokan Moyosari	

Keadaan dan Kecenderungan

Nilai IKLH Provinsi NTB yang dicapai tahun 2023 berdasarkan perhitungan masing-masing komponen pembentuknya yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sebesar 71,92 poin. Hal ini berarti, nilai IKLH tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,36 poin dari tahun 2022 yang sebesar 70,56.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Perhitungan IKA menggunakan 8 parameter, yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat, Fecal Coliform. Perhitungannya menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai IKA dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan adanya berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup berhasil.

Perkembangan/tren nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) selama 3 tahun terakhir nilainya cenderung melampaui target dari tahun ke tahun. Untuk pengukuran parameter nilai IKU yang diukur tidak berubah, yaitu SO₂ (belerang dioksida) dan NO₂ (nitrogen dioksida). Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan monev unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui rehabilitasi vegetatif yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan polusi udara.

Tantangan dan Pembelajaran

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu komponen dari IKLH yang digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Pada komponen IKTL, parameter yang dinilai adalah memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa 7 pada kawasan hutan, dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi sektor kehutanan, serta

optimalisasi pengamanan hutan. Seiring dengan ditetapkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai salah satu pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 yang hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Indeks Kualitas Air Laut adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Petugas pengambilan sampel merupakan personil yang kompeten dalam pengambilan sampel lingkungan khususnya sampel air laut. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut. Pendampingan pemantauan kualitas air laut tahun 2023 dilakukan pada 23 titik lokasi.

Faktor penyebab meningkatnya lahan kritis adalah perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, dan aktivitas lain yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan.

Ketersediaan air baku yang tidak merata dan banyaknya mata air yang hilang maupun tertutup akibat kerusakan tutupan lahan di daerah resapan dan tanah longsor akibat gempa menjadi tantangan dalam penyediaan layanan air bersih/minum. Di banyak lokasi juga didapatkan, bahwa infrastruktur penyediaan air minum terutama dari jaringan perpipaan banyak yang tidak berfungsi karena sambungan illegal dari oknum-oknum yang dilewati oleh jaringan pipa dan tidak berfungsinya lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sehingga infrastruktur tidak berfungsi secara berkelanjutan.

Penurunan kualitas air juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, usaha peternakan/perikanan, industri, dan keperluan rumah tangga. Air sungai menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihan agar dapat layak digunakan. Selain itu, tingginya nilai E Coli disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

Dalam penyediaan layanan air bersih/air minum bagi masyarakat dibutuhkan kerjasama antar daerah dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Kesadaran kolektif kita untuk menjaga kelestarian lingkungan juga wajib untuk ditingkatkan, karena potensi dan ketersediaan sumber air baku ini sangat bergantung pada kelestarian alam. Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah memberikan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Provinsi NTB.

Kebijakan dan Strategi

Komitmen perencanaan dan penganggaran hijau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat ditelusuri dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan alokasi anggaran tahunan bagi pendanaan aktifitas-aktifitas terkait ekonomi hijau terutama pada isu-isu perubahan iklim khususnya terkait dengan kualitas tutupan lahan di NTB. Dalam kurun waktu 2017 – 2019, pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan didukung oleh beberapa program dengan total realisasi belanja yang fluktuatif. Total realisasi belanja terbesar selama 3 tahun terakhir dialokasikan untuk mendukung Program Perlindungan Hutan Konservasi SDA dan Ekosistem (47,17%). Kemudian disusul dengan program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial (32,79%), program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (14,57%), dan program Pengelolaan Hutan (5,45%). Adapun strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Pelibatan semua sumberdaya terkait/lintas Perangkat Dinas sebagai pelaku utama dalam penyusunan kerangka peraturan perundangan tentang pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
2. Penambahan secara bertahap sarana dan prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan melalui tahapan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, perencanaan, pendanaan dan investasi di provinsi dan kabupaten/kota
3. Pelibatan pemerintah daerah bersinergi kuat untuk mewujudkan pengembangan lembaga layanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bekerjasama dengan pemerintah pusat

Pelibatan pemangku kepentingan Perumahan Permukiman Air minum dan sanitasi di masyarakat melalui edukasi, sosialisasi lingkungan yang bersih sehat kepada masyarakat dan kerja sama dengan lembaga swasta dalam penyediaan sarana prasarana Air Minum dan Sanitasi

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan hidup merupakan tujuan pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan, kesehatan dan lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pada pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya taktis pemerintah dalam upaya mencapai target tersebut melalui kelembagaan program pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat sebagai asset bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam RPJMN 2020-2024 telah dituangkan melalui pilar ke-4 yaitu kesejahteraan yang terus meningkat. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN salah satu

agendanya adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Di sektor Kehutanan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian dari upaya mengurangi angka kemiskinan antara lain : 1. Membangun kerjasama mendukung upaya industrialisasi kehutanan (kayu dan bukan kayu) a) Industri Kayu Lima Sejahtera (Lombok Tengah) b) Industri Minyak Atsiri (berlokasi di Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa) c) Industri Bambu di Pulau Lombok d) Industri pabrik pakan ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan tanaman Lamtoro yang berlokasi di Pulau Sumbawa 2. Menyediakan bahan baku untuk pengembangan industrialisasi kehutanan melalui kerjasama kemitraan pada areal Perhutanan Sosial seluas 51.488,21 Ha 3. Meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap kelompok tani hutan dan masyarakat, terutama pada kelompok perhutanan sosial yang pada tahun 2023 berjumlah 296 kelompok tani hutan (KTH) dengan 38.898 orang anggota. 4. Pelibatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan, terutama terkait dengan HHBK dan Jasling a) Memastikan pendampingan dan pembinaan terhadap 470 desa yang berbatasan dengan kawasan hutan b) Fasilitasi bantuan sarpras pengolahan HHBK dan peningkatan sarpras di lokasi wisata c) Pembinaan dan monitoring KTH dan fasilitasi peningkatan kelas KTH d) Mengembangkan produksi HHBK yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi setempat dan permintaan kelompok masyarakat. Selain dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dalam rangka mendukung industrialisasi kehutanan. Berkembangnya industri kehutanan diharapkan akan dapat memastikan tersedianya pasar bagi produk-produk kehutanan yang dibudidayakan oleh masyarakat dan KPH 5. Pelibatan masyarakat sebagai tenaga pengamanan hutan Dalam rangka memastikan peran serta aktif masyarakat dalam mendukung perlindungan kawasan hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi NTB telah merekrut sebanyak 547 orang masyarakat sekitar kawasan sebagai tenaga pengamanan hutan. Selain sebagai tenaga pendukung untuk melaksanakan pengamanan hutan, upaya rekrutmen ini juga mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan karena seluruh yang direkrut mendapatkan kepastian penghasilan dengan standar mengikuti Upah Minimum Provinsi.



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
7.1 Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau andal dan modern.								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	%	87,78 (2018)	95	99,98	Dinas ESDM	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas ESDM	Kwh	579,05	721,9	437,72	Dinas ESDM	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS melalui Susenas	%	54,76	56,15	97	Dinas ESDM	

Keadaan dan Kecenderungan

Sampai Tahun 2023 Urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan target setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan

bahwa kondisi kelistrikan di Provinsi NTB saat ini semakin baik baik dari sisi penyediaan pembangkit, distribusi jaringan hingga kualitas listrik yang diikmati oleh masyarakat Peningkatan rasio elektrifikasi selama empat tahun terakhir juga dibarengi adanya pemerataan distribusi listrik yang lebih merata. Tercatat



sejak tahun 2018 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.138 desa/kelurahan mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber non PLN.

Sebanyak 5 (lima) desa yang mendapatkan listrik dari sumber non PLN berada pada Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanteh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa tersebut berada pada wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut. Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut.

Tantangan dan Pembelajaran

Rasio elektrifikasi sampai dengan Akhir Tahun 2023 masih terdapat 34 Dusun yang belum berlistrik PLN dengan jumlah Rumah Tangga 2.751. Sejak tahun 2012 s/d 2022 telah dilaksanakan penyambungan Listrik Murah dan Hemat bagi 31.853 RTS masyarakat tidak mampu baik melalui sumber APBN, APBD dan Sumber lainnya. Untuk Tahun 2022 melalui APBD telah disambung untuk 125 RTS di Pulau Lombok. Namun demikian kenyataannya di beberapa daerah masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik terutama masyarakat miskin dan daerah terpencil dan perbatasan di samping itu juga perhitungan rasio elektrifikasi sebagian besar mengandalkan dari data jumlah pelanggan PLN yang belum memperhatikan klasifikasi berdasarkan identitas pelanggan PLN. Sehingga perhitungan jumlah masyarakat yang

belum mendapatkan layanan listrik belum menggambarkan kondisi aktual dilapangan.

Hingga kini belum semua wilayah di Provinsi NTB sudah mencapai 100 persen tingkat elektrifikasi. Ada 5 daerah yang belum 100 persen menggunakan energi listrik PLN. Meskipun sebagian besar daerah di NTB hampir seluruh rumah tangganya dialiri dengan listrik PLN sebagai sumber penerangan, namun masih terdapat rumah tangga yang menggunakan penerangan non-listrik di beberapa daerah. Berikut daftar lengkapnya:

1. Lombok Barat: PLN 98,91 persen; listrik non-PLN 1,09 persen.
2. Lombok Utara: PLN 98,98 persen; listrik non-PLN 0,93 persen; penerangan non-listrik 0,09 persen.
3. Lombok Timur: PLN 99,58 persen; listrik non-PLN 0,24 persen; penerangan non-listrik 0,18 persen.
4. Bima: PLN 99,87 persen; penerangan non-listrik 0,13 persen.
5. Dompu: PLN 99,88 persen; penerangan non-listrik 0,12 persen.
6. Lombok Tengah: PLN 100 persen.
7. Sumbawa: PLN 100 persen.
8. Sumbawa Barat: PLN 100 persen.
9. Kota Mataram: PLN 100 persen.
10. Kota Bima: PLN 100 persen.

Kebijakan dan Strategi

Sebagai pelaksanaan dari kewajiban Pemerintah /Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan, Pemerintah /Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam usaha penyediaan dan penunjang tenaga listrik untuk mendorong perkembangan ketenagalistrikan daerah yang sehat, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menyediakan tenaga listrik yang andal, aman, berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Kebijakan energi yang diberlakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2007 tentang Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan

Sektor Ketenagalistrikan Daerah Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan tenaga listrik ; 2. Tersedia infrastruktur tenaga listrik yang mampu memaksimalkan akses masyarakat perdesaan sehingga pada tahun 2020 seluruh desa sudah berlistrik dengan rasio elektrifikasi sebesar 90 persen; 3. Terwujudnya bauran energi (energy mix) yang seimbang pada tahun 2020 yaitu peranan masing-masing sumber energi primer terhadap penyediaan tenaga listrik, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak sebagai energi primer, dengan komposisi sebagai berikut:

- bahan bakar minyak menjadi kurang dari 23 persen;
- penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) lebih dari 9 persen;
- batubara menjadi lebih dari 28 persen;
- energi terbarukan khususnya tenaga air dan panas bumi mencapai 38 persen;
- energi terbarukan lainnya yang meliputi angin, surya, dan biomassa 2 persen.

Saat ini pemanfaatan energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang didatangkan dari luar daerah. Di sisi lain, potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan air baik skala mikro atau pun minihidro banyak tersedia. namun pemanfaatannya masih belum optimal. Untuk mencapai target bauran energi dalam Kebijakan Energi Daerah, diperlukan kebijakan pendukung yang mengatur strategi dan rencana aksi yang diperlukan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tambahan pembangkit tenaga listrik di wilayah usaha PT PLN (Persero), Presiden telah mencanangkan Program Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW di luar pembangkit yang sedang dalam tahap konstruksi sekitar 7.000 MW.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, kapasitas pembangkit yang direncanakan di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2024 adalah 953 MW. Sebagian besar pembangkit yang akan dibangun adalah PLTU batubara. Untuk meminimalkan penggunaan BBM terutama waktu beban puncak, direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/ Pembangkit Listrik Mobile Gas (PLTMG)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dengan bahan bakar gas alam yang disimpan dalam bentuk CNG (compressed natural gas). Sebagaimana diketahui, sistem Lombok saat ini dalam kondisi tanpa cadangan yang cukup dan bahkan seringkali mengalami defisit. Adanya penambahan beban yang terus meningkat dan rencana COD (Commercial Operation Date) beberapa proyek pembangkit non-BBM mundur dari jadwal, maka dalam dua hingga tiga tahun kedepan sistem Lombok diperkirakan masih akan defisit. Untuk mengatasi kondisi tersebut, di sistem Lombok akan dipasang mobile power plant (MPP) 50 MW dengan teknologi dual fuel (High Speed Diesel dan Gas).

Pembangunan pembangkit PLTU batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/ Pembangkit Listrik Mobile Gas (PLTMG)/ Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), 38 panas bumi di beberapa lokasi akan diikuti dengan pembangunan transmisi untuk menyalurkan daya dari pembangkit ke pusat beban melalui gardu induk. Selama periode 2015 - 2024 akan dibangun transmisi 150 kV di Sistem Lombok dan transmisi 70 kV di pulau Sumbawa meliputi Sistem Sumbawa dan Sistem Bima. Untuk menghubungkan sistem 70 kV Sumbawa dengan Sistem 70 kV Bima yang berjarak sekitar 140 km, akan dibangun transmisi interkoneksi 150 kV. Selain itu, untuk menyalurkan daya dari pembangkit ke pusat beban di sistem 70 kV Sumbawa dan Bima, akan dibangun transmisi 150 kV. Dalam jangka panjang, yang akan dikembangkan di Pulau Sumbawa adalah sistem 150 kV.

Sesuai dengan proyeksi kebutuhan tenaga listrik di provinsi ini, direncanakan tambahan sambungan baru sampai dengan tahun 2025 sekitar 507.680 pelanggan. Tambahan sambungan ini juga untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Selaras dengan penambahan pelanggan tersebut, direncanakan pembangunan jaringan distribusi termasuk untuk listrik perdesaan, meliputi jaringan tegangan menengah 5.074 kms, jaringan tegangan rendah sekitar 4.072 kms dan tambahan kapasitas trafo distribusi sekitar 615 MVA. Adapun pengembangan jaringan distribusi ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	-1,09	1	1,58	Semua OPD	
8.1.1. (a)	PDB per kapita	BPS	Rupiah (ADH Berlaku)	25.008	37.115	18.648	Semua OPD	
8.2: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS melalui Sakernas	%	PM	PM	-0.042	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS melalui Sakernas	%	58.42 (2016)	59,14	59,65	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS melalui Sakernas	%	35,93	41,18	27,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	▲
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS melalui Sakernas	%	96,81	98,95	97,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, Dinas Pertanian dan Perkebunan	●
8.5 : Pada Tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS melalui Sakernas	Rupiah	10.628 (2016)	12.000	12.933	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	●
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	3,32	3,17	2,8	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	●
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS melalui Sakernas dan Sensus Penduduk	%	17,27	17,04	12,83	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	●
Target 8.6 Pada Tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS melalui Sakernas	%	19.53 (2016)	14	20,48	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	▲
8.9 : Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	orang	1.858.242	9.974.800	126.539	Dinas Pariwisata	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS melalui Susenas	orang	2.215.211	11.230.972	1.249.756	Dinas Pariwisata	▲
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Bank Indonesia	Milliar US \$	13,139	PM	2,07	Bank Indonesia	●
8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	BI/LKPBU, OJK, BPS	Bank/ATM	31/896 (2015)	PM	46/1.253	BI/OJK	●
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS/Statistik Potensi Desa (Podes)	Km	PM	PM	PM	BI/OJK	
8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak	BI/OJK	orang	PM	PM	9/016.438	BI/OJK	●

Keadaan dan Kecendrungan

Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan III-2023 mencapai Rp42,42 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp26,48 triliun. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2023



terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,80 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 49,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 73,09 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-



2023 terhadap Triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,58 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,00 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,08 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan I s/d III-2023 terhadap Triwulan I s/d III- 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran hampir semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,42 persen. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 177,05 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,39 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 2,80 persen, turun 0,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,89 juta orang, meningkat sebanyak 174,64 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,27 persen poin); Jasa Pendidikan (1,53 persen poin); dan

Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (0,82 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (3,73 persen poin); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,03 persen poin); serta Pertambangan dan Penggalian (0,40 persen poin). Pada Agustus 2023, sebanyak 801,31 ribu orang (27,70 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 3,05 persen poin dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (62,04 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 25,13 persen dan setengah penganggur 12,83 persen. Pembangunan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan perolehan devisa serta turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penduduk sekitar destinasi pariwisata. Meskipun target kunjungan wisata tidak terpenuhi pada tahun 2023, tetapi Provinsi NTB optimis dengan adanya pengembangan KEK Mandalika dan Kawasan samota yang terus berbenah.

Tingkat kunjungan wisatawan baik itu mancanegara maupun nusantara pariwisata akan berdampak pada hunian pada hotel Bintang, bulan November 2023 mengalami penurunan dibandingkan Bulan Oktober 2023. TPK Hotel Bintang Bulan November 2023 tercatat sebesar 40,32 persen, turun sebesar 5,59 poin dibandingkan TPK Bulan Oktober 2023 yang sebesar 45,91 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang Bulan November 2022 sebesar 42,42 persen, TPK Hotel Bintang November 2023 mengalami penurunan sebesar 2,10 poin. TPK Hotel Non Bintang Bulan November 2023 sebesar 22,30 persen, turun sebesar 4,13 poin dibanding TPK Bulan Oktober 2023 yang sebesar 26,43 persen. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Non Bintang Bulan November 2022 sebesar 19,85 persen, maka TPK November 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,45 poin. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Bintang pada Bulan November 2023 sebesar 1,89 hari dan

mengalami penurunan sebesar 0,09 hari dibandingkan RLM Bulan Oktober 2023 yang sebesar 1,98 hari. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada Bulan November 2023 selama 1,47 hari, mengalami penurunan sebesar 0,04 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Oktober 2023 yang sebesar 1,51 hari. Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang pada Bulan November 2023 tercatat sebanyak 82.775 orang yang terdiri dari 68.352 orang Tamu Dalam Negeri (82,58 persen) dan 14.423 orang Tamu Luar Negeri (17,42 persen).



Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 177,05 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 2,39 persen poin. Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 2,80 persen, turun 0,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,89 juta orang, meningkat sebanyak 174,64 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,27 persen poin); Jasa Pendidikan (1,53 persen poin); dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (0,82 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (3,73 persen poin); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,03 persen poin); serta Pertambangan dan Penggalan (0,40 persen poin). Pada Agustus 2023, sebanyak 801,31 ribu orang (27,70 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 3,05 persen poin dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (62,04 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 25,13 persen dan setengah penganggur 12,83 persen.

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB pada tahun 2023 Salah satunya dengan memperbanyak perhelatan atau kegiatan wisata. Kemudian memperbanyak promosi di luar daerah dan luar negeri, meningkatkan pelayanan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nama-nama even tahun 2023 : Lombok-Sumbawa travel mart, Mandalika surfing open championship, Pra-musim MotoGP, L'etape Tour de France, Internasional Surfing Series Mandalika, Lombok Writer Festival, Festival Bau Nyale, Festival Desa Wisata, Pesona Budaya Lombok Sumbawa Moto GP, Pesantren EXPO, Parade seni dan budaya Islam, NTB Great Sale, Gebyar Tambora, Tambora Challenge, Pacua Jara, MXGP Tambora/Moyo, Lakey Surfing Open Championship, Rinjani Worlds Musik, Geopark Rinjani Sport Tourism Festival, Gili Indah Begawe, Photography Contest, Senggigi-Pusuk Loop Challenge, Lombok Sharia Festival, HK Endurance Challenge, Festival Moyo, Mekiki Marathon, Maulid Adat Bayan, Maulid Senggigi, Festival Lasakosa, IATC & Worlds Superbike, Kite Surfing Kaliaantan-Jerowaru, mandalika Super Fest, Festival Taliwang/Lumpur, Kejuaraan paralayang Mantar KSB, Pemilihan Putri Indonesia, Lombok Sumbawa Tenun Festival, Jambore IMI, Sembalun KOM, Tasyakuran HUT NTB.

Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung oleh unsur amenities, aksesibilitas dan atraksi masih belum memadai sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan. Masih belum meratanya pengembangan pariwisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktivitas pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran Bersama dengan para pelaku pariwisata dan stakeholder pariwisata lainnya. Kualitas dan kapasitas sumber daya pariwisata yang didukung kelembagaan yang mandiri, sarana dan prasarana yang memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu upaya yang

terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya dimaksud melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi kompetensi. Perlunya fasilitasi dalam penyelenggaraan atraksi sebagai daya tarik pariwisata di lokasi-lokasi destinasi wisata sebagai upaya untuk menarik tingkat kunjungan serta untuk mengoptimalkan pemasaran industri kreatif. Investasi pada sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang kondusifnya iklim investasi, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta penyediaan informasi potensi kepariwisataan yang memadai. Kemitraan atau Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau Kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah. Adanya potensi penyelenggaraan event internasional dan nasional yang membutuhkan dukungan dalam rangka memperkuat kepariwisataan NTB dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

Kebijakan dan Strategi

Salah satu upaya pemerintah NTB untuk mengembangkan sector pariwisata adalah dengan ditetapkannya Penetapan Surat keputusan Gubernur nomor: 050.13-366 tahun 2019. Tentang pembentukan 99 Lokasi desa wisata di Provinsi NTB tahun 2019-2023. Sektor pariwisata di Provinsi NTB menjadi program prioritas dengan mengusung branding *Pesona Lombok Sumbawa* sebagai turunan dari program pusat dalam pembangunan pariwisata Indonesia yaitu "*Pesona Indonesia*". Memaksimalkan potensi budaya, alam serta karakter masyarakat yang religius merupakan modal yang kuat untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Gelar Destinasi Pariwisata Halal yang telah disandang Nusa Tenggara Barat, semakin memperkuat arah pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pembangunan pariwisata

dirasakan di daerah terus berkembang yang dirasakan oleh para pelaku dan pemangku kepentingan. Masyarakat secara perlahan menerima dampak positif pembangunan pariwisata terutama dalam hal kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.

Strategi pembangunan kepariwisataan di Provinsi NTB dilakukan melalui :
: Mengembangkan destinasi kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah;
Pengembangkan industri pariwisata yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Pengembangkan kelembagaan dan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan tata kelola destinasi yang nyaman dan aman, Mengembangkan promosi dengan menggunakan Teknologi digital sebagai respon dari tolls pemasaran pariwisata "*Low Budget High Impact*".

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kunjungan wisatawan tahun 2023 dengan melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi wisata secara bertahap, meningkatkan fasilitas pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi Nusa Tenggara Barat dan citra kawasan pariwisata daerah. Adapun even-even yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

No	Kalender Even	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
1	Festival Bau Nyale	10–11 Februari	Tanjung Aan Lombok Tengah
2	Lombok Sumbawa Fair	3 – 5 Maret	Mandalika International Street circuit

No	Kalender Even	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
3	WSBK Mandalika 2023	3 – 5 Maret	Mandalika International Street circuit
4	Pesona Khazanah Ramadhan	1 – 7 April	Islamic Center Kota Mataram
5	Main Jaran Sumbawa I	8 – 21 Mei	Penyaring, Sumbawa
6	L'etape Indonesia	28 Mei	Kuta, Lombok Tengah
7	Pacoa Jara (Dompur)	27 Mei – 4 Juni	Kabupaten Dompur
8	MXGP Samota	23-25 Juni	Samota Sumbawa
9	MXGP Lombok	1 – 2 Juli	Ex Bandara Selaparang
10	Lombok International Modest Fashion Festival	6 – 9 Juni	Sengigi, Lombok Barat
11	Pacoa Jara (Bima)	8 – 16 Juli	Panda, Kabupaten Bima
12	Sky Lanching	27 – 30 Juli	Lanching, Lombok Tengah
13	Pacoa Jara (Bima)	29 Juli – 6 Agustus	Lepadi, Kota Bima
14	Asian Road Racing championship	11 – 13 agustus	Mandalika
15	Sengigi sunset jazz	20 Agustus	Sengigi, Lombok Barat
16	Balap Jaran Lombok Tengah	19-27 Agustus	Sasake Lombok Tengah
17	Festival mutiara	24-29 Agustus	Kota mataram
18	UCI NTB Marthon Worls Chanpionship	26-27 Agustus	Pulau Moya Sumbawa
19	Pacuan Kuda (Lombok Timur)	9-17 September	Rambang Lombok Timur
20	Gili Festival	13-16 September	Gili Tramena
21	Ironman 70.3 Lombok	22-23 September	Sengigi Lombok Barat

No	Kalender Even	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
22	Worls Surf League Lakey	25-30 September	Lekey Dompu
23	MotoGP Mandalika 2023	13-15 Oktober	Mandalika
24	Perang Topat	20 – 30 November	Lingsar Lombok Barat
25	GFNY Lombok	26 November	Kuta Lombok Tengah
26	Main Jaran Sumbawa II	4 – 17 Desember	Penyaring, Sumbawa
27	Pesona Gumi Selaparang	21-27 Desember	Selong Lombok Timur

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: Prinsip pembangunan



kepariwisataan yang berkelanjutan, Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian

WSBK Mandalika



lingkungan, Dilaksanakan dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Adanya pengembangan KEK Mandalika memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 60% untuk tenaga kerja lokal dan 40% untuk tenaga kerja non lokal dan asing. Terlebih lagi pada bulan oktober tahun 2023 dilaksanakan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan tenaga kerja di sector-sektor pariwisata baik didalam maupun diluar kawasan KEK

Mandalika. Mandalika menjadi magnet pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat yang diharapkan memberikan dampak penguatan destinasi, peningkatan angka kunjungan wisatawan, penggunaan tenaga kerja serta pengembangan daya tarik pariwisata.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Termasuk



: Penataan 3 Gili KLU&Pulau-Pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &Tambora, Revitalisasi Islamic Centre), Program Pemasaran Pariwisata (Termasuk: Wisata Halal&Sehat), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota).



Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1	Jalan Mantap Provinsi	Dinas PU	%	-1,09	88	84,52 (2022)	Dinas PU	
	Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.	Dinas Perhubungan	orang			2.529.157	Dinas perhubungan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.	Dinas perhubungan	Ton			202.325		
9.1.2 (a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	9.1.2 (a)			3	Dinas Perhubungan	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Pelabuhan Penyeberangan	7	9	9	Dinas Perhubungan	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Pelabuhan	7	9	9	Dinas Perhubungan	
9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS : Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Makro dan Kecil	%	4.2 (2016)	4,7	4,77	Dinas Perindustrian	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	BPS	%	PM	PM	2,51	Dinas Perindustrian	
	Pertambahan nilai sector industry pengolahan	Dinas Perindustrian	Rp (Milyar)	-	166,39	6,43 T	Dinas Perindustrian	
Target 9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS, Dinas Perindustrian	%	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenangggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Komite Kebijakan KUR	Rp (Juta)	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian	
Target 9.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Dinas LHK	%	1,27	0,73		Dinas LHK	
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Bappeda	%	PM	PM	0,0017	Bappeda	
9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Bappeda	Orang	PM	PM	31	Bappeda	
9.C. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Informatika	
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS melalui Susenas	%	48	60	86,32	Dinas Komunikasi dan Informatika	
9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS melalui Susenas	%	21	50	63,20	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Keadaan dan Kecendrungan



Perekonomian Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan yang signifikan jika dilihat dari semua produksi lapangan usaha industri, penyedia akomodasi makan dan minum maupun konstruksi. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar

4,80 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 49,64 persen. Selanjutnya Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan I s/d III-2023 terhadap Triwulan I s/d III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,16 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada



Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran hampir semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,42 persen.

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan daya saing industri; meningkatkan kualifikasi IKM; dan meningkatkan pertumbuhan IKM. Peningkatan kualifikasi IKM merupakan upaya mendorong industri kecil yang telah ditumbuhkan oleh Kabupaten/Kota sebagai jembatan untuk menaikkan skala usaha industri menjadi skala industri menengah melalui kerjasama antara Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian di masing-masing Kabupaten/Kota dalam



menumbuhkan industri baru mutlak diperlukan. Selain itu, konsep industrialisasi yang mendorong pengolahan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk menjadi sasaran yang harus menjadi acuan perencanaan di Kabupaten/Kota. Seluruh potensi

lokal harus diolah dengan menggunakan permesinan sehingga dapat terstandarisasi dan diproduksi secara massal. Peningkatan skala produksi akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing produk pelaku industri. Peningkatan daya saing ini akan secara simultan mendorong meningkatnya nilai PDRB sektor industri terhadap PDRB NTB secara keseluruhan.

Perkembangan industri kreatif sebagai pendukung pariwisata belum maksimal seperti yang diharapkan dalam menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya yang tinggal di lingkaran destinasi. Adapun tantangan yang dihadapi adalah: a. Kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis masih rendah. b. Desain dan packaging kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar. c. Peluang pembiayaan IKM yang masih lemah karena belum memenuhi standar kelayakan kredit pembiayaan perbankan. d. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.(termasuk packaging produk). e. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk bersaing di pasar nasional. f. Masih rendahnya penggunaan sarana prasarana mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk



Kebijakan dan Strategi

Untuk mempersiapkan Industrialisasi Permesinan, sudah melakukan: Tenaga Kerja untuk mendukung permesinan sudah dilatih dalam rangka mempersiapkan tenaga ahli dibidangnya, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja dibidang permesinan, sebanyak 94 IKM, Memfasilitasi peralatan pengolahan pangan, sebanyak 222 IKM, Program inkubasi bisnis “sekolah wirausaha baru” selama 2 tahun, sebanyak 20 IKM, (sedang proses pembelajaran In 1), Program rintisan produksi mesin dan rintisan karoseri truck, dalam tahap pembelian material pabrikasi .

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua melalui pembangunan jalan provinsi, dermaga penyebrangan dan pelabuhan startegis Pemerintahan NTB periode 2019-2023 memprioritaskan program industrialisasi untuk lima tahun kedepan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam mendorong untuk meningkatkan jumlah industri di Provinsi NTB, dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi dan UKM, dimana dinas perindustrian sebagai lokomotif terbentuk dan berkembangnya di sektor Industri, baik Industri olahan maupun industri permesinan.

Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di NTB dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program

Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

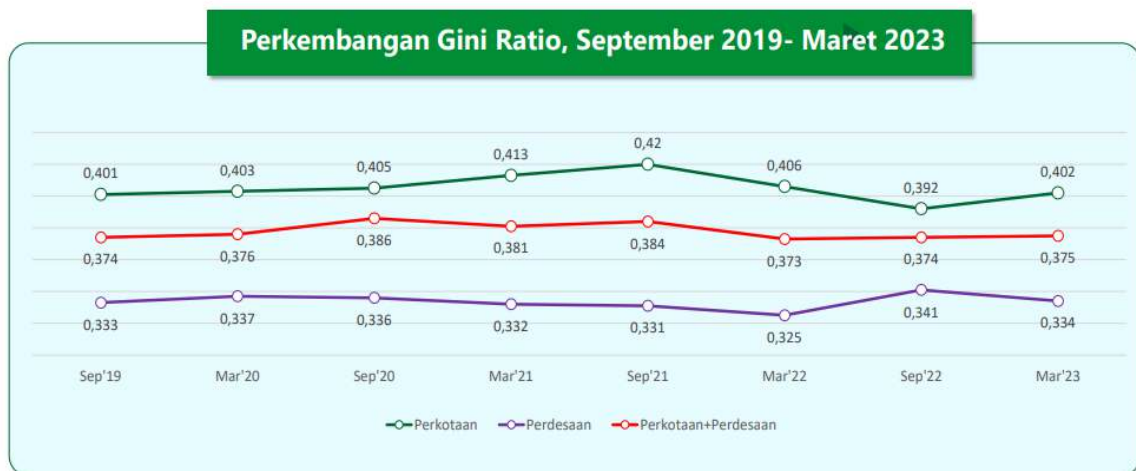


Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	%	0.371	0,362	0.375	Semua OPD	▲
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	%	14,75 (2018)	9,75	13,82	Semua OPD	▲
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	BPS : Potensi Desa (PODES)	Kabupaten	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	%	3.62 (2014)	-	0,69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	%	4.22 (2014)	-	24,68 (251 desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS melalui Susenas	%	PM	-	24,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Catatan Sipil	●
10.2 : Pada Tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS melalui Susenas	%	PM	PM	15,92 (2022)	Dinas Sosial	
10.3: Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakann dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan	BPS : IDI	%	79,40	94,29	76,75 (2022)	Bakesbangpold agri	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Kebijaka n	PM	PM	PM	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	
10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetara								
10.4.1.(b)	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	orang	68.832	105.196	616.370	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala								
10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	Dokume n	8	20	88	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi	

Keadaan dan Kecendrungan



Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,375. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,374 dan meningkat 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,373. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,402, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,392 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,341 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,325. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,34 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,21 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,91 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,60 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat

ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angka yang tercatat sebesar 17,58 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,00 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Tantangan dan Pembelajaran

DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK

Daerah	Susenas	Kelompok Penduduk			Gini Ratio
		40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Menengah	20% Berpengeluaran Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	Maret 2022	17,58	33,84	48,58	0,406
	September 2022	17,47	36,71	46,82	0,392
	Maret 2023	17,21	34,97	47,82	0,402
Perdesaan	Maret 2022	20,00	39,49	40,51	0,325
	September 2022	19,69	37,94	42,38	0,341
	Maret 2023	19,91	38,59	41,50	0,334
Perkotaan + Perdesaan	Maret 2022	18,60	36,26	45,14	0,373
	September 2022	18,30	36,56	45,14	0,374
	Maret 2023	18,34	36,31	45,36	0,375

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika

nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori: ketimpangan tinggi jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) antara 12-17 persen, ketimpangan rendah jika share pengeluaran (kelompok 40% terbawah) di atas 17 persen. NTB pada September 2022 Kelompok Penduduk sebesar 40 persen Berpengeluaran Rendah sebesar 18,30. Kelompok Penduduk 40 persen Berpengeluaran Menengah sebesar 36,56 dan Kelompok penduduk 20 persen Berpengeluaran Tinggi sebesar 45,14 sehingga tingkat ketimpangan NTB berada pada ketimpangan rendah.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,375. Angka ini meningkat 0,001 poin

jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,374 dan meningkat 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,373. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,402, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,392 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,341 dan naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,325. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,34 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,21 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,91 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga ada upaya yang sistematis untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB, disamping itu juga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus selalu diperbaharui sehingga sasaran penanggulangan bisa tepat. Untuk mengkondisi dan permasalahan kemiskinan di setiap wilayah sangat beragam dan spesifik, untuk itu butuh kebijakan dan strategi yg berbeda. Begitu juga kondisi keparahan kemiskinan dari setiap wilayah sangat beragam sehingga ada wilayah yang mendesak segera di tangani dan ada juga wilayah yang masih bisa ditunda penanganannya.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Mewujudkan NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu

pada pertanian, pariwisata dan industri. Industrialisasi merupakan kunci mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri. Indikatornya adalah pertumbuhan industri, dan sasarannya adalah mengembangkan industri olahan dan permesinan. Serta meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, diikuti kemudahan perizinan dan bermuara pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Industri yang dikembangkan, fokus pada industri olahan dan permesinan yang mendukung nilai tambah terhadap berbagai produk dari sektor Pertanian, pariwisata dan lapangan usaha industri lainnya. Misalnya mesin-mesin untuk sarana produksi pertanian, seperti traktor, alat angkut, mesin perontok, pengering, pabrik penggilingan dan industri pengolahan lainnya, harus diproduksi atau di assemble oleh putra-putri NTB di daerah sendiri. Dan sedapat mungkin dikurangi import dari luar. Di dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, telah ditetapkan 18 (delapan belas) Program unggulan Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri. Terdiri dari: (a) Melawan kemiskinan dari desa; (b) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggul; (c) E-Commerce; (d) Bumdes Maju; (e) Science Technology Industrial Park (STIP) Inovatif; (f) Koperasi Aktif; (g) Keluarga Sasambo Gemilang; (h) NTB ramah investasi; (i) UMKM Bersaing; (j) 99 Desa Wisata; (k) Perda Produk Lokal; (l) Rumah Kemasan; (m) Pertanian Lestari; (n) Kampung Unggas; (o) Revitalisasi BLK; (p) Apartemen Ikan; (q) KRPL; dan (s) Industrialisasi Produk Pertanian.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh TKPKD Provinsi NTB yang meliputi laporan rutin OPD pelaksana kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, pendataan oleh BPS, penelitian dan kajian kemiskinan daerah yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya, pemberitaan media massa, hasil koordinasi dengan TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB, dan laporan kelompok masyarakat. Tim TKPKD menyiapkan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Laporan hasil monitoring dan evaluasi juga memuat rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah untuk ditindaklanjuti.



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 11.1 : Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan								
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	%	96,52 (2016)	100	66,31	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR	Kawasa n perkota an metrop olitan	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang & Kota Baru	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubu ngan	%	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan	
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Dinas PU dan Perumah an Rakyat.	%	PM	PM	PM	Dinas PU dan Perumahan Rakyat.	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas PU dan Perumah an Rakyat.	Metrop olitan	PM	PM	PM	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif	Bappeda	institusi	PM	PM	90	Bappeda	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.							
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur	Lemba ga	11	11	NA	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	▲
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas PUPR	Kota	1	1	0	Dinas PU dan Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	▲
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	orang	8	2	7	BPBD	▲
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	%	PM	PM	100,15	BPBD	●
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Desa/ Kelurah an	5	4	3	BPBD	▲
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU dan	EWS	1	2	1	BPBD	▲

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggungjawab	Status
					Target	Realisasi		
		Perumahan Rakyat, Dinas ESDM.						
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rupiah	PM	PM	290 Milyar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	●
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LHK	%	39.72	70	49,64	Dinas LHK	▲
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas LHK, PU	Kota Hijau	PM	PM	PM	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK	
Target 11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PU dan Perumahan Rakyat, LHK	Kota	10	-	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Dinas Perkim dan LHK	●
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS melalui Susenas	%	12.87 (2016)	13.22	36,59		▲
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030								
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	90	100	80	BPBD	▲
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	%	2 (2015)	-	30	BPBD	●

Keadaan dan Kecendrungan

Di Provinsi NTB, sebagian besar rumah tangga mempunyai rumah milik sendiri sebesar 90,74 persen. Rumah tangga yang menempati rumah sewa/kontrak sebesar 1,33 persen, bebas sewa sebesar 7,65 persen, dan 0,28 persen menghuni rumah dinas/lainnya. rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri sebesar 87,06 persen untuk perkotaan dan 94,37 persen untuk perdesaan. Rumah tangga yang menempati rumah sewa/kontrak perkotaan (2,33 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan (0,34 persen). Rumah dengan status bebas sewa ditempati oleh 10,18 persen rumah tangga di wilayah perkotaan dan 5,16 persen rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga yang tinggal di rumah dinas atau lainnya sebanyak 0,42 persen di perkotaan dan 0,13 persen di wilayah perdesaan.

Kualitas rumah tinggal yang baik, layak, dan sehat akan mendukung kegiatan seluruh anggota rumah tangga di dalam rumah tersebut. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, kualitas fisik rumah tinggal cenderung akan semakin baik. Meskipun demikian, faktor pengetahuan dan lingkungan juga turut mempengaruhi kondisi ini. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022 yang tersebar di 7 kabupaten/kota telah mencapai 1189 unit yang tersebar di Kota mataram 55 unit, Lombok Barat 234 unit, Lombok Utara 20 unit, Lombok tengah 338 unit, Lombok Timur 367 unit, Sumbawa 60 unit, Kabupaten Bima 106 unit. Meskipun RTLH di Provinsi NTB berjumlah sebanyak 206 ribu unit, namun secara nasional posisi NTB sudah membaik yaitu di urutan ke 21. Dimana rata-rata Rumah Layak Huni (RLH) secara nasional 60,90 persen, sementara di NTB sudah berada di angka 62,90 persen. Atau dengan kata lain kondisi RLH NTB sudah di atas rata-rata nasional. Tahun 2023 penanganan RTLH dari DBH-CHT ini sekitar 250 unit.

Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, topografis dan sosiologis termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Dari 14 jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia, 11 diantaranya terjadi di Provinsi NTB. Secara geografis, Provinsi NTB terletak pada lempengan

bumi yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) sehingga rentan dengan gempa bumi. Begitu pula dengan kondisi klimatologis yang dapat menimbulkan cuaca ekstrim dan angin puting beliung. Dari segi kondisi topografis yang berbukit-bukit memberi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan target pembentukan Destana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB (RPJMD) adalah sebanyak 434 Desa/kelurahan. Keberadaan Desa Tangguh Bencana di Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 192 desa/kelurahan tersebar di sepuluh Kabupaten/Kota, dan enam puluh tujuh kecamatan. Pada indikator kinerja Persentase terbentuknya Destana dan SMAB pada tahun 2021 menjadi 25,48 dan 40,09 pada akhir periode RPJMD Tahun 2023, dimana sebelumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah desa dan jumlah sekolah atau madrasah. Begitu pula dengan indikator Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, dan Jitupasna dimana sebelumnya dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah-satu program unggulan dari pemerintah NTB.

Tantangan dan Pembelajaran

Pada kebijakan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan dan pengembangan perumahan akan diarahkan untuk menunjang pengembangan potensi dan pusat kegiatan yang ada di wilayah kota/kabupaten. Pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan untuk mendukung atau menunjang potensi wisata yang ada, menunjang keberadaan kawasan strategis Provinsi, menunjang fungsi perkotaan dan perdesaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang tersebar pada kawasan permukiman kumuh di kota/kabupaten. Untuk mempermudah informasi kondisi perumahan di NTB diperlukan sistem informasi manajemen secara online dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Perumahan. Sesuai Undang-undang Keterbukaan Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3 Poin d, Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan kebijakan

pemerintah yang baik, transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui kondisi perumahan secara pasti serta proses pengajuan usulan bantuan dapat efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sasaran bantuan tepat sasaran. Penyelenggaraan Sistem Informasi ini perlu didukung oleh semua pihak baik Pemerintah maupun para pelaku pembangunan serta masyarakat, sehingga Sistem Informasi ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

Tantangan terbesar dalam program Destana di NTB yang sudah berjalan selama ini, terutama terletak di (i) Lemahnya pembinaan Destana oleh instansi atau organisasi yang membentuknya. Destana hanya sampai tahapan pembentukan saja tanpa disertai proses pendampingan dan advokasi kebijakan di level desa untuk menjamin keberlanjutan Destana; (ii) Sinergisitas dan koordinasi antar instansi ataupun organisasi dalam pembentukan Destana, terlihat adanya lebih dari satu instansi/organisasi yang membentuk Destana di 1 desa yang sama; (iii) Belum adanya penilaian ketangguhan Destana yang sudah terbentuk; (iv) Kurangnya inovasi dan pelibatan unsur Akademisi dan Dunia Usaha dalam implementasi Destana, pembentukan Destana apabila mengacu pada 6 komponen Destana sesungguhnya bisa dikerjakan secara parsial melalui program Kuliah Kerja Nyata Universitas dan Program tanggung jawab social Perusahaan/Dunia Usaha; dan (v) Pembentukan Destana kadang mengabaikan ketangguhan Desa yang telah terbentuk melalui kearifan local dan modal sosial di desa.

Adapun Tantangan yang harus di selesaikan oleh Provinsi NTB adalah : Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di kabupaten/kota se NTB. Kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana masih kurang memadai. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan perumahan Provinsi NTB pada dokumen RPJP dan RPJMD Provinsi NTB, adalah menyediakan hunian yang layak huni bagi masyarakat yang dilengkapi dengan ketersediaan PSU yang memadai. Pada kebijakan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan dan pengembangan perumahan akan diarahkan untuk menunjang pengembangan potensi dan pusat kegiatan yang ada di wilayah kota/kabupaten. Pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan untuk mendukung atau menunjang potensi wisata yang ada, menunjang keberadaan kawasan strategis Provinsi, menunjang fungsi perkotaan dan perdesaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang tersebar pada kawasan permukiman kumuh di kota/kabupaten

Koordinasi pendataan dengan kabupaten/kota terkait updating data rumah tidak layak huni. Meningkatkan Anggaran Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Diperlukan pelibatan Kepala Desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Penanganan RLTH diantaranya melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota di NTB, pemanfaatan anggaran DBH-CHT, intervensi pembiayaan dari APBN, Dana Desa hingga penanganan rumah tak layak huni oleh Baznas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat salah satu program teknis yaitu Program Penanggulangan Bencana yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi NTB ke dalam tiga kegiatan serta beberapa sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2022 yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh bencana antara lain: 1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan

keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender dalam program. 2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin. 3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan. 4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat. 5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan kerentanan warga. 6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana. 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana. 8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan transfer risiko. 9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan. 10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi NTB. Melalui program Sejuta Rumah ini seluruh kabupaten/kota dapat. Kalau tahun ini kan hanya tiga kabupaten saja yang dapat yaitu Kabupaten Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat

Pelaksanaan pembangunan desa tangguh bencana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 2011 hingga 2022 tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber anggaran berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Non Government Organization (NGO). APBD bisa berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berasal dari perangkat daerah terkait seperti BPBD NTB, BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NTB, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan NGO berasal dari Islamic Relief, Palang Merah Indonesia (PMI), PSP, Muslim Aid, Yayasan Skala, Konsepsi, Beruqaq Desa, Samawa Center, World Relief, dan Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER). Dalam hal pengurangan resiko bencana maka upaya yang dilakukan adalah dengan Pembinaan dan pelatihan personil teknis secara proporsional, Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan memaksimalkan peran Forum PRB sebagai wadah koordinasi lintas sector serta Diseminasi Pengurangan Risiko Bencana dalam peningkatan fungsi lingkungan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program Destana, maka perlu dibentuk kelembagaan seperti forum Pengurangan Risiko Bencana dan atau Tim Siaga Bencana Desa. Kelembagaan ini adalah organisasi yang mengawal kebijakan dan penganggaran di tingkat desa untuk berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Pembentukan kelembagaan menjadi tolok ukur adanya keberlanjutan dari program Destana. Dalam menjamin keberlanjutan DESTANA, beberapa peluang yang dapat dioptimalkan adalah: 1. Mendorong kelembagaan Relawan TSBD untuk bertransformasi menjadi lembaga sosial desa dan memainkan peran strategis sebagai katalisator agenda PB dan PRB di level desa; 2. Pemanfaatan Bidang 5 dalam nomenklatur keuangan desa memberi ruang besar bagi penguatan dan keberlanjutan destana; 3. Pelibatan aktor kunci pembangunan desa mulai BPBD, Tim Pendamping Profesional, dan Tim Pendamping Desa menjadikan DESTANA sebagai model yang diinternalisasikan dalam agenda pembangunan desa.



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 12.1: Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.								
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Kolaborasi tematik	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 12.2 : Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.								
12.2.1	Jejak material (material footprint).terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER		PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 12.3 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.								
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan	%	PM	PM	PM	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan	
Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Dinas LHK : Laporan Tahunan PROPER	Peserta Proper	14	14	20	Dinas LHK	
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LHK	Ton	1226	2.171	24802.13	Dinas LHK	
Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali (3R)								
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Dinas LHK	%	6,75	30	15.65	Dinas LHK	
Target 12.6 : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LHK	Perusahaan	PM	PM	PM	Dinas LHK	
12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan								
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LHK	Fasilitas Publik	PM	PM	PM	Dinas LHK	

Keadaan dan Kecendrungan

Berdasarkan data tahun 2023, timbunan sampah NTB mencapai 3.388 ton per hari yang terdiri dari 641,92 ton diangkut ke TPA atau 18,95% yang ditangani dengan baik, 51,21 ton di daur ulang atau 1,51% berhasil di kurangi dari 2.695 ton atau 79,55% tidak tertangani atau berserakan Dimana-mana yang tidak mampu terangkut sarana prasarana yang tersedia, tertumpuk di sekitar permukiman, di lahan-lahan kosong, di pinggir-pinggir jalan bahkan di sekitar daerah aliran sungai yang akhirnya terbawa air sungai menuju ke laut. Penanganan selama 4 tahun ini yaitu memaksimalkan operasional TPA sebagai upaya penanganan utama permasalahan sampah. Dibanding tahun 2019 timbunan sampah di NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% ditahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton. Namun target Pengurangan sampah masih jauh dari harapan.

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya pengelolaan sampah dilaksanakan melalui program penanganan sampah dan pengurangan sampah. Kondisi pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik di Provinsi NTB menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2019 – 2023 mencoba merencanakan akselerasi pencapaian target neraca pengelolaan sampah 2 (dua) tahun lebih maju dari target nasional yaitu 30% pengurangan dan 70% penanganan di tahun 2023. Terdapat beberapa permasalahan penanganan sampah, terutama pada TPA Kebon Kongok

yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung peningkatan volume sampah. Permasalahan pembuangan limbah menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk, bendung, laut, dan juga tempat-tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat NTB. Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi NTB adalah Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa, Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan sampah, Skema pengurangan sampah berbasis desa, sedangkan saat ini Pemdes masih fokus BTT untuk stimulus ekonomi dan Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya reduce, reuse, recycle).

Tingginya persentase sampah yang tidak terkelola disebabkan karena NTB lebih banyak fokus pada kegiatan penanganan, utamanya pemrosesan akhir. Berdasarkan terminologi pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan di mulai dari pemilahan, pewadahan, pemindahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan hanya dalam bentuk penanganan, perlu untuk meningkatkan efektifitas pengurangan sampah di NTB. Kegiatan pengurangan adalah pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali.

Kebijakan dan Strategi

Sejak tahun 2019, pemerintah Provinsi NTB mencanangkan “NTB Zero Waste” sebagai program unggulan Provinsi NTB. Harapannya, program ini menjadi model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumberdaya. NTB Zero Waste merupakan penerapan konsep pengelolaan

sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkular (circular economy).

Untuk melegitimasi Program Zero Waste, pemerintah provinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah No 5 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai pendukungnya juga diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah tangga. disamping itu di keluarkannya Peraturan Gubernur no.14 tahun 2020 tentang kebijakan dan strategi Daerah (jakstrada) pengelolaan Sampah.

Melalui kebijakan dan Program Zero Waste, Bank Sampah, TPS 3R, TPST, Kelompok Swadaya Masyarakat pengelola sampah, dan Komunitas memiliki peran besar dalam proses pengurangan sampah. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan penanganan persampahan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan beberapa TPA regional dan TPST di beberapa kabupaten/kota.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Sebagai langkah akselerasi dan realisasi, pemerintah Provinsi NTB melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan beberapa pihak termasuk Kabupaten/Kota, di antaranya: 1. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia) 2. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah menuju NTB Zero Waste Province 2023 3. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah dari Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk ke Bank Sampah Induk Regional 4. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang kerjasama pengelolaan sampah dari bank sampah unit dan bank sampah induk ke bank sampah induk regional 5. MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Sekolah Tinggi Teknik PLN tentang Pengolahan Sampah menjadi Sumber Energi.



Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRB) tingkat nasional dan daerah..	BPBD	Dokume n	2 (2015)	PM	3	BPBD	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	8	2	7	BPBD	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	Dokume n	PM	PM	PM	BPBD	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	DLHK	ton	PM	PM	8,270,931 .84	DLHK	
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	DLHK	ton	PM	PM	148.883, 27	DLHK	
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	DLHK	ton	PM	PM	1.919.15 7,77	DLHK	
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLHK	Lembag a	PM	PM	2	DLHK	

Keadaan dan Kecendrungan

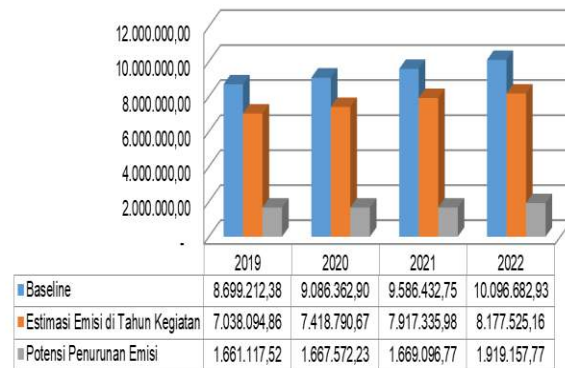
Pemprov NTB telah berkomitmen mencapai pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Salah satunya dengan mewujudkan NTB yang asri dan lestari dengan berbagai program yang selama ini digesa, misalnya NTB Zero Waste. melalui program NTB Zero Waste, sebagaimana yang tertuang dalam

RPJMD NTB tahun 2019-2023, NTB menetapkan target pengelolaan sampah 100% lebih cepat dua tahun daripada yang telah ditetapkan dalam Jakstrada dan Jakstranas. Walaupun dalam realisasinya belum mencapai target, namun dari tahun ke tahun, capaian realisasi neraca persampahan terus mengalami peningkatan. Perubahan iklim saat ini sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas. Saat musim hujan tiba, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana selalu khawatir akan terjadinya bencana banjir lantaran curah hujan yang sering tinggi dan disertai dengan angin kencang. Sementara di musim panas, cuaca yang dirasakan oleh masyarakat sering mengganggu aktivitas. Tren peningkatan suhu udara $0,5^{\circ}\text{C}$ pada tahun 2030, Curah hujan pada musim kemarau diproyeksikan semakin berkurang sekitar 20% dari kondisi saat ini. Peningkatan nilai suhu rata-rata tahunan sebesar $0.9 - 1.1^{\circ}\text{C}$ di wilayah NTB, Kenaikan suhu udara minimum rata-rata tahun 2001 - 2010 sebesar 0.7°C , tertinggi 1.4°C di tahun 2010. Proyeksi peningkatan nilai suhu minimum tahunan di tahun 2020-2049 sebesar $2.3 - 2.7^{\circ}\text{C}$ di wilayah NTB.

Tantangan dan Pembelajaran

Efek perubahan iklim global yang berdampak terhadap sumber daya air di wilayah NTB : Pola curah hujan mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi

Data Penurunan Emisi NTB



secara tepat waktunya, Peningkatan intensitas kejadian bencana banjir, kekeringan, badai dan tanah longsor, Pengurangan jumlah mata air di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 750 buah pada Tahun 1980 menjadi sekitar 300 buah pada Tahun 2006, Meningkatnya percepatan sedimentasi pada sarana dan prasarana sumber daya air seperti embung, waduk dan saluran irigasi.

Kebijakan dan Strategi

NTB turut mendorong target pengurangan emisi karbon nasional yang telah disepakati dalam Paris Agreement, yaitu 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk itu, paling tidak terdapat tujuh program pembangunan lingkungan di NTB yaitu NTB Zero Waste, NTB Hijau, Mencapai IKLH, Hutan Tanaman Energi, Waste To Energy, Net Zero Emission, dan Ekonomi Hijau. Untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama, salah satunya dari mitra pembangunan. Pemerintah Daerah NTB telah mengeluarkan banyak kebijakan, antara lain Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca. Selanjutnya Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2018 tentang RAD SDGs Tahun 2019 – 2023. Ada juga Peraturan Gubernur Tahun 2019 Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. “NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTB.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Ekonomi Hijau merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam ujanya. Sementara itu terkait pengembangan Hutan Tanaman Energi, program ini akan dilaksanakan di Kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di wilayah Balai KPH di NTB. Dengan jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan cepat seperti lamtoro, komoditi ini akan mensubstitusi batubara sebagai bahan bakar. Berkolaborasi dengan PLN, kegiatan ini akan melibatkan

masyarakat sekitar hutan. Telah di susun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Provinsi Nusa Tenggara Barat. RAD-API menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta *pelaku* usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.								
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP (data RZWP3K)	Ha	225.965,32	905.915	143.710,91	Dinas kelautan dan Perikanan	
Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	%	98	100	100	Dinas kelautan dan Perikanan	
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Orang	17794	29.319	39.316	Dinas kelautan dan Perikanan	

Keadaan dan Kecendrungan

Ekosistem lautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem mangrove yang menjadi satu kesatuan dalam system ekologi perairan laut. Mengingat fungsi dan perannya sangat strategis maka beberapa kawasan di perairan laut NTB telah ditetapkan sebagai kawasan

konservasi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah provinsi NTB dengan luasan pada tahun 2022 jumlah luas Kawasan konservasi perairan NTB mencapai 143.710,91 ha dan tahun 2023 mencapai 143.710,91 tidak ada peningkatan luas Kawasan konservasi sebesar sehingga penetapan sebagian luasan perairan tersebut tidak menghambat aktivitas kegiatan usaha disebagian besar perairan laut NTB. Hal ini terlihat dari kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan di tahun 2023 target 100% tercapai 100% Sedangkan terkait dengan indikator jumlah nelayan terlindungi atau terfasilitasi dengan asuransi pada tahun 2023 sebanyak 39.316 orang.

Tantangan dan Pembelajaran

Pengelolaan ekosistem lautan sangat ditentukan sejauh mana komitmen semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya alam di laut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan pola pemanfaatan lestari yang senantiasa memperhatikan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi mendatang. Pola pelestarian atau dikenal dengan istilah konservasi pada sebagian perairan laut tentu akan menimbulkan pro dan kontra antar pihak yang berkepentingan. Misalnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha merasa dibatasi menggunakan ruang laut. Namun sebaliknya pemerintah berhak melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan laut guna memastikan tidak terjadi over eksploitasi yang melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga pada suatu saat perairan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dapat menjadi kawasan **Bank Ikan** yang pada akhirnya berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan nelayan dan menjaga keberlangsungan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan dan Strategi

Guna mewujudkan ekosistem lautan yang lestari di Provinsi NTB salah satunya adalah memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui penguatan regulasi yang mengatur tata kelola pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya

pesisir dan lautan. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi NTB sudah memiliki peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037 serta Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai salah satu instrument untuk mengatur pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut di NTB. Namun untuk memastikan aspek ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan perlu didorong terbitnya peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembinaan dan pengawasan yang merupakan salah satu amanat Perda 12 Tahun 2017 tersebut. Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Guna mendorong terwujudnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan 14 ekosistem lautan adalah memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, mendorong terbitnya Pergub tentang kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta memfasilitasi perluasan pelayanan asuransi nelayan dan juga mendorong peningkatan investasi usaha sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	4,87 (2018)	5,64	43.58	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global..								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas LHK	Ha	-	-	1	BKSDA NTB	
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas LHK	Ha	PM	PM	402,11	Dinas LHK	
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas LHK	KPH	11	15	15	Dinas LHK	
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.pasar.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LHK	%	0,142 (2018)	0,165	0,330	Dinas LHK	

Keadaan dan Kecenderungan

Indeks kualitas tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, mencapai nilai 66,60 poin untuk tahun 2023. Nilai ini belum mencapai target yang telah dicanangkan yaitu 69,70 poin, meskipun naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,99 poin. Perhitungan IKTL yang dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan metode perhitungan yang telah menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Capaian IKTL yang belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD disebabkan masih



maraknya gangguan keamanan hutan (perambahan dan illegal logging) serta keterbatasan anggaran untuk penanaman lahan kritis yang meningkat luasannya berdasarkan data lahan kritis tahun 2022. Namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB bersama pihak-pihak terkait lainnya (BPDAS-HL Dodokan Moyosari, BUMN, swasta, organisasi, pelajar/mahasiswa, dan perorangan) tetap berupaya melakukan rehabilitasi dan penghijauan serta penyediaan bibit berkualitas melalui persemaian, kebun bibit rakyat dan bibit produktif yang secara keseluruhan seluas 6.489,27 hektar. Upaya-upaya ini terlaksana berkat dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN serta hibah.

Tantangan dan Pembelajaran

Untuk mewujudkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang mengembangkan inisiatif Provinsi Hijau, diperlukan analisis yang utuh terhadap semua komponen permasalahan yang terkait dengan degradasi hutan, lahan dan lingkungan. Sehingga elaborasi komprehensif dari masing-masing faktor penguat/penyebab permasalahan tersebut dapat dirumuskan alternatif pengurangan dampak dan solusi penanganan melalui intervensi program pembangunan baik yang bersifat governmental driven initiative maupun kontribusi dan entitas eksternal pemerintah. Formulasi intervensi ini tentunya harus mendapat dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, masyarakat, mitra pembangunan dan swasta. Untuk mendukung hal tersebut, skema insentif fiskal perlu dikembangkan sebagai bentuk pembiayaan/anggaran yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB. Masih dijumpai terjadinya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk menekan tindak pidana kehutanan tersebut Dinas LHK melakukan operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan di areal hutan seluas 129.250 hektar.

Kebijakan dan Strategi

Upaya perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Operasi pengamanan hutan dilaksanakan dengan melibatkan para pihak seperti aparat desa, TNI/Polri untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dilakukan juga upaya koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Dari sisi legalitas, Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020 perihal Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan dapat mengatasi kondisi darurat illegal logging, menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus mata rantai peredaran kayu ilegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Selain instruksi Gubernur, pengelolaan hutan NTB telah diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk : 1) mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial, 2) mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, dan 4) menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah kerusakan kawasan hutan

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya untuk menurunkan lahan kritis di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. Pada tahun 2023, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dilaksanakan melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 6.489,27 hektar dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Jenis kegiatannya antara lain meliputi rehabilitasi vegetatif, kebun bibit rakyat, persemaian permanen, bibit produktif, serta rehabilitasi dari perorangan, organisasi, pelajar/mahasiswa, BUMN, swasta dan hibah.

Upaya pengamanan hutan dan mempertahankan tutupan lahan baik yang dilakukan oleh tenaga pengamanan hutan dan penyuluh kehutanan pada Dinas LHK dan UPT Kementerian LHK yang ada di wilayah Provinsi NTB. Tercatat sebanyak 880 orang tenaga kehutanan yang diasumsikan mampu mempertahankan wilayah 500 ha per orangnya, sehingga luasan kawasan hutan yang terlindungi ialah seluas 440.000 ha atau 41% dari luas kawasan hutan keseluruhan.



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenganggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian	Kasus	20	8	8	Kepolisian	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian	orang	14	PM	0	Kepolisian	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS :	%	15 (2016)	0,85	0,03	Kepolisian	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	kepolisian	orang	5.466.688	6.436.147	NA	Kepolisian	
Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS : Susenas (Modul Ketahanan Sosial)	%	PM	PM	NA	Kepolsian	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak Perempuan	Kepolisian	Anak	391	200	165	Kepolisian	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Kepolisian	orang	19	13	176	Kepolisian	
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM	NA	Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB	
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	MA	Perkara	PM	500	611	Pengadilan Tinggi Provinsi NTB	
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	%	PM	PM	PM	Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan NTB	
Target 16.5 : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	indeks	PM	PM	PM	KPK NTB	
Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BPKAD	%	PM	PM	PM	BPKAD	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	BPK	%	PM	PM	PM	BPK	

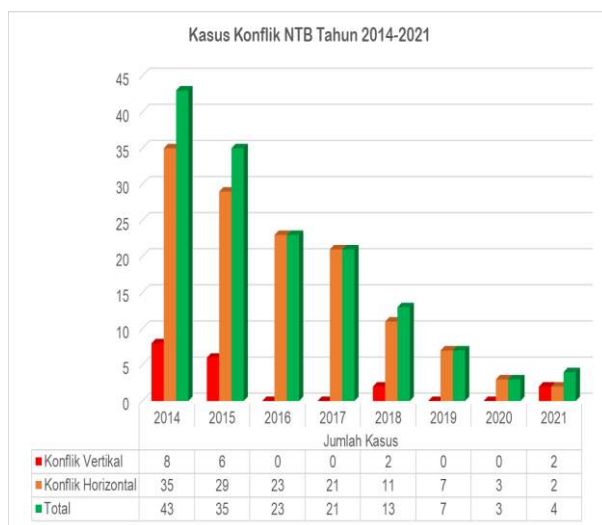
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).							
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Inspektorat	%	PM	PM	73,48	Insektorat	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BPKAD, LPSE	%	PM	PM	70	BPKAD, LPSE	
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Biro organisasi	%	BB	BB	70,36	Biro organisasi	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	PM	PM	80.71	Ombudsman RI	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di	KPU	%	10 (2014)	PM	18,18 (2019)	KPU	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)							
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi NTB).	KPU	%	9,23 (2014)	PM	1,54 (2019)	KPU	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	13,04	17	17,02	BKD	●
16.7.2.(a)	Aspek Kebebasan	BPS : IDI	%	93,98	78	76,75 (2022)	Bakesbangpolda gri	▲
16.7.2.(b)	Aspek kesetaraan	BPS : IDI	%	79,40	94,29	77,24 (2022)	Bakesbangpolda gri	▲
16.7.2.(c)	Aspek kapasitas Lembaga Demokrasi	BPS : IDI	%	62,08	64,18	65,44 (2022)	Bakesbangpolda gri	●
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	58,39	72	97,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	●
16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0- 17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota di Provinsi NTB	BPS : Susenas	%	74,66	83,9	98,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	●
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan	Komisi Nasiona	Berkas Pengadu	PM	PM	29	Komisi Nasional HAM Perwakilan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
	pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	I HAM	an				NTB	
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komnas Perempuan	%	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	50	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	PM	PM	15,79	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan/Dokumen	PM	PM	PM	Komisi Nasional Perempuan Perwakilan NTB	

Keadaan dan Kecenderungan



Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang heterogen yaitu dengan adanya berbagai agama, suku dan budaya yang merupakan wujud plurarisme yang secara kultur mempunyai ciri khas masing-masing, akan tetapi perbedaan itu merupakan wujud kekayaan yang perlu dipertahankan dalam kerangka persatuan dan kesatuan, bahwa

sektor ekonomi menjadikan suatu masalah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan tingginya kemiskinan yang berdampak kepada tingkat kriminalitas dan instabilitas sosial, ekonomi maupun masyarakat. Pembangunan sektor ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelanggaran hukum.

Konflik horizontal yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat diantaranya, perkelahian antar remaja kampung, antar suku dan agama. Konflik ini timbul disebabkan komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan baik kepentingan perorangan dan kelompok, ketidak puasaan dan kurangnya keterbukaan kedua belah pihak.

Jumlah konflik sosial adalah indikator yang dapat mencerminkan situasi dan kondisi keamanan di daerah. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Provinsi NTB dalam 3 tahun terakhir berhasil menurunkan angka konflik sosial, dari 7 kasus pada tahun 2019 menjadi 3 kasus pada tahun 2020 dan 4 kasus pada tahun 2021.

Indeks kriminalitas dipengaruhi oleh seberapa banyak kasus kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun yaitu kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik dengan kekerasan, kejahatan terhadap barang/hak milik tanpa kekerasan dan kekerasan narkoba. NTB menargetkan pada Tahun 2022 adalah 14,05 dengan capaian yang diharapkan di Tahun 2023 adalah 13,25. Dalam mewujudkan kondusivitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1380 kasus atau 20%. Penurunan kasus kriminalitas berimplikasi pada penurunan indeks kriminalitas dari 13,09 poin pada tahun 2020 menurun menjadi 10,67 poin pada tahun 2021. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap

Adapun untuk keterwakilan perempuan NTB menduduki keterwakilan terendah di Indonesia, dengan prosentase perwakilan hanya 1,54% pada tahun 2019 atau berdasarkan hasil perolehan suara calon legislatif perempuan pada

pemilu 2019. Pada Tahun 2014-2109 perwakilan jumlah perempuan sebagai anggota berjumlah 6 orang.

Tantangan dan Pembelajaran

Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu juga belum dibuatnya peraturan tertulis berupa Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga ada pengendalian dalam menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak merugikan masyarakat lainnya.

Hasil Pemilihan Legeslatif 2019 DPRD Provinsi NTB terdapat data di KPU bahwa hasil rekapitulasi dari daftar calon tetap (DCT) sebanyak 914 orang, 563 diantaranya laki-laki dan 351 perempuan atau sebanyak 38,40%. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD provinsi NTB disebabkan stigma masyarakat bahwa politik adalah dunia laki-laki, sistem dan struktur sosial patriarki dianggap menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan yang terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum bersungguh-sungguh terhadap perempuan, serta faktor logistik calon legislatif perempuan sebagai modal utama maju dalam kontestasi masihlah belum mencukupi kebutuhan biaya politik.

Kebijakan dan Strategi

Melakukan mediasi antar warga kampung yang berkonflik maupun yang berpotensi terjadinya konflik terutama di daerah-daerah yang dipetakan rawan konflik. Selanjutnya BPSDM dalam RPJMD Tahun 2019-2023 menetapkan program pendukung utama untuk pencapaian Sasaran Penataan Sistem Manajemen SDM dengan indikator Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan hukum agar tercapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena

ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan utama dalam menjamin kehidupan yang nyaman dan tentram.

Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan merupakan salah satu strategi dari Pemerintah Daerah NTB untuk melindungi anak dari berbagai macam kekerasan yang terjadi.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditegakkan adalah dengan penegakan Perda/Pergub serta Perlindungan Masyarakat. Penegakan Perda/Pergub kegiatannya masih sangat terbatas, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain: a. Meningkatkan pembinaan masyarakat agar dapat mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu dengan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya yang terkait, diantaranya dengan membentuk sekretariat PPNS di Satpol PP Prov. NTB sehingga memberikan peran kepada PPNS dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Upaya lain untuk meredam dan meminimalisir potensi konflik adalah: Mengoptimalkan peran Mitra Kerja Bakesbangpoldagri seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jejaring, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk mendeteksi dan cegah dini setiap potensi konflik yang ada di lapangan, Melakukan koordinasi yang intensif dengan semua Kesbangpol seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mencegah lebih dini potensi konflik maupun untuk mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi.



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/PenanggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
Target 17.1 : Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	%	1,21	1,42	-	BAPPENDA	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB.	Bappenda	%	0,95 (2018)	1,04	1.02	BAPPENDA	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 12 bulan terakhir.	Bappenda	%	24,40	36,64	39,51	BAPPENDA	
Target 17.3 : Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.								
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BNP2TKI, BI	US\$	12.556,94	5.900,49	31.419,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi, BI	
Target 17.6 : Meningkatkan kerjasama Utara-selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	BPS	%	PM	PM	4,44	Dinas Pekerjaan Umum	
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di	BPS, Dinas Perhubungan	%	PM	PM	52	Kominfo	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Pena nggungJawab	Status
					Target	Realisasi		
	Perkotaan dan di Perdesaan.							
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Perhubun gan	%	PM	PM	39,16 (2019)	Telkom	●
Target 17.8 : Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS : Susenas	%	22,64	50	63,2	Dinas Komunikasi dan Informatika	●
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunika si dan Informatik a	%	PM	PM	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	●
Target 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, selatan-selatan dan Triangular.								
17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia	Bappeda	Rupiah	PM	PM	PM	Bappeda	
Target 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	-96,33 (2016)	11	-11,56	Dinas perdagangan	▲
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubun	Dokum en	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPSTSP	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
		gan, Dinas ESDM, DPMPTSP						
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	Dokumen	PM	PM	PM	Biro Ekonomi, BPKAD, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, DPMPTSP	
Target 17.18: pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan tepat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	34	45	N.A	BPS, OPD sumber data	
17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	BPS	Strategi Daerah	PM	PM	NA	Bappeda	
Target 17.19: Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	BPS	Sensus Penduduk	PM	PM	ya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline 2017	Tahun 2023		Pelaksana/Penanggung Jawab	Status
					Target	Realisasi		
							Perumahan dan Pemukiman Rakyat	
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS	Data registrasi	PM	PM	NA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Pengunjung	507,744	130.834	201.211	Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, Biro Umum	
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	98	99	100	BPS	
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	BPS	%	6,03 (2016)	24,5	26,5	BPS	

Keadaan dan Kecendrungan

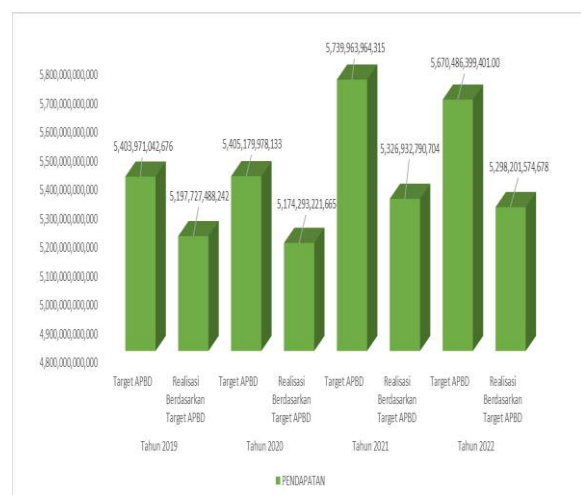


Pada tahun 2022 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB sebesar 1,465 atau masuk dalam kategori “Rendah”. Sedangkan pada tahun 2021, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB sebesar 0,408 dan masih dalam katagori rendah. Terdapat perubahan rentang katagori IKF tahun 2021 dan 2022 dimana

pada tahun 2022 sesuai dengan PMK no.193/PMK.7/2022 katagori IKF $1,442 \leq 1,756$ masih dalam katagori rendah. Prosentase kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 1,20 pada tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 1,12 terjadi peningkatan sebesar sebesar 0,08 persen. Lebih dirinci, Pertumbuhan pajak daerah tahun 2022 Adalah sebesar 74,58% atau terealisasi Rp. 1.706.111.440.816,-.

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2020-2021 ini penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemic covid-19, dimana sebagian besar asset dan potensi penerimaan PAD mengalami penurunan yang mengakibatkan penerimaan PAD tidak dapat optimal seperti yang direncanakan. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang



dipisahkan tahun 2021 menurun sampai dengan 21,31% dari periode yang sama tahun 2020 akibat menurunnya deviden hampir semua BUMD.

Kebijakan dan Strategi

Program pendukung untuk mencapai indikator ini yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Melakukan dengan peningkatan kualitas layanan yang inovatif dan modern, yaitu e-Pendapatan (sudah termasuk e- Samsat dan Samsat Delivery) yang dihayatkan untuk mendekatkan pelayanan Bappenda kepada masyarakat wajib pajak, sekaligus untuk menunjang optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah. diantara layanan pembayaran pajak daerah (e-Samsat), layanan jemput antar pembayaran PKB (Samsat Delivery), serta layanan penyetoran retribusi daerah (e-STs Retribusi). Untuk itulah Bappenda Provinsi NTB mengintegrasikannya ke dalam aplikasi e-Pendapatan merupakan program digitalisasi pendapatan daerah yang mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) guna menghasilkan pengelolaan pendapatan yang akurat, kuat, responsif, efektif dan efisien.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan yang dilakukan adalah; Menambah jam layanan yakni Samsat Night Music setiap sabtu malam yang beroperasi didepan kantor Bappenda Provinsi NTB (jalan Majapahit) dengan menghadirkan music dan penyanyi yang menghibur masyarakat/Wajib Pajak serta pemberian Door Price, Memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan OPD yang potensial dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD, Melakukan koordinasi dengan BPKAD, Bank NTB dan Instansi terkait lainnya untuk memantapkan e-sts Online Retribusi.

BAB III

PEMBELAJARAN TPB/SDGS

Tujuan Dalam SDGs	: Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
Nama Instansi	: LPA NTB bekerjasama dengan UNICEF untuk Program Child protection emergency and recovery-reconstruction interventions in Lombok Islan
Nama Program	: Integrated Farming System
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Lombok Tengah
Waktu Kegiatan	: Mulai 22 Januari 2021 sampai saat ini

Proses Pelaksanaan

Daerah Irigasi Gde Bongoh merupakan salah satu daerah irigasi kewenangan Provinsi yang Berada di Kabupaten Lombok Tengah, dimana lokasinya berada di daerah hulu dengan kecenderungan ketersediaan air banyak tapi permasalahan yang terjadi adanya konflik air dan produktivitas tanam yang tidak maksimal.



Tujuan dan Sasaran

-

- Meningkatkan Pendapatan petani melalui peningkatan produktifitas komoditas pertanian serta mutu/kualitas produk pertanian.

- b. Meningkatkan potensi pertanian melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan Sumber daya Air.
- c. Menghindari ketergantungan terhadap ketersediaan pupuk buatan guna menunjang penerapan pertanian ramah lingkungan.
- d. Mengelola air irigasi secara hemat sehingga tepat guna dan berhasil guna
- e. Menumbuhkembangkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan Pemberdayaan Petani
- f. Pengarus Utamaan Gender



Pelaksanaan Kegiatan



Universitas Mataram, PT. Petrokimia Kimia, GP3A Tengker dan P3A yang berada di daerah irigasi Gde Bongoh, kelompok Wanita tani, kelompok tani.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yaitu Dinas Teknis terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten antara lain Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ketahanan Pangan, BWS NT I, Pengamat Pengairan dan Penyuluh Pertanian, Konsultan ISAI Regional 7,

Komisi Irigasi Provinsi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara kelembagaan pengelolaan irigasi yaitu pemerintah dan non pemerintah sebagai upaya mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi ranah provinsi dan pusat. Salah satu produk yang dihasilkan dalam kegiatan Komisi Irigasi adalah rekomendasi terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi baik dalam kegiatan rapat, sidang, bimbingan teknis maupun workshop. Salah satunya terkait masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi



melalui kegiatan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming System) yang dilaksanakan di Daerah Irigasi Gde Bongoh Kabupaten Lombok Tengah. Berkaitan dengan tulus rencana tata tanam dan alokasi air hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Komisi Irigasi Kabupaten dengan membentuk satgas Alokasi Air di Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa serta pelaksanaan tertib pola dan tata tanam di Daerah Irigasi Kadindi dan Latonda Pekat. Setelah itu kegiatan layanan dilanjutkan sampai selesai. Evaluasi pasca kegiatan dengan seluruh panitia (panitia tingkat desa dan tim P4AI).

Pertanian yang dilakukan di Daerah Irigasi Gde Bongoh masih menggunakan pola lama yaitu belum hemat air, tidak ramah lingkungan dan produktivitas pertanian belum maksimal. Pola pertanian terpadu (Integrated Farming System) merupakan suatu pola yang mengintegrasikan usaha sektor



pertanian yang dikelola secara terpadu, berorientasi ekologis sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi dan produktivitas yang tinggi.



Salah satu upaya untuk mengatasi krisis air adalah melalui upaya penghematan air salah satunya dengan pengembangan Budidaya Padi Sistem SRI (System of Rice Intensification). Sistem ini mensinergikan pengelolaan sumber daya alam (natural resources management) terutama yang berkaitan

dengan tanah, air, tanaman dan unsur hara di dalam budidaya padi.

Kegiatan IFS dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu Koordinasi dilaksanakan lintas sektor dan kewenangan untuk pelibatan dalam kegiatan, termasuk pemilihan lokasi kegiatan. Kemudian dilaksanakan sosialisasi dan pemetaan lahan yang akan dipilih untuk lokasi pembuatan demplot. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan dasar dan pelatihan untuk tenaga tanam, produksi Kompos dan MOL, Pembuatan Demplot untuk melaksanakan praktek pertanian baik yang hemat air dan ramah lingkungan, Sekolah Lapang dan Panen Raya. Pelaksanaan kegiatan IFS mampu merubah pola pikir Masyarakat untuk melaksanakan praktek baik pertanian yang hemat air dan ramah lingkungan

Hasil dan Dampak

Pelaksanaan kegiatan IFS mengakibatkan dapat dilakukan penghematan penggunaan air sebesar 30 % dan pupuk sebesar 20 %, prediksi peningkatan produksi dari 4 ton/hektar menjadi 6 ton/hektar, hemat biaya untuk bibit karena biasanya 40 kilo menjadi 25 kilo, pertanian dilaksanakan ramah lingkungan karena petani membuat dan menggunakan pupuk organik, perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas petani dengan semboyan “Berani Bertani, Berani Berilmu” Termasuk juga



pengarusutamaan gender dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dan pembentukan Perempuan Peduli Irigasi dan Sungai sebagai bentuk upaya konservasi serta penguatan peran-peran Kelompok Wanita Tani di Daerah Irigasi Gde Bongoh untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Kelembagaan petani yang berkunjung langsung ke daerah Irigasi Gde Bongoh untuk langsung belajar maupun melalui sharing kegiatan dalam kegiatan penguatan kapasitas. Dari sisi perkumpulan petani air, kegiatan ini dianggap praktek baik yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperbaiki cara bertanam yang lebih baik.

Cakupan sasaran IFS menysasar kelompok rentan yaitu penduduk miskin dan perempuan. Kelompok perempuan dikuatkan dalam kelompok wanita tani dan



dukungan dalam kelembagaan petani melalui pemberdayaan untuk mendukung kedaulatan pangan di tingkat keluarga. Sedangkan penduduk miskin didorong

untuk melaksanakan pertanian baik yang hemat biaya, hemat air dan ramah lingkungan sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanaman dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain melaksanakan kegiatan demplot untuk praktek pertanian baik, dilakukan juga penguatan perempuan



Manfaat

1. Aspek Sosial

Koordinasi dan kolaborasi multistakeholder terbangun dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan ini untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Selain itu, terdapat perubahan perilaku dalam kegiatan menanam serta kolaborasi di tingkat petani untuk bergotong-royong bersama-sama.

2. Aspek Ekonomi

Manfaat dari aspek ekonomi kegiatan IFS, bahwa dengan melaksanakan praktek pertanian yang baik kegiatan pertanian dapat hemat biaya dan terdapat kenaikan produktivitas pertanian. Masyarakat juga memanfaatkan pekarangan untuk menanam kebutuhan harian, sehingga tidak perlu membeli melalui kegiatan rumah pangan lestari dan penanaman jamur tiram. Selain itu, kegiatan pengelolaan hasil pertanian seperti produksi jamu, makanan ringan maupun lainnya juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Selain itu, pasca kegiatan panen raya yang dihadiri Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah kebutuhan beras Aparatur Sipil Negara dipenuhi dari beras petani lokal salah satunya dari GP3A Tengker lokasi pelaksanaan IFS.

3. Aspek Lingkungan

Manfaat dari aspek lingkungan, kegiatan IFS ini dapat merubah pola pikir petani untuk bisa melaksanakan pertanian yang ramah lingkungan. Tahapan persiapan, pengolahan tanah sampai dengan perawatan juga mempertimbangkan aspek lingkungan antara lain Penggunaan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, penggunaan pupuk organik. maupun pestisida nabati. Upaya ini dapat membantu menjaga kualitas tanah, air dan udara agar lebih baik sehingga produktivitas tanam meningkat. Selain itu, produksi gabah yang dihasilkan juga sehat dan berkualitas.

4. Aspek Tata Kelola

Manfaat yang dirasakan dari aspek tata kelola dari sisi petani, selain mengadakan kegiatan demplot dilakukan juga perbaikan terhadap tata kelola kelembagaan perkumpulan petani pemakai air. Dari sisi perangkat daerah



melaksanakan pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas petani sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan bagi Kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri dari Dinas teknis, komisi irigasi dan perkumpulan petani pemakai air terwujud koordinasi dan kolaborasi

dalam mendukung implementasi rekomendasi dalam bentuk program dan kegiatan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Pengarusutaman gender dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya berbagi peran untuk mendukung kedaulatan pangan di tingkat keluarga

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan

- Adanya konflik air dan produktivitas tanam yang tidak maksimal
- Pola pikir Masyarakat untuk melaksanakan praktek baik pertanian yang hemat air dan ramah lingkungan masih rendah
- Belum maksimalnya pelibatan Perempuan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Strategi Keberlanjutan

Setelah pelaksanaan kegiatan IFS, dilaksanakan kegiatan Workshop untuk menindaklanjuti hasil kegiatan IFS. Selain itu, praktek baik ini mendapat apresiasi dari banyak pihak untuk dapat diadaptasi dan direplikasi pada Kabupaten lain oleh perangkat daerah terkait maupun oleh kelembagaan petani yang berkunjung langsung ke daerah Irigasi Gde Bongoh untuk langsung belajar maupun melalui sharing kegiatan dalam kegiatan penguatan kapasitas. Dari sisi perkumpulan petani air, kegiatan ini dianggap praktek baik yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperbaiki cara bertanam yang lebih baik.

Peluang dan Reflikasi

Berbagi praktek baik melalui media sosial seperti Facebook dan Youtube untuk membagi pengalaman yang sudah dilaksanakan, termasuk mendorong para pihak terkait melalui kelembagaan Komisi Irigasi untuk amati, tiru dan modifikasi. Berbagi cerita dan mengajak lebih banyak orang untuk melaksanakan kegiatan pertanian dengan baik

Komisi Irigasi memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan komunikasi lintas sektor, kewenangan dan kepentingan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi melalui ruang diskusi dan pembahasan untuk mereplikasi dan menyempurnakan proses baik dari IFS yang sudah dilaksanakan. Pelajaran baik dari kegiatan IFS ditularkan kepada petani lain dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pendampingan secara berkelanjutan oleh pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. Selain itu, praktek baik yang diperoleh dari kegiatan IFS diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan oleh petani dan ditularkan kepada petani yang belum mengaplikasikannya karena dianggap menguntungkan secara ekonomi dan ramah lingkungan

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah terkait organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk percepatan pencapaian target – target indikator sesuai Rencana Aksi Daerah 2019-2023. Hal ini penting dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunci keberhasilan percepatan pencapaian target-target indikator SDGs di Provinsi NTB adalah dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan/pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan kerjasama intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sinergitas program/kegiatan yang mendukung capaian indikator agar tepat sasaran dapat dicapai dengan komitmen pimpinan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Laporan tahunan SDGs Provinsi NTB Tahun 2023 ini merupakan upaya sistematis dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk percepatan pencapaian target indikator SDGs sesuai dengan perkembangan lingkungan, potensi wilayah, karakteristik, dan sosial budaya masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut serta dapat dijadikan untuk pembelajaran kedepan termasuk diharapkan sebagai acuan juga untuk lahirnya inovasi-inovasi dalam mempercepat capaian target SDGs pada tahun-tahun berikutnya terutama untuk pencapaian agenda SDGs sampai dengan tahun 2030.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 1 Maret 2023
2. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 7 Februari 2023
3. Rilis Badan Pusat Statistik tanggal 2 Februari 2023
4. Laporan akhir dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2023
5. Laporan akhir dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2023
6. Laporan akhir dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2023
7. Laporan akhir dinas Perdagangan Provinsi NTB tahun 2023
8. Laporan akhir Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2023
9. Laporan akhir dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2023
10. Laporan akhir dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2023
11. Laporan akhir dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023
12. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTB tahun 2023
13. Laporan akhir dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2023
14. Laporan akhir dinas Sosial Provinsi NTB tahun 2023
15. Laporan akhir dinas Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB tahun 2023
16. Laporan akhir dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB tahun 2023
17. Laporan akhir dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2023
18. Laporan akhir Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2023
19. Laporan akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2023
20. Laporan akhir Inspektorat Provinsi NTB tahun 2023

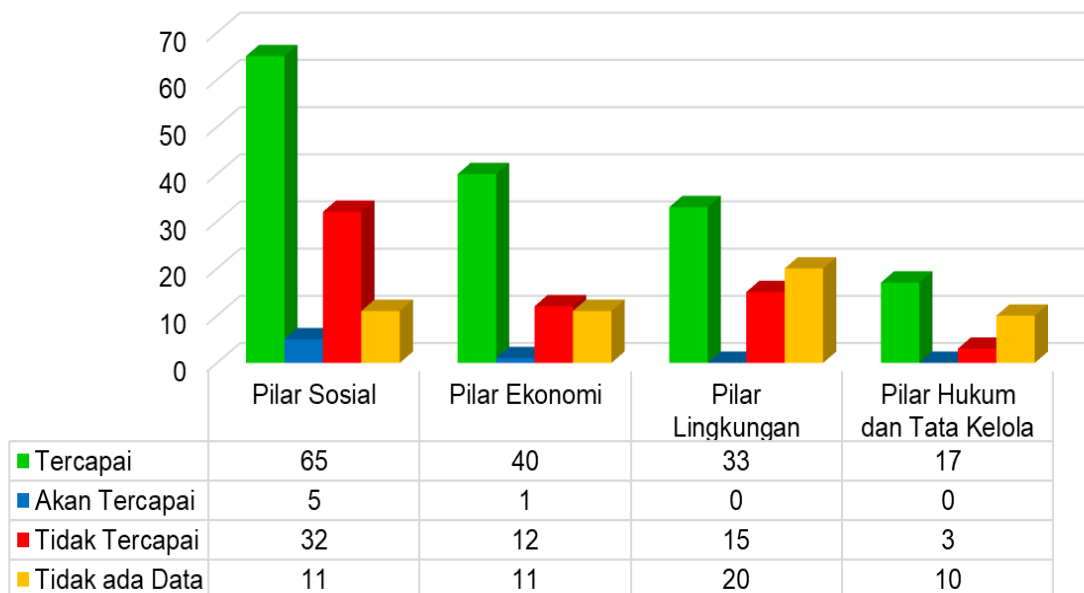
21. Laporan akhir Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB tahun 2023
22. Laporan akhir dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi NTB tahun 2023
23. Laporan akhir dinas Perpustakaan Daerah Provinsi NTB tahun 2023
24. Laporan akhir dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun 2023
25. Laporan akhir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB tahun 2023
26. Laporan akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB tahun 2023
27. Laporan akhir Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2023
28. Laporan akhir Sekretariat Daerah Provinsi NTB tahun 2023
29. Laporan Bank Indonesia Provinsi NTB tahun 20223

**Lampiran :
Indikator Pilar Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)**

Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

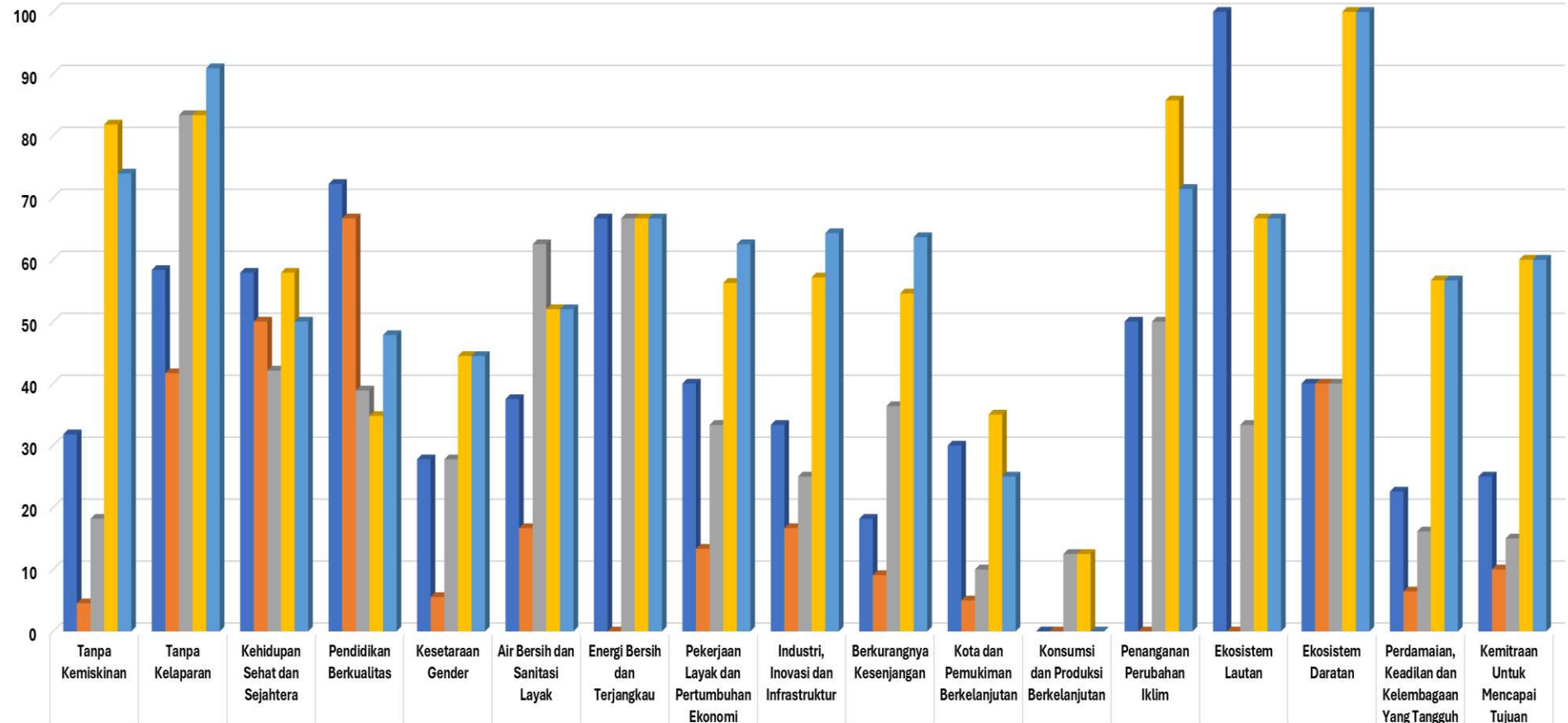
No	Tujuan	Target	Indikator	Capaian				% Capaian
				Tercapai	Akan Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak ada Data	
1	Tanpa Kemiskinan	5	23	17	2	4	0	74
2	Tanpa Kelaparan	2	11	10	0	1	0	91
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8	38	19	1	15	3	50
4	Pendidikan Berkualitas	8	23	11	2	5	5	48
5	Kesetaraan Gender	7	18	8	0	7	3	44
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	25	14	0	3	8	56
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	3	2	0	1	0	67
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7	16	10	0	5	1	63
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	6	14	9	1	0	4	64
10	Berkurangnya Kesenjangan	5	11	7	0	3	1	64
11	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	8	20	5	0	9	6	25
12	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	7	8	2	0	1	5	25
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	7	5	0	1	1	71
14	Ekosistem Lautan	3	3	2	0	1	0	67
15	Ekosistem Daratan	3	5	5	0	0	0	100
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	8	30	17	0	3	10	57
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	9	20	12	0	3	5	60
Total		96	275	155	6	62	52	56

CAPAIAN PILAR TPB/SDGS NTB TAHUN 2023



**Lampiran :
Program Kegiatan Yang Mendukung
Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB / SDGs)**

CAPAIAN TPB/SDGS PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023



	Tanpa Kemiskinan	Tanpa Kelaparan	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Pendidikan Berkualitas	Kesetaraan Gender	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Energi Bersih dan Terjangkau	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Berkurangnya Kesenjangan	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Penanganan Perubahan Iklim	Ekosistem Lautan	Ekosistem Daratan	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
■ Capaian 2019	32	58	58	72	28	38	67	40	33	18	30	0	50	100	40	23	25
■ Capaian 2020	5	42	50	67	6	17	0	13	17	9	5	0	0	0	40	6	10
■ Capaian 2021	18	83	42	39	28	63	67	33	25	36	10	13	50	33	40	16	15
■ Capaian 2022	82	83	58	35	44	52	67	56	57	55	35	13	86	67	100	57	60
■ Capaian 2023	74	91	50	48	44	52	67	63	64	64	25	0	71	67	100	57	60

REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan								
INDIKATOR SDGs :	1.2.1*	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis Kemiskinan						
	1.2.2*	Penduduk Miskin						
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1 : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Padi di seluruh Kabupaten/K ota Se-NTB	Ton		1.323.117	1.543.738	6.513.845.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Jagung di seluruh Kabupaten/K ota Se-NTB	Ton		1.752.479	2.328.930	75.250.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
	Jumlah Produksi Kedelai di seluruh Kabupaten/K ota Se-NTB	Ton		32.658	24.858			
PROGRAM . 2 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA								
Kegiatan 1. Kegiatan Penga wasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Produksi Bawang di seluruh Kabupaten/Kota Se-NTB	Ton		191.571	212.618	705.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
	Jumlah Produksi Cabe di seluruh Kabupaten/K ota Se-NTB			119.975	83.864			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
	Jumlah Produksi Manggis di seluruh Kabupaten/Kota Se-NTB	Ton		20.799	19.078			
PROGRAM . 3 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman perkebunan	Jumlah Produksi Kopi setiap tahun	Ton		5.658	6.481	4.852.326.200	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
	Jumlah Produksi Kakao setiap tahun	Ton		2.585	2.549			
	Jumlah Produksi Jmabu Mete setiap tahun	Ton		1.398	10.824			
	Jumlah Produksi Kelapa setiap tahun	Ton		48.003	48.854			
	Jumlah Produksi Tembakau setiap tahun	Ton		57.623	60.568			
PROGRAM 4 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA								
Kegiatan 1 : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengembangan Ternak Unggas	Kelompok		6	6	137.327.500	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
	Pakan Unggas	Kelompok		3	3	243.542.000		
	Kandang Unggas	Kelompok		24	24	4.379.750.000		
PROGRAM 5 : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan 1 : Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Pengadaan ternak sapi	Kelompok		59	59	5.074.193.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan ternak kambing	Kelompok		22	22	732.200.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
	Pengadaan ternak kandang ternak	Kelompok		12	12	1.633.000.000		
	Pengadaan Mesin cacah, Roda tiga	Kelompok		2	2	65.000.000		
	Pengembangan Peternakan (Hibah uang)	Kelompok		89	89	8.474.000.000		
PROGRAM 6 : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat								
Kegiatan 1 : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Konsumsi Pangan per kapita /Tahun	Paket		24	24	102,063,548	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
PROGRAM 7 : Program Penanganan Kerawanan Pangan								
Kegiatan 1. Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	orang		45	2750	99,670,000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
PROGRAM 8 : PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kotas	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan				60,000,000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
PROGRAM 9. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
Kegiatan 2. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi		32	32	665.000.000	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		12	12	632.000.000,-		
Kegiatan 4. Pengawasan Pupuk dan	Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi	Kabupaten/ Kota		10	3	35.000.000,-		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Penyaluran Pupuk Bersubsidi							
PROGRAM 10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi		sentra		3	3	11.039.203.923,60	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
PROGRAM 11. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
Kegiatan 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi yang di kembangkan	Kawasan		1	1	14.500.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah Destinasi pariwisata dan prasarana Pengelolaan Pariwisata	Lokas		17	17	6,910.498.500	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 12. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Peningkatan apasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang			240	72.411.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	orang			480	57.010.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
PROGRAM 13. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan								
Kegiatan 1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang terlayani	RTS		60	60	135.250.000.000	APBD	Dinas ESDM Prov. Ntb
PROGRAM 14. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	Ton			234.572	2,178,957,843	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit			27417	8.034.716.100	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 16. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Termasuk : Industri Perikanan : Garam, Tepung Ikan, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir yang mandiri	orang			15	3,338,340,368	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		60	70	12.767.933.933	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
PROGRAM 18. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS		32	32	82.983.248.577	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
PROGRAM 19. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
kegiatan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Ha			8.607	9.620.742.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
PROGRAM 20. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelo-laan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	paket		34	21	3.519.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 21. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang				8.959.823.419	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 23. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Kegiatan 1. Rehabilitasi social Penyandang disabilitas terlantar di dalam pantai	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	paket			400	2.174.159.400	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
PROGRAM 24. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Kegiatan 1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang terlayani	Paket			112	21.775.000	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Data Fakir Miskin Daerah cakupan provinsi yang terverifikasi dan validasi	KK			301100	40.000.000		
	Jumlah KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial	KK			2000	14.796.060.00		
	Jumlah KK Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	KK			1200	5.403.705.000	APBN	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
			Target	Realisasi			
PROGRAM 25. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yang di latih	orang	30	446	1,379,052,451	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 26. Program Penempatan Tenaga Kerja							
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		orang		30	709,127,993	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Kegiatan 2. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		orang		1750	13,222,000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 27..Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi							
Kegiatan 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan Kabupaten		orang		60	26,124,900	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 28. Program Pengelolaan Pendidikan							
Kegiatan 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		paket		1	481,995,739,504	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						205,370,819,871	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (BPJS)/ P BPJS						
PROGRAM 29. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1.Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kabupaten/kota	10	10	10	8.959.823.419	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K						
PROGRAM 31.								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat						
PROGRAM 29. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	60		90	137,437,600	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi								
Kegiatan 2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.				11	750,236,900	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
PROGRAM 30. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
Kegiatan 1.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	50		90	137,437,600	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan								
INDIKATOR SDGs :	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita/PKG AB (5)						
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
Kegiatan 1 : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kabupaten/kot a)	Kabupaten/Kota	3	10	10	51.505.699	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
PROGRAM 2: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	Lokasi	1	150		8.959.823.419	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	KK dengan Akses Jamban Sehat	%	82,67	94		88.457.899.005	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 3.Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Investigasi		10	10	359.054.640	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Kegiatan 1: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	375		10	60,000,000	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan						
	2.1.2*	Parvelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan						
	2.1.2(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400kkal/kapita/hari						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 4 : PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Kegiatan 1: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					54,970,000	APBD	DKP Provinsi NTB
PROGRAM 5 : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						850,931,198	APBD	DKP Provinsi NTB
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						637,080,880	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)						
	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/baduta						
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita						
PROGRAM 5: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provins	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provins	(Kab/Kota)	3	10	10	103.576.970	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi					160.000.000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 6. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	Lokasi	1			9.531.181.390	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
PROGRAM 8. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Kegiatan 1: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Desa	375		28	99,670,000	APBD	DKP Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
PROGRAM 9. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas		40	50	615.000.000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	2.2.2(b)							
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang di indikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH Point)						
Program 10 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	%		90	90	116,264,500	APBD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
INDIKATOR SDGs :	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup						
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih (%)						
	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan						
PROGRAM 1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	30	40		615.000.000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup						
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup						
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup						
	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi						
PROGRAM 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	30	40		615.000.000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.3.1(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk						
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang						
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria						
	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B						
	3.3.5(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta						
	3.3.5(b)	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis						
	3.3.5(c)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I)						
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi						
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa						
PROGRAM 3. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	Kab/Kota	1	9	10	522.956.600	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskesmas				162,876,500	APBD	RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitas medis						
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi						
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan						
	3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu						
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba						
PROGRAM 4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas	89			155.319.500	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas						
PROGRAM 5. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis				6,807,004,000	APBD	Dinas erhubungan Prov. NTB
Kegiatan 2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah fasilitas Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen				666,837,100	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
Kegiatan 3. Kegiatan Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jala	Jumlah dokumen Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jala	Dokumen				26,171,000	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern						
	3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin						
	3.7.1(b)	Jumlah PUS peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dibagi jumlah PUS pada periode yang sama dan menyatakan dalam persentase						
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun						
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan						
PROGRAM 6: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	unit		4	4	615.000.000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pengadaan Alat Kesehatan/AI at Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang diadakan	Paket		1	1	30.383.677.849	APBD	RS Mandalika
Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis Sarana yang diadakan	jenis		2	2	56.644.856.360	APBD	RS Mandalika
Kegiatan 4. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang diadakan	jenis		4	4	463.294.000	APBD	Dikes Induk, RS Mandalika
Kegiatan 5 : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	jenis		120	120	9.067.887.390	APBD	Seksi Farmasi
INDIKATOR SDGs :	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun						
INDIKATOR SDGs :	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas						
PROGRAM 8: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	3	10	10	463.294.000	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Kegiatan 2: Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit	unit	15	13	13	9.067.887.390	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan						
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA								
Kegiatan 1: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	2	83	84	29.983.700	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas								
INDIKATOR SDGs :	4.1.1*	Proporsi anak-anak/ anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca dan (ii) matematika						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah gedung baru SMA	Unit				302,359,484,731	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang				243,968,561,725	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat						
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun						
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang				302,359,484,731	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang				243,968,561,725	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)						
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)						
PROGRAM 5 : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang				243,968,561,725	APBD	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
INDIKATOR SDGs :	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).						
PROGRAM								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1:								
INDIKATOR SDGs :	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.						
Program 8								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik						
PROGRAM 9. PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAAN								
Kegiatan 1. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang difasilitasi memenuhi kualifikasi S1/DIV	orang		486		115.057.229	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	orang		876		84.306.722	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Dokumen Data guru dan tenaga kependidikan	Dok		0		0	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 4. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah Guru dan Tenaga Pendidikan Berprestasi	Orang		140		1.079.469.846	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	Jumlah Pengawas yang dinilai	orang		200		554.961.924	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Calon kepala sekolah yang bersertifikat	orang		0		300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen penilaian Angka Kredit Jafung	Dok		12		77.185.122	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 8. Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Jumlah calon kepala sekolah SMA, SMK dan PKPLK yang mengikuti bimtek	orang		300			APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 9 .Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	Jumlah Guru yang mengikuti	orang		350		2.498.820.562	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
	peningkatan kompetensi jenjang regional/ nasional							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 10.Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Jumlah Guru tidak tetap (GTT) dan Pengawai TU tidak tetap	orang		200		330.764.400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 11.Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Workshop Sistem kendali pendidikan kinerja	orang		100		255.450.060	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 12. Olimpiade Sains Guru	Jumlah Guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional	orang		120		362.254.717	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Tujuan 5. Kesetaraan Gender								
INDIKATOR SDGs :	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.						
	5.2.2*	Proporsiperempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir						
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.						
PROGRAM 1. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Termasuk: PAUD HI)								
Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan	orang		72		477,930,107.11	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS	orang		400		163,269,547.79	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM 2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
Kegiatan 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	orang		237		111,895,896.97	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	orang		30		485,114,904.09	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 3. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	orang	500	500		137,954,747.01	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun						
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum sebelum umur 18 tahun.						
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.						
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).						
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.						
PROGRAM 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	orang		85		207,096,217.8	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Kegiatan 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	orang		85		186,075,204.29	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
INDIKATOR SDGs :	5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.						
PROGRAM 4. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)								
Kegiatan 1: Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung baru SMA	Unit		1	1	2.260.620.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2 : Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang		47	47	17.658.959.850	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3 : Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang dibangun	ruang		2	2	542.546.800	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 4 : Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah Laboratorium dan ruang praktikum sekolah yang dibangun	ruang		27	27	14.619.560.427	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5.Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaa sekolah yang dibangun	ruang		1	1	650.716.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 5. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)								
Kegiatan 1. Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah dibangun	ruang		6	5	1.088.342.509	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 2.Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas baru SMK dibangun	ruang		14	14	3.572.969.400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 3.Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Jumlah ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terbangun	ruang		1	0	276.033.600	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 4. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Jumlah Ruang laboratorium yang dibangun	ruang		26	26	16.578.939.146	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat Praktik dan Peraga siswa	Set		5	5	43.923.251.700	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 6. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang terehabilitasi	unit		4	4	2.201.486.940	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Kegiatan 7. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang terehabilitasi	ruang		7	7	1.792.511.037	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
PROGRAM 6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN								
Kegiatan 1. Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Jumlah Dok manajemen BOS	Dokumen		12	12	40.076.016	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPD dan DPR)						
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.						
PROGRAM 7. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%		43,7	45	2,399,214,652.85	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Proporsi kader perempuan di partai politik	%		38,2	39,2	41,263,685.64	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan						
	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang kontrasepsi modern).						
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.						
PROGRAM 8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
Kegiatan 1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Design Program KIE KKBPk Yang dihasilkan	%		8	8	223,562,374.96	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dlm pembinaan kesertaan ber KB			200	250		APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	5.a.1							
	5.a.2							
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	5.b.1*							
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	5.c.1							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
Kegiatan 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam elembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Data Gender dan Anak	orang		60	60	90,540,439.51	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. NTB
PROGRAM 10. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
Kegiatan 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%		43,7	45	2,399,214,652.85	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewnangan Provinsi	Proporsi kader perempuan di partai politik	%		38,2	39,2	41,263,685.64	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB Prov. NTB
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak								
INDIKATOR SDGs :	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.						
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.						
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas bupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR	10	240	240	2.355.993.800	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Cipta Karya)
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak						
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).						
	6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,kawasan dan komunal.						
PROGRAM 2 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regiona	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%			98,79	313,005	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Cipta Karya)
PROGRAM 3 : PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)								
Kegiatan 1.Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary	ruang		3	3	142.776.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.NTB
Kegiatan 2 Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Jumlah sekolah sekolah sehat yang dibina	Sekolah		1	1	241.767.360	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
PROGRAM 4. PROGRAM PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1 : Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang tersedia (Kamar/Toilet/WC)	ruang		44	44	4.313.320.070	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.NTB (Seksi Kesling, Kesjaor)
Kegiatan 2 : Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah sekolah sehat yang terbina	sekolah		3	3	116.477.589	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
PROGRAM 5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kabupaten/kota)	Kab/Kota		10	10	11.865.262.000	APBD	Dinas Kesehatan Prov. NTB/Dinas PUPR Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.						
PROGRAM 6 :								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.						
PROGRAM 7 : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Buah		11	11	17.349.156.600	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).						
PROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		247	247	905.081.587.000	APBN	BPDASHL DMY
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.						
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.						
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	buah	28	40	40	17.349.156.600	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (Cipta karya)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding(MoU) lintas Negara.						
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.						
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	DAS		32	32	142,412,600	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (TERMASUK: NTB HIJAU, INDUSTRI KEHUTANAN: HASIL HUTAN KAYU, HHBK UNGGUL, GEOPARK-CAGAR BIOSFER RINJANI & TAMBORA)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan Negara	Ha			222.31	2,009,264,509	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
INDIKATOR SDGs :	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.						
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.						
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.						
PROGRAM 13. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	DAS		32	32	142,412,600	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%.						
	6.6.1.(c)	umlah danau yang menurun tingkat erosinya.						
PROGRAM 14. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha		25	60	75,000,000	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
INDIKATOR SDGs :	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.						
	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.						
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	DAS		32	32	142,412,600	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau								
INDIKATOR SDGs :	7.1.1*	Rasio elektrifikasi						
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Termasuk: Nusa Tenggara Bendarang)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	%		30	45	135.250.000.000	APBD	Dinas ESDM Prov.
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								
INDIKATOR SDGs :	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita						
	8.1.1. (a)	PDB per kapita						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian,berdasarkan jenis kelamin						
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal						
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
Kegiatan 1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan PertanianKlaster Kompetensi	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan (kegiatan)	orang		300	300	40,651,120	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kelompok berbasis korporasi yang dibina (korporasi)	Orang		40	0	1,213,332,760	APBD	Disnakertran

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Ekonomi Petani Berbasis Kawasan								
INDIKATOR SDGs :	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian						
Program 1.								
Kegiatan 1.	Indikator 1.							
INDIKATOR SDGs :	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja						
PROGRAM 2 : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan		90	19	137,437,600	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen		11	11	750,236,900	APBD	Disnakertran
INDIKATOR SDGs :	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.						
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran						
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
PROGRAM 3 : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	Kegiatan		160	109	19,087,800	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang		1,75	0	14,064,100	APBD	Disnakertran
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang		23,31	810	428,090,900	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	Orang		75	0	6,592,060	APBD	Disnakertran
PROGRAM 4 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang		300	446	795,123,472	APBD	Disnakertran

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	Orang		40	-	14,999,000	APBD	Disnakertran
Kegiatan 4. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT		20	20	3,256,250	APBD	Disnakertran
PROGRAM 5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
Kegiatan 1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK		20	20	10,905,560	APBD	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs :	8.8.1	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status						
	8.8.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.						
	8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.						
PROGRAM 6 : PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	200	1055	785	593,653,430	APBD	Disnakertrans NTB
INDIKATOR SDGs :	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara						
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Program 7 : Program Pemasaran Pariwisata								
Kegiatan 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%			42,76	3.066.792.323	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 8. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
Kegiatan1. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		%			12,5	13.999.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						6,910.498.500	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						14.500.000	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Program 9. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
Kegiatan 1.Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang tersertifikasi HAKI	orang			45	4.088.451.600	APBD	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs :	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	8.10.2*	Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur								
INDIKATOR SDGs :	9.1.1.(a)	Jalan Mantap Provinsi						
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara.						
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan						
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis						
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terselenggaranya Jalan Provinsi	km		168,00	540.56	113.532.962.659	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsii	Jumlah dokumen fasilitasi perizinan angkutan laut	Dokumen		38	40	76,238,568.00	APBD	Dinas Perhubungan Prov. NTB
INDIKATOR SDGs :	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita						
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri						
PROGRAM 3. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen		5	5	6.549.375.098,32	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 2 Koordinasi, Terselarasnya, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	Tersusunnya Koordinasi, Terselarasnya, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan	sentra		18	18	5.317.355.164,94	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							
Kegiatan 3	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM		18	18	15.964.823.372,77	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
Kegiatan 4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	sentra		3	3	30.258.820.821.1	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
Kegiatan 5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM		450	450	7.594.957.376,95	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Kegiatan 6.	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dok		8	8	306.078.746,08	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								
PROGRAM 4. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi	IKM	64	1600	1850	1.179.102.933,70	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi								
PROGRAM 5 . PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
Kegiatan 1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dok		1	1	7.408.870.833,79	APBD	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.						
	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam						
	9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet						
PROGRAM 6 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	tersantandarisasi		Terstandarisasi	Terstandarisasi	900.320.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov. NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi (Kualifikasi/Level)							
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan								
INDIKATOR SDGs :	10.1.1*	Koefisien Gini						
INDIKATOR SDGs :	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Termasuk: Nusa Tenggara Barat)								
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	%		30	45	24.447.993	APBD	Dinas ESDM Prov.
Kegiatan 2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan (izin)	%		30	5	15.780.000	APBD	Dinas ESDM Prov.
Kegiatan 3. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS		900	125	15.780.000	APBD	Dinas ESDM Prov.

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan								
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Kegiatan 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kab/Kota	Keg		2		313.005.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terselenggaranya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan		2		0	APBD	Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB
PROGRAM 4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang		132.403	160.207	10,295 ,601	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani	Orang		4320	4363	400.303	APBD	Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
PROGRAM 5. REHABILITASI SOSIAL								
Kegiatan 1. Rehabilitasi social Penyandang disabilitas terlantar di dalam pantai	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	jiwa		800	800	1,128,953,535	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 2. Rehabilitasi social dasar anak terlantar didalam dalam pantai	Jumlah anak dan perempuan terlantar diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pantai	Jiwa		5500	5500	2,812,925,574	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
Kegiatan 3. Rehabilitasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam pantai	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitasi dalam pantai	jiwa		60	60	1.264.230.300	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
PROGRAM 6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Kegiatan 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	jiwa		24800	25425	12.415.846.603	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
	Jumlah korban bencana yang diberikan sandang							
	Jumlah korban bencana alam							
	Jumlah kelompok rentan yang tertangani							
	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan							
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal						
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri						
	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal						
PROGRAM 7. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA								
Kegiatan 1. Fasilitasi Kerjasama antar desa menjadi kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar Desa yang tersusun	Dokumen		160	40	242.812.003	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
PROGRAM 8. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA								
Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggraan Pemerintah Desa	Kali		5	5	1.178.776.642	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
INDIKATOR SDGs :	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas						
PROGRAM 11. REHABILITASI SOSIAL								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Rehabilitasi social Penyandang Disabilitas terlantar di dalam pantai	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pantai	jiwa		800	800	12.415.846.603	APBD	Dinas Sosial Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil						
Program 1								
Kegiatan 1.	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
Program 1								
Kegiatan 1.	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	10.4.1	Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan						
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
Program 1								
Kegiatan 1.	Indikator 1							
INDIKATOR SDGs :	10.7.2. (a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan						
Program 1								
Kegiatan 1.	Indikator 1							
Tujuan 11.Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan								
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.						
PRGRAM 1.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Kegiatan 1.Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah Rumha Tangga yang ditingkatkan huniannya	Unit	1083	538	132	4,463,585,893	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			Target	Realisasi				
PROGRAM 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Kegiatan 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan rumah terdampak bencana yang terdata dan terverifikasi	%		100	100	32,818,400	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Kegiatan 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan masyarakat terdampak bencana/terdampak relokasi program provinsi yang tersosialisasi	%		100	100	333,000,500	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan penanganan rumah terdampak bencana yang tertangani	%		100	100	72,223,800	APBD	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).						
	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.						
PROGRAM 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
Kegiatan 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Tersedianya Perda RTR yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok		1	1	67.163.179	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Kegiatan 2. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen materi teknis, album peta, Ranperda RTR Provinsi NTB	Dok		1	1	300.318.553	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan))	KSP		1	1	48.502.230	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.2.1.(a)	Persentase pengguna modaltransportasi umum di perkotaan.						
PROGRAM 4 PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
Kegiatan 1. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Prosentase keselamatan fasilitas jalan	jenis		2	1	6,793,088,600	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
Kegiatan 3. Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Poresntase usulan manajemen rekayasa lalu lintas dan pelanggaran angkutan	dokumen		21	3	639,103,242	APBD	Dinas Perhubungan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.						
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).						
	11.3.2.(a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.						
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).						
Program 1.								
Kegiatan 1.								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
INDIKATOR SDGs : :	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana di Provinsi NTB(IRBI).						
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.						
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.						
PROGRAM 5. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen		38	24	1,879,914,100	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Frekuensi Kejadian Bencana Yang Tertangani	kasus		99	99	1,079,966,200	APBD	BPBD Provinsi NTB
Kegiatan 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	Kegiatan		1	1	77,615,900	APBD	BPBD Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs : :	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.						
PROGRAM 6. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		60	49,02	3,423,215,486	APBD	Dinas LHK Prov.
INDIKATOR SDGs : :	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.						
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs : :	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana(PRB) tingkat daerah.						
Program 1. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan								
Tujuan 12.Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab								
INDIKATOR SDGs :	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwinsprogram.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	12.2.1	Jejak material (material footprint).						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.						
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).						
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Termasuk : Taman Asri/Indah)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi		2	2	642,493,820	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 3. PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
Kegiatan 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pengumpul limbah B3 lintas daerah kab kota yang tertib aturan	unit usaha		210	115	33,550,010	APBD	Dinas LHK Prov.
INDIKATOR SDGs :	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.						
PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)								
Kegiatan 1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%		60	49,02	4.854.139.856	APBD	Dinas LHK Prov.
INDIKATOR SDGs :	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim								
INDIKATOR SDGs :	13.1.1*	Dokumen strategipengurangan risiko bencana(PRB) tingkat nasional dan daerah.						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen		38	24	89,302,900	APBD	BPBD Provinsi NTB
Tujuan 14. Ekosistem Lautan								
INDIKATOR SDGs :	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.						
INDIKATOR SDGs :	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.						
INDIKATOR SDGs :	14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
Kegiatan 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas ruang laut dan pesisir yang dikelola	ha		2	101,24	500,000,000	APBD	Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Kegiatan 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		10	100,08	106,793,114	APBD	Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi NTB
PROGRAM 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Kegiatan 1. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	unit	1	1,00	1,00	2,178,957,843	APBD	Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Tujuan 15. Ekosistem daratan								
INDIKATOR SDGs :	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.						
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.						
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.						
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	km		9	25,76	121,066,600	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen		1	1	255,669,106	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha		1,78	1,805	489,766,928	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	luas kawasan hutan yang dilindungi	%		41	41	2,153,752,311	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
Kegiatan 5.Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		12	11	225,622,909	APBD	Dinas LHK Prov.NTB

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri		11	24	118,481,640	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 2. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)								
Kegiatan 1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok		8	8	105,033,850	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Termasuk : Taman Asri/Indah)								
Kegiatan 1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi		2	2	642,493,820	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		247	50	142,412,600	APBD	Dinas LHK Prov.NTB
INDIKATOR SDGs :	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
	Indikator 2							
Tujuan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
INDIKATOR SDGs :	16.1.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
	16.1.2.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.						
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.						
	16.3.1.(a)	Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						
PROGRAM 12. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Buday	desa		1	2		APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
PROGRAM 13. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	lembaga		1	1		APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Tim Jejaring yang difasilitasi	orang		85	85			
	Mediasi Konflik	kali		20	20			
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok		1	1			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
INDIKATOR SDGs :	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.						
	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.						
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).						
PROGRAM 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
Kegiatan 1. Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asisten	Dok.laporan		172	122	2.529.078.823	APBD	Inspektorat Provinsi
INDIKATOR SDGs :	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.						
Program 1.								
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
PROGRAM 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pengawasan internal	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	%		4	2,07	1.187.192.900	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
	Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang ditindaklanjuti	%		85	70	160.277.420		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 2.Penyelenggaraa n Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dok. laporan hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan		25	10	34.987.000	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
Kegiatan 3. Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan Dan Asisten	Laporan		11	8	24.940.600	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
PROGRAM 5. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasa	Persentase Peningkatan Level Masing-masing Elemen Kapabilitas APIP	Dok. Regulasi dan Laporan		100	100	44.925.000 0	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
PROGRAM 6. PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN								
Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pengawasan internal	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	%		4	2	1.187.192.900	APBD	Inspektorat Provinsi NTB
	Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang ditindaklanjuti	%		85	70	160.277.420		
INDIKATOR SDGs :	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.						
PROGRAM 7. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	standar		terstandarisasi	terstandarisasi	900.320.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
PROGRAM 8. Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ								
Kegiatan 1. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ Kab/Kota yang memenuhi level kematangan minimal 3	%		100	100	107.445.637	APBD	Biro Pengadaan Brang dan Jasa
Kegiatan 2. Pembinaan Kelembagaan PBJ	Prosentase pembinaan kelembagaan UKPBJ di Kab/Kota se NTB	%		100	100	10.541.200	APBD	Biro Pengadaan Brang dan Jasa
Kegiatan 3. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis PBJ	Jumlah BIMTEK PBJ yang dilaksanakan dalam 1 tahun	%		20	30	537.408.382	APBD	Biro Pengadaan Brang dan Jasa
Program 1.								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).						
Program 1.								
Kegiatan 1.								
INDIKATOR SDGs :	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)						
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).						
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.						
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.						
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.						
PROGRAM 13. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	lembaga		1	1		APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Tim Jejaring yang difasilitasi	orang		85	85			
	Mediasi Konflik	kali		20	20			
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok		1	1			
INDIKATOR SDGs :	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.						
	16.9.1.(b)	Persentase anak usia 0- 17 Tahun menurut kepemilikan akta kelahiran dan kabupaten/kota diProvinsi NTB						
PROGRAM 10. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
Kegiatan 1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan pendaftaran kependudukan dengan baik	Kab/kota		10	10	237,752,105	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 2 Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah kegiatan pendukung penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	keg		2	2	86,060,230	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB
PROGRAM 11. PROGRAM PENCATATAN SIPIL								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Pelayanan Pencatatan sipil	Jumlah jenis dokumen catatan sipil dan pendukungnya	dokumen		1	1	59,280,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
INDIKATOR SDGs :	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
	16.10.2*							
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.						
PROGRAM 12. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
Kegiatan 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	desa		1	2		APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
PROGRAM 13. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi	lembaga		1	1		APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
	Jumlah Tim Jejaring yang difasilitasi	orang		85	85			
	Mediasi Konflik	kali		20	20			
	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dok		1	1			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
INDIKATOR SDGs :	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						
PROGRAM 14. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	%		80	88,11	7.658.707.202	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan								
INDIKATOR SDGs :	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB						
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.						
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
Kegiatan 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%		4,48	-0,58	88.387.032	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Kegiatan 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	%		62,22	56,2	32.614.614	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%		9,08	21,13	8.407.936.385	APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadapPDB.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).						
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.						
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.						
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.						
Program 1.								
Kegiatan 1.								
Kegiatan 2.								
INDIKATOR SDGs :	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas						
PROGRAM 3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2017	2023		Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				Target	Realisasi			
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM		5	4	300.007.700	APBD	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
INDIKATOR SDGs :	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.						
	17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							
INDIKATOR SDGs :	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.						
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)						
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.						
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).						
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.						
Program 1								
Nama Kegiatan 1	Indikator 1							
	Indikator 2							

Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Non Pemerintah

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR	1.2.2*	Presentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlinsungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk katagori kelompok semua anak, pengaguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan								
	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas / P DMMR								
Nama Program 1 : Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Memastikan Perspektif GEDSI dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pembangunan di Sektor Sosial Budaya, Ekonomi dan Politik melalui Strategi Penguatan Kepemimpinan Perempuan										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 1 :	1.1 Output Kegiatan : Meningkatnya kesadaran kritis, kepemimpinan perempuan, komitmen politik dan life skill (kecakapan hidup) perempuan akar rumput yang dikembangkan melalui Sekolah Perempuan					906.573.510			Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa RarabG Selatan, Desa Sepit 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa Andalan, Desa Menggala, Desa Batu Rakit	LPSDM
	1.2 Output Kegiatan : Meningkatnya partisipasi perempuan pemimpin akar rumput dalam Musrenbang desa-kabupaten										
Nama Program : FOSTERING MULTISTAKEHOLDER ALLIANCE FOR PRO-POOR and GENDER SENSITIVE LOW CARBON DEVELOPMENT AND CLIMATE RESILIENCE											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1	output 1.1. We will cooperate with the Forestry Stakeholder Unit (FSU) and the Community based forest ranger to plant, nurture, and maintain the trees in the agreed forest and land to ensure the trees planted are growing. The FSU has seedling bank.					CAD. 500.000	26100 bibit telah didistribusikan dan ditanam oleh petani di area HKM Agro Mangkuaji Lombok Utara		Islamic Relief Canada	Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Barat	IR Indonesia partnership dengan MANDALA dan KONSEPSI
	output 1.2. 150 poor households received training on Community and Gender based climate change mitigation and adaptation in forestry sector						152 pemegang hak telah dilatih terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis gender dan inklusi				
	output 1.3. 150 poor households received microfinance to run agrobusiness in maintaining regreened forest and land						150 pemegang hak telah ditransfer microfinance untuk menjalankan usaha dibidang agroforestry, setiap pemegang hak mendapat dukungan dana				

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
							sebesar Rp. 3.500.000				
	output 1.4. 150 poor households received training and practice on gender based circular economy from Waste Sector						157 pemegang hak telah dilatih terkait management pengelolaan sampah berbasis 3 R				
	output 1.5. 150 household received Microfinance to run circular economy from waste						157 pemegang hak telah ditransfer microfinance untuk menjalankan usaha pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, setiap pemegang hak mendapat dukungan dana sebesar Rp. 3.000.000				

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	output 1.6. A gender based social green enterprise is established legally and run officially						1 koperasi syariah telah difasilitasi pembentukan dan legalisasi di dinas koperasi dan UKM Lombok Utara				
	output 2.1. A mutistakeholder climate change working group (MCCWG) for inclusive low carbon development and climate resilience is officially established and functional						Mendampingi pembentukan Pokja PRKBI NTB bersama mitra pembangunan lainnya di NTB				
	output 2.2. Sub-national government' and CSOs' staff are imparted on inclusive low carbon development and climate resilience strategy						OPD dan CSO akan dilatih terkait PRKBI berbasis gender dan inklusi				

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	output 2.3. Sub-national government' and CSOs' staff are imparted on inclusive low carbon development and climate resilience strategy						Adanya MoU PRKBI antara Pemda NTB dan BAPPENAS, Dokumen PRKBI yang akan ditandatangani oleh Gubernur NTB				
	output 2.4. Government' and CSOs' staff are imparted on MRV (Monitoring, Reporting, and Validation) on GHG emission in Forestry and Waste Sector						16 BKPH di NTB telah dilatih terkait MRV melalui input data SRNPPI				
	Output 2.5. Two proposals in accessing national and international budget on climate change produced by MWG including for carbon offset/trading						2 proposal pendanaan iklim akan dihasilkan oleh pemerintah NTB untuk mengakses dana perubahan iklim baik di nasional maupun di internasional.				
Nama Program :Women lead a Transformative and Just Energy Transition in Indonesia (WE4JET)											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1 (12) Kick off untuk Peluncuran Proyek WE4JET	1.1 Output Kegiatan : Tersosialisasi a program WE4JET kepada para pemangku kepentingan					Rp. 15.529.750			Oxfam in Indonesia	Mataram	Yayasan Penabulu
	1.2 Output Kegiatan : Adanya komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan WE4JET di NTB								Oxfam in Indonesia	Mataram	Yayasan Penabulu
Nama Kegiatan 2 FGD untuk Pemetaan Stakeholder	2.1 Output Kegiatan : Terpetakannya pemangku kepentingan untuk isu transisi energi berkeadilan di Provinsi NTB					Rp. 11.335.000			Oxfam in Indonesia	Mataram	Yayasan Penabulu
	2.2 Output Kegiatan : Tersedianya laporan riset pemetaan pemangku kepentingan untuk transisi energi berkeadilan di Provinsi NTB								Oxfam in Indonesia	Mataram	Yayasan Penabulu

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 3 FGD untuk Pemetaan Sektor Swasta	2.1 Output Kegiatan : Terpetakannya pemetaan sektor swasta untuk isu transisi energi berkeadilan di Provinsi NTB					Rp. 21.391.500			Oxfam in Indonesia		Yayasan Penabulu
	2.2 Output Kegiatan : Tersedianya laporan riset pemetaan sektor swasta untuk isu JET di Provinsi NTB								Oxfam in Indonesia		Yayasan Penabulu
Nama kegiatan 4 Seri peningkatan kapasitas forum multi pihak tentang perspektif GEDSI dalam transisi energi yang berkeadilan di NTB	2.1 Output Kegiatan : Meningkatkan kapasitas para pihak tentang perspektif GEDSI dalam transisi energi berkeadilan					Rp. 40.500.000			Oxfam in Indonesia		Yayasan Penabulu
	2.2 Output Kegiatan : Terbentuknya forum para pihak untuk advokasi GEDSI JET di Provinsi NTB								Oxfam in Indonesia		Yayasan Penabulu
INDIKATOR	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah									
	1.5.1.(e)	Indeks Risiko Bencana (IRB)									
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Program : Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana											
1.1.1 Dukungan teknis dan fasilitasi untuk pengembangan kebijakan, implementasi, dan pemantauan untuk SPM SUB di tingkat nasional dan sub-nasional	1.1.1.06 Dokumen strategi untuk penguatan NSPK guna mendukung implementasi SPM SUB di provinsi dan kabupaten yang menjadi sasaran	Dokumen	1	0	1	300.020.000	237.970.000	62.050.000	DFAT (Australian Government)	NTB (10 Kab/Kota)	PALLADIUM - SIAP SIAGA
Nama Program : Pengembangan Strategi PB											
2.1.1 Dukungan teknis pelaksanaan peta jalan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah dan pengembangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana daerah yang inklusif dan responsif gender	2.1.1.05 Pengembangan pedoman pengarusutamaan GEDSI untuk implementasi penanggulangan bencana di daerah	Dokumen	1	0	1	159.977.275	30.657.275	129.320.000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	2.1.1.06 Dokumen RPB yang diperbarui dan dilegitimasi yang menerapkan prinsip GEDSI serta inklusivitas di provinsi dan kabupaten yang menjadi sasaran, termasuk di Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (KSPN)	Dokumen	1	1	0	2.292.725	2.292.725		DFAT	Lombok Utara	PALLADIUM - SIAP SIAGA
Nama Program 3 (11): Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana											
3.1.1 Dukungan teknis, pengawalan, dan perkuatan pelaksanaan pemetaan risiko bencana yang standar, efektif, dan inklusif untuk mendukung implementasi SPM-SUB didaerah	3.1.1.03 Kajian Risiko Bencana Daerah yang dimutakhirkan dan disahkan dengan pelibatan multisektor dan inklusif	Dokumen	1	0	1	150.000.000	98.930.000	51.070.000	DFAT	Lombok Tengah	PALLADIUM - SIAP SIAGA
Nama Program 4 (11): Layanan Data dan Informasi dan komunikasi kebencanaan											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
4.1.1 Dukungan teknis, fasilitasi, dan pengawalan untuk penguatan proses integrasi data dan manajemen informasi kebencanaan kedalam satu regional data ditingkat daerah	4.1.1.02 Strategi dan katalog data untuk integrasi data kebencanaan telah disusun dan disahkan untuk implementasi	Platform	1	0	1	350.000.000	187.270.000	162.730.000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
Nama Program 5 (11): Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Kesiapsiagaan											
5.1.1 Penguatan Kolaborasi Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana	5.1.1.03 Platform koordinasi dan kemitraan multi-sektor (minimal melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media) untuk penguatan penanggulangan bencana terbentuk dengan dasar kebijakan (peraturan) yang jelas dan berfungsi di seluruh provinsi	Dokumen	1	0	1	170.020.000	87.850.000	82.170.000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	dan kabupaten sasaran										
5.2.1 Pengembangan model Desa Tangguh Bencana berbasis kesejahteraan yang aplikabel dengan konteks lokal di Daerah dan mendukung strategi percepatan ketangguhan desa yang inklusif dan berdasarkan SNI Desa Tangguh	5.2.1.08 Uji lapangan dari strategi percepatan ketahanan desa berbasis inklusif dan PKD dilakukan oleh pemerintah di dalam desa-desa sasaran prioritas mereka, terutama di desa-desa tujuan wisata, dan hasilnya digunakan untuk meninjau dan memperkuat strategi tersebut	Dokumen	1	0	1	355.000.000	49.340.000	208.670.000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA
	5.2.1.09 Rencana percepatan ketangguhan yang inklusif ditingkat desa dan berlandaskan kearifan lokal	Dokumen	1	0	1	39.950.000		114.140.000	DFAT	NTB	PALLADIUM - SIAP SIAGA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	yang berdasar pada SNI Desa Tangguh telah disusun untuk disahkan sebagai bagian perencanaan pembangunan daerah										
Nama Program 1 (11): Pulih Bersama											
KONSEPSI - MITRA SAMYA : Memperkuat Kembali Ketangguhan Inklusif sebagai Strategi Pemulihan Penghidupan Komunitas Pasca Pandemi Covid-19	1. Masyarakat rentan pedesaan telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitasnya dalam manajemen risiko bencana adaptif Covid-19 yang selaras dan integratif 2. Rumah tangga terpilih terdampak Covid-19 telah memiliki ketahanan penghidupan baru yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tekanan dan guncangan 3. Sistem dan	Desa / Kawasan	4	2	2	2,533,150,000	1.266.575.000	1.266.575.000	DFAT/ SIAP SIAGA	Desa Malaka, Desa Pemenang Barat (Lombok Utara) Desa Selong Belanak, Desa Tumpak (Lombok Tengah)	KONSEPSI & MITRA SAMYA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	praktik management risiko bencana adaptif Covid-19 menjadi tangguh dan inklusif serta tanggap terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat										
Nama Program 1 (11): "Karang Tangguh" - Strategi Pengutaaan Masyarakat untuk Desa Tangguh Bencana											
MDMC : Mewujudkan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Melalui Kesadaran dan Pelembagaan Kebencanaan desa yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam mengakses layanan informasi, sumber daya, dan mekanisme penguatan kebencanaan berbasis desa 2. Meningkatnya keterlibatan	Desa / Kawasan	5	paralel 5 desa	paralel 5 desa	2.433.250.000	1.216.625.000	1.216.625.000	DFAT/ SIAP SIAGA	Desa Pemenang Timur, Desa Medana, Desa Dangiing (Lombok Utara) Desa Kopang Rembiga, Desa Rembitan (Lombok Tengah)	MDMC

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
keluarga, masyarakat, dan stakeholder kunci desa untuk memperkuat ketangguhan desa terhadap bencana 3. Meningkatnya dukungan jaringan Muhammadiyah dalam pencapaian Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 4. Hasil program didokumentasikan, didiseminasikan, dan digunakan sebagai referensi untuk pelaksanaan dan replikasi Program Destana yang inklusif dan berkelanjutan oleh pemerintah dan pihak lainnya										
Nama Program : Deepening Multi-Stakeholder Collaboration for Inclusive and Sustainable Replication of Community-based Disaster Resilience Strategies (DCDR)										

Nama Kegiatan : Memfasilitasi konsolidasi kelembagaan Forum Komunikasi Relawan TSBD se-Pulau Lombok untuk memastikan peran dan partisipasi relawan kesiapsiagaan bencana desa dalam kebijakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten.	Output Kegiatan : Dirumuskannya rencana kerja tahunan serta penyusunan pedoman kelembagaan Forum Relawan TSBD. Kegiatan konsolidasi akan dilaksanakan selama dua hari di Kota Mataram melibatkan 34 orang perwakilan 17 lembaga TSBD.								Caritas Germany	Provinsi Nusa Tenggara Barat Level Kabupaten Lombok Utara : - Desa Pemenang Barat - Desa Akar-Akar - Desa Gunjan Asri - Desa Andalan - Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Tengah : - Desa Sengkol - Desa Mertak Kabupaten Lombok Timur : - Desa Kembang Kerang Daya - Desa Pesanggrahan - Desa Obel-Obel - Desa Madayin	KONSEPSI
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---	----------

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan : Kajian dan Analisis Kesenjangan regulasi, kebijakan, dan implementasi pembangunan desa tangguh bencana berbasis wilayah yang melibatkan pentahelix provinsi dan kabupaten di Kabupaten Lombok Utara	Output Kegiatan : Menyusun kerangka kebijakan dan mengeluarkan produk kertas kebijakan sebagai rekomendasi kepada pemerintah akan dilakukan oleh tenaga ahli Pembangunan Kawasan Regional atau antar kawasan.										KONSEPSI
Nama Kegiatan : Penyusunan kebijakan dan peraturan untuk memastikan replikasi pembelajaran pembangunan desa tangguh berbasis wilayah di Kabupaten Lombok Utara	Output Kegiatan : Terlegalisasinya peraturan bupati tentang panduan Desa Tangguh Berbasis Kawasan di Lombok Utara; adanya partisipasi pemangku kepentingan tingkat kabupaten; terlaksananya pertemuan kelompok kerja penyusunan peraturan bupati										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	10 orang x 3 pertemuan										
Nama Kegiatan : Dukungan untuk aksi relawan TSBD dalam kampanye kesadaran kesiapsiagaan bencana di komunitas pemuda pedesaan dan penyandang disabilitas	Output Kegiatan : Masing-masing 14 TSBD akan mendapatkan dukungan poster 30 lembar dan leaflet 150 lembar untuk mendukung kampanye relawan TSBD terkait PRB di desa dampingan; adanya dukungan teknis praktek kampanye relawan TSBD.										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan : Sosialisasi dan monitoring regulasi untuk memastikan desa berisiko bencana mereplikasi pembangunan desa tangguh berbasis wilayah di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara.	Output Kegiatan : Tersosialisasi a peraturan bupati tentang panduan kerjasama desa untuk PRB berbasis kawasan di 5 kecamatan di Lombok Utara; partisipasi perwakilan pemerintah desa masing-masing 30 orang x 1 hari; adanya kesepahaman tindak lanjut pemerintah desa untuk replikasi dan adopsi model kerjasama PRB antar desa.										KONSEPSI
Nama Kegiatan : Pelatihan keterampilan komunikasi dan media digital bagi relawan TSBD untuk melakukan kampanye kesadaran kesiapsiagaan bencana di komunitas	Output Kegiatan : Terlaksana bimbingan teknis 2 hari melibatkan 17 perwakilan relawan TSBD; tersusun rencana tindak lanjut rencana praktek kampanye dan edukasi PRB oleh relawan.										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
pemuda pedesaan.											
Nama Kegiatan : Mendukung BPBD Provinsi membangun model kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan BPBD Kabupaten terkait pencapaian standar pelayanan minimal dan sinkronisasi data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Lombok Utara	Output Kegiatan : Terlaksananya pertemuan koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD kabupaten Lombok Utara 4x 20 partisipan; tersusun SOP dan MoU detail koordinasi dan konsolidasi antar lembaga; tersusun detail SPM kebencanaan antara BPBD provinsi dengan BPBD dan Bappeda kabupaten.										KONSEPSI
Nama Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan pengarusutamaan PRB kepada aparat pemerintah desa	Output Kegiatan : Terlaksana 3 hari bimbingan teknis melibatkan 22 orang perwakilan 11 desa dampingan; tersusunnya komitmen tindak lanjut perangkat desa adopsi RKPDes										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	berperspektif PRB.										
Nama Kegiatan : Penyusunan Pedoman Praktis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa untuk memastikan bahwa rencana kerja pemerintah desa telah mengadopsi perspektif pengurangan risiko bencana di wilayah provinsi	Output Kegiatan : Terlaksananya pertemuan 3 kali melibatkan 10 orang anggota kelompok kerja penyusunan panduan di Mataram; tersusunnya panduan praktis perencanaan dan penganggaran desa berperspektif pengurangan risiko.										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan : Sosialisasi di tingkat kabupaten tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan perspektif PRB untuk dijadikan acuan dan diterapkan oleh pemerintah desa di 3 kabupaten	Output Kegiatan : Terlaksananya pertemuan sosialisasi Panduan Teknis Penyusunan RKPDDes berperspektif PRB selama 1 hari x 25 orang di 3 kabupaten; adanya kesepakatan tindak lanjut pemangku kepentingan untuk adopsi dan aplikasi panduan di tingkat desa.										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan : Menulis dan menerbitkan buku tematik tentang praktik-praktik baik aksi kolaboratif antar pemerintah desa dalam pengurangan risiko bencana berbasis wilayah	Output Kegiatan : Tercetak buku praktik baik atau success story pembelajaran proyek sebanyak 100 eks										KONSEPSI
Nama Kegiatan : Seri media briefing untuk kampanye kesiapsiagaan dan pendidikan tentang pembelajaran membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana.	Output Kegiatan : Terlaksana 5 kali kegiatan media brifing dan kegiatan kampanye media										KONSEPSI

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan : Pertemuan multi-stakeholder untuk mensosialisasi kan pencapaian hasil akhir proyek	Output Kegiatan : Terlaksana 1 hari pertemuan akhir proyek melibatkan partisipan 50 orang perwakilan multi stakeholder.										KONSEPSI
Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan											
INDIKATOR	2.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML									
	2.2.1*	Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)									
	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 tahun/baduta									
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia balita									
Nama Program	Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT)										

Kegiatan 2.1.1 : Coordination, Monitoring and Evaluation workshops (online)	Output Kegiatan : - Pentingnya bersinergi bersama dalam Implementasi PGBT di lapangan dan perlu memperkuat deteksi balita Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) di posyandu - pentingnya komitmen dan konsistensi mengatasi masalah gizi buruk dengan memastikan capaian :Persent ase stunting tahun 2023 menunjukkan bahwa KLU, Loteng dan Lotim melebihi target. Sedangkan sisa kab/kota lainnya masih dibawah target (16%). Rata-rata angka NTB yaitu 14.76% - Optimalisasi Input data melalui e- PPGBM tahun 2023 (Jan-Jun) menunjukkan bahwa Lombok Barat, Dompu, KSB, KLU telah		Juni 2023 - Maret 2024			3,850,000			UNICEF	Provinsi	SOBAT NTB
--	---	--	---------------------------	--	--	-----------	--	--	--------	----------	--------------

	mencapai 100%. Sedangkan Kab/kota lainnya entryannya belum 100%. Dengan angka paling rendah yaitu Lombok Tengan (93.87%) - Memastikan upaya semua Puskesmas untuk memastikan semua Puskesmas mampu tatalaksana Gizi buruk dan dapat mencapai target 61% di 2023 - Optimalisasi dan meningkatkan cakupan Penapisan status gizi balita dilakukan diposyandu termasuk pengukuran LiLA - Memastikan intervensi yang menyeluruh dan konsisten untuk mengurangi Wasting agar tercegah dari Stunting,									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.1.2 : Online IMAM Training (LJJ) in 10 districts	Output Kegiatan :		Juni 2023 - Maret 2024			22,620,000			UNICEF	Provinsi	SOBAT NTB
Kegiatan 2.1.3 : Joint Monitoring	Output Kegiatan :		Juni 2023 - Maret 2024			23,080,000			UNICEF	Sumbawa dan Lombok Timur	SOBAT NTB
Kegiatan 2.1.4 : IMAM Supervision at districts by IP	Output Kegiatan : 1. Adanya gambaran pelaksanaan PGBT, LiLA Keluarga dan tatalaksana wasting sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut pelatihan yang sudah diberikan 2. Terpetakannya dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga, posyandu dan puskesmas dalam pelaksanaan PGBT, implementasi LiLA keluarga dan tatalaksana wasating 3. Adanya penguatan dan komitmen bersama dalam		Juni 2023 - Maret 2024			6,023,910			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	upaya pencegahan dan pelaksanaan tatalaksana wasting dari tingkat keluarga, posyandu dan puskesmas										
Kegiatan 2.2.1 : Socialization of Early detection wasting and of IMAM workshop in 3 districts	Output Kegiatan : 1. Seluruh pemangku kepentingan terkait mendapatkan informasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan LiLA Keluarga dan Deteksi dini PAUD dalam upaya penguatan deteksi dini, rujukan dan perawatan balita wasting. 2. Adanya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencegahan, deteksi dini,		Juni 2023 - Maret 2024			33,585,000			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	rujukan dan perawatan balita wasting. 3.Adanya rencana tindak lanjut komitmen bersama pemangku kepentingan di tingkat kabupaten rujukan untuk implementasi, dan rencana keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan LiLA keluarga dan deteksi dini dan rujukan balita wasting di PAUD HI.										
Kegiatan 2.2.2 : Lesson learned workshop of Early detection wasting and CHVs support at Province level	Output Kegiatan : 1. Seluruh pemangku kepentingan terkait mendapatkan informasi tentang pembelajaran Pemodelan Kader Posyandu Peduli Wasting di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB		Juni 2023 - Maret 2024			53,000,000			UNICEF	Lombok Utara	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	2. Adanya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung Kader Posyandu Peduli Wasting. 3. Adanya rencana tindak lanjut komitmen bersama pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga desa sebagai rujukan untuk perluasan dan keberlanjutan Kader Posyandu Peduli Wasting di Kabupaten Lombok Utara dan di Provinsi NTB.										
Kegiatan 2.2.3 : IMAM orientation for Sumbawa District	Output Kegiatan : 1. Tersedianya informasi tentang faktor penyebab dan dampak gizi buruk pada balita 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan Tim Penggerak		Juni 2023 - Maret 2024			14,347,750			UNICEF	Sumbawa	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
PKK dalam mengelola dan implementasi program PGBT yang tepat waktu dan berkualitas 3. Adanya mekanisme pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rehabilitasi gizi buruk pada balita melalui rawat jalan dan rawat inap, dengan melibatkan peran serta aktif keluarga dan masyarakat 4. Meningkatkan komitmen, kesadaran dan kapasitas tenaga kesehatan dan masyarakat dalam upaya untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, pelaporan dan perawatan anak gizi buruk										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.2.4 : Cascade training for at 3 districts for early detection through Family MUAC and ECD support for IMAM	Output Kegiatan : 1. pemahaman dan kemampuan peserta tentang pentingnya dan peran pemberdayaan masyarakat khususnya melalui deteksi dini status gizi balita dengan menggunakan Pita LiLA , melakukan rujukan balita dengan status gizi kurang dan buruk (temuan Pita LiLA warna Kuning dan merah) dan perawatan balita wasting di posyandu . 2. pemahaman dan kemampuan peserta termasuk melatih peserta untuk melakukan deteksi dini status gizi balita dengan menggunakan Pita LiLA , melakukan rujukan balita		Juni 2023 - Maret 2024			15,625,000			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	dengan status gizi kurang dan buruk (temuan Pita LiLA warna Kuning dan merah) dan perawatan balita wasting di posyandu . 3. Melaksanakan pelatihan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa/dusun bagi tenaga Kesehatan dan dan Staf gizi, kader posyandu, orang tua/ pengasuh dan masyarakat serta implementasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.2.5 :Training to village health staff and CHVs (Kader) and refreshing training for Family MUAC	Output Kegiatan : 1. Adanya gambaran pelaksanaan LiLA Keluarga di posyandu Lokasi program 2. Terpetakannya tantangan dan peluang dalam implementasi LiLA Keluarga 3. Memperkuat komitmen Kader LiLA Keluarga dalam mobilisasi masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penemuan dini balita wasting		Juni 2023 - Maret 2024			19,996,000			UNICEF	Sumbawa	SOBAT NTB
Kegiatan 2.2.6 : Training to parents/caregivers at posyandu day for Family MUAC in 3 districts	Output Kegiatan :		Juni 2023 - Maret 2024			13,600,000			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.2.7 : Supportive supervision by province/ district/ Puskesmas	Output Kegiatan : 1. Adanya gambaran pelaksanaan PGBT, LiLA Keluarga dan tatalaksana wasting sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut pelatihan yang sudah diberikan 2. Terpetakannya dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga, posyandu dan puskesmas dalam pelaksanaan PGBT, implementasi LiLA keluarga dan tatalaksana wasating 3. Adanya penguatan dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pelaksanaan tatalaksana wasting dari tingkat keluarga, posyandu dan puskesmas		Juni 2023 - Maret 2024			5,960,000			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.2.8 : Supportive supervision in Lombok Island districts	Output Kegiatan : 1. Adanya gambaran pelaksanaan PGBT, LiLA Keluarga dan tatalaksana wasting sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut pelatihan yang sudah diberikan 2. Terpetakannya dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga, posyandu dan puskesmas dalam pelaksanaan PGBT, implementasi LiLA keluarga dan tatalaksana wasating 3. Adanya penguatan dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pelaksanaan tatalaksana wasting dari tingkat keluarga, posyandu dan puskesmas		Juni 2023 - Maret 2024			14,720,950			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.3.1 : Training for CVSs for supporting severely wasted treatment in Lombok Utara	Output Kegiatan : 1. Kader posyandu memiliki pengetahuan tentang peran kader dalam mendukung pencegahan dan tatalaksana wasting. 2. Kader posyandu memiliki keterampilan dalam melakukan deteksi dini, rujukan balita wasting dan memberikan dukungan bagi keluarga balita gizi buruk selama dan paska perawatan		Juni 2023 - Maret 2024			48,686,635			UNICEF	Lombok Utara	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.3.2 : Refreshing training and coordination meetings with CHVs in Lombok Utara	Output Kegiatan : 1.Adanya gambaran pelaksanaan tatalaksana wasting di posyandu dampingan, apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah pelatihan 2.Terpetakannya tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tatalaksana wasting serta dukungan yang dibutuhkan oleh kader posyandu 3.Adanya penguatan dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pelaksanaan tatalaksana wasting dari tingkat keluarga, posyandu dan puskesmas		Juni 2023 - Maret 2024			11,700,000			UNICEF	Lombok Utara	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Output Kegiatan Coordination (SS) 1. Untuk mendapatkan gambaran kegiatan kader dalam pelaksanaan promosi, edukasi dan konseling terkait pencegahan wasting dan perawatan balita gizi buruk kepada orang tua/pengasuh dan Masyarakat 2. Untuk mengetahui kapasitas kader dalam melakukan rujukan balita wasting ke puskesmas 3. Kader dapat mengidentifikasi penyebab dan faktor resiko balita wasting serta melakukan tindak lanjut sebagai salah satu materi diskusi padder kegiatan penyegaran kader		Juni 2023 - Maret 2024								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 2.4.1 : Training for Teachers	Output Kegiatan : 1. Anak usia 6-59 ditapis menggunakan pita LILA dan tanda-tanda dini wasting (termasuk edema/bengkak pada kedua punggung kaki) oleh guru PAUD dan keluarga secara rutin 2. Anak balita usia 6 – 59 bulan yang berisiko wasting (gizi kurang dan gizi buruk) dirujuk ke layanan Kesehatan 3.Orangtua/pen gasuh meningkat pengetahuan dan kesadaran terkait wasting		Juni 2023 - Maret 2024			20,600,000			UNICEF	Lombok Timur dan Lombok Utara	SOBAT NTB
Kegiatan 2.4.2 :Supportive supervision to ECD	Output Kegiatan :		Juni 2023 - Maret 2024			3,040,000			UNICEF DAN SOBAT NTB	Lombok Timur dan Lombok Utara	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Program : Aksi Bergizi											
Kegiatan 3.1.1 : Workshop to Strengthen Coordination and District Facilitator orientation of Aksi Bergizi at Province level	Output Kegiatan : a) Adanyakomitmen semua pihak dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan AKSI BERGIZI di sekolah/ madrasah melalui pelaksanaan trias UKS/ M b) Meningkatkan dan memperbaiki kualitas pencatatan dan pelaporan kepatuhan konsumsi TTD pada siswi, sekolah/ madrasah, PUSKESMAS, Kabupaten/ Kota, dan Provinsi c) Mengaktifkan dan meningkatkan pelaksanaan		Juni 2023 - Maret 2024			3,750,000			UNICEF	Provinsi	SOBAT NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	monitoring dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan konsumsi TTD oleh PUSKESMAS, Kabupaten/ Kota, dan Provinsi.										
Kegiatan 3.2.1 : Advocacy and Coordination Meeting at District level	Output Kegiatan :		Juni 2023 - Maret 2024			10,400,000			SOBAT NTB	Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa	SOBAT NTB
"											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 3.2.2 : Join Monitoring	Output Kegiatan : 1. Kegiatan Monitoring bersama ini dilakukan untuk Mendapatkan informasi implementasi setelah kegiatan orientasi gizi remaja dalam program sekolah/madrasah sehat. 2. Adanya rekomendasi bersama sebagai masukan perbaikan program sekolah/madrasah sehat kedepan.		Juni 2023 - Maret 2024			3,000,000			SOBAT NTB	Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara	SOBAT NTB

Kegiatan 3.3.1 : Orientasi of Aksi Bergizi at 7 District	Output Kegiatan : 1. Peserta mengetahui dan memahami tujuan, strategi dan langkah implementasi komponen gizi remaja Aksi Bergizi dalam program Sekolah/Madras ah Sehat 2. Adanya rencana tindak lanjut pelaksanaan Paket Aksi Bergizi secara lengkap pada program Sekolah/Madras ah Sehat tingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, dalam hal persiapan program(advoka si kebijakan, anggaran, fasilitas,kapasita s dan ketersediaan SDM),koordinasi lintas sektor, pembinaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program di kabupaten- kabupaten terpilih serta sekolah-sekolah		Juni 2023 - Maret 2024			99,648,485		UNICEF	Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa	SOBAT NTB
--	--	--	---------------------------	--	--	------------	--	--------	---	--------------

	model yang menjadi target program. 3. Meningkatkan kemampuan fasilitasi, partisipasi dan peran TP UKS/M tenaga kesehatan dan guru pembina UKS/M dalam implementasi Aksi Bergizi kepada siswa/i di sekolah/madrasah model. 4. Terjalin kerjasama dan kolaborasi semua pihak lintas sektor, agar TP UKS/M Kabupaten/dalam mendukung implementasi Aksi Bergizi di sekolah /madrasah model dan pencapaian stratifikasi UKS/M sesuai harapan pemerintah yaitu 70% sekolah/madrasah mencapai strata paripurna pada tahun 2024.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiatan 3.4.1 : Supervisi Fasilitatif at least 5 Schools Implement Aksi Bergizi Program			Juni 2023 - Maret 2024			7,600,000			UNICEF	Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur	SOBAT NTB
Nama Program : KESEHATAN											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1 Mengadakan Kelas Nutrisi bagi Anak Balita kurang gizi	1.1 Output Kegiatan : Jumlah Anak Balita yang terlibat dalam Kelas Nutrisi	Anak Balita	100			80.000.000	60	122	MH	Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan dan Desa Salut Kecamatan Kayangan	YASERA
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah anak Balita yang menerima PMT	Anak Balita	100				60	122			
	1.3 Output Kegiatan : Jumlah Anak Balita yang terlibat dan aktif di posyandu	Anak Balita	550				228	495			
Nama Kegiatan 2 Pelatihan Ibu dan Anak tentang PHBS dan Nutrisi	2.1 Output Kegiatan : Jumlah Ibu yang terlibat dalam pertemuan mingguan dan terlatih	Ibu	1100				425	945			
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah Anak dalam pelatihan	Anak	550				240	538			
INDIKATOR	2.1.2*	Parvelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan									
	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400kkal/kapita/hari									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Program : LIVELIHOOD											
Nama Kegiatan 1 Membentuk Kebun Gizi di Pekarangan Rumah Tangga	1.1 Output Kegiatan : Jumlah keluarga yang dilatih untuk pembentukan pekarangan rumah	Keluarga	1100			Rp 80.000.000,-	422	863	MH	Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan dan Desa Salut Kecamatan Kayangan	YASERA
	1.2 Output Kegiatan : Jumlah bibit dan alat yang diterima keluarga	Keluarga	1100				422	863			
	1.3 Output Kegiatan : Jumlah Kebun gizi dibentuk dipekarangan rumah	Kebun Pekarangan Rumah	1100				422	863			
Nama Kegiatan 2 Pembentukan Kelompok Menabung di setiap dusun	2.1 Output Kegiatan : Jumlah kelompok menabung terbentuk	Kelompok Menabung	30				22	33			
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah Keluarga yang aktif dan hadir dalam pertemuan menabung di setiap minggu	Keluarga	750				339	862			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	2.3 Output Kegiatan : Jumlah pengurus terlatih dan diberdayakan untuk mendampingi kelompok menabung	Pemimpin Kelompok	90				50	165			
Nama Kegiatan 3 Pembentukan usaha kecil dari pemanfaatan kelompok tabungan	3.1 Output Kegiatan : Jumlah keluarga yang terlibat pelatihan mengelola keuangan dan pengembangan usaha kecil	Keluarga	650				285	626			
	3.2 Output Kegiatan : Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha kecil (Kebun komersil dan usaha lainnya)	Keluarga	700				285	612			
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan / P AML									
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan/P LSL									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1 Strengthening Enabling Environment for Elimination Open Defecation, WASH in Institutions and Safely Managed Sanitation (SMS) in Nusa Tenggara Barat Province	1.1 Output Kegiatan : Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk mempercepat pencapaian penerapan sanitasi yang dikelola secara aman di wilayahnya.	Pokja PPAS/AMPL Kabupaten kota	1. Pokja PPAS NTB, 10 Pokja PKP Kabupaten Kota, 20 kelompok wusan, petugas pasar dan operator dan regulator WASH			Rp 789.000.200,-			Unicef	Prpinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok timur	Mitra Samya
	1.2 Output Kegiatan : Pemerintah NTB dan kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk memfasilitasi implementasi WASH dan MKM di institusi untuk mempercepat dan mempertahankan ODF di wilayahnya.	Pokja PPAS/AMPL Kabupaten kota	1. Pokja PPAS NTB, 10 Pokja PKP Kabupaten Kota, petugas pasar dan operator dan regulator WASH			Rp740.000. 120,-			Unicef	Prpinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok timur	Mitra Samya

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	1.3 Output Kegiatan : Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten terpilih memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan WASH dalam Ketahanan Iklim	Pokja PPAS/AMPL Kabupaten kota	1. Pokja PPAS NTB, 10 Pokja PKP Kabupaten Kota, 20 kelompok wusan, petugas pasar dan operator dan regulator WASH			Rp 300.421.000,-			Unicef	Prpinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok timur	Mitra Samya
INDIKATOR	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk									
Nama Program 1 (11) :	Program eliminasi TBC di Lombok Barat										
Reward Pendampingan Pasien TBC SO dan TPT (Reward for monthly treatment supporter for index and household contact)	1.1 Output Kegiatan : 1. Kepatuhan pasien TBC SO setiap bulan dalam minum obat terdokumentasi di formulir B. 2. Kesiediaan mendapatkan TPT atau kepatuhan TPT pada kontak serumah terdokumentasi di formulir C.	Kali	240			21.144.665	120	120	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.2 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Investigasi kontak (Investigation for household contact for index cases at public provider)	2.1 Output Kegiatan : 1. Dokumen pemetaan beban kasus setiap 2 minggu dan ketersediaan kader di setiap Fasilitas Kesehatan (Indikator Input) 2. Jumlah indeks kasus yang sudah dan belum dilakukan investigasi kontak oleh kader berdasarkan Fasyankes setiap 2 minggu 3. Jumlah kontak serumah yang dikunjungi oleh kader untuk di edukasi, skrining dan rujukan. 4. Jumlah kontak serumah yang datang periksa ke fasilitas kesehatan	Kali	424			36.612.548	212	212	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.3 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kunjungan Ulang (Re-Visit) Kontak Serumah (Revisit for contacts who are missed or need to follow up to come to health facilities)	3.1 Output Kegiatan : Jumlah kontak serumah yang datang ke Puskesmas pasca Re-Visit IK	Kali	196			2.192.939	98	98	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.4 Output Kegiatan :										
Reward Kader Komunitas untuk Terduga TBC (Reward for CHW/community outreach to refer the HHC with TB presumptive tested for TB examination)	4.1 Output Kegiatan : Reward kader terbayarkan oleh SSR sesuai data yang telah diverifikasi.	Kali	1816			28.571.823	908	908	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.5 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Reward Kader untuk Penemuan Kasus TBC Rujukan Komunitas (Reward for CHW/community outreach for TB notification cases)	5.1 Output Kegiatan : Dlbayarkannya reward untuk kader dan/atau PS untuk menemukan kasus baru positif TBC yang sudah diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku.	Kali	240			10.068.888	120	120	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.6 Output Kegiatan :										
Community Outreach (d/h Penyuluhan)	6.1 Output Kegiatan : Dlbayarkannya reward untuk kader dan/atau PS untuk menemukan kasus baru positif TBC yang sudah diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku.	Kali	256			60.067.462	128	128	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.7 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Insentif Pendampingan Pasien TBC RO Sejak Terdiagnosis (Incentive for cadre treatment supporter for DRTB) oleh Patient Supporter	7.1 Output Kegiatan : Terlaksananya pendampingan rutin untuk seluruh pasien terdiagnosis TBC RO di seluruh wilayah kerja PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI sejak Januari 2024 dan pasien periode sebelumnya.	Kali	20			4.029.747	10	10	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	1.8 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pertemuan dukungan Pasien TBC RO (Group peer discussion for sharing experiences and provide motivation for DRTB patient conduct regularly in health facilities)	8.1 Output Kegiatan : 1. Terdapat data dan informasi perkembangan kemajuan pendampingan, pelacakan pasien yang belum memulai pengobatan dan mangkir pengobatan, pembayaran enabler, implementasi TB Army dan Lapor TBC di wilayah kerja komunitas 2. Adanya rencana tindak lanjut dan strategi penguatan implementasi dukungan psikososial oleh kolaborasi multipihak yang berorientasi pada kebutuhan pasien TBC RO. 3. Pasien TBC RO dan keluarga menerima penguatan dukungan berupa informasi,	Kali	2			2.640.000	1	1	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
edukasi dan motivasi melalui pelaksanaan diskusi kelompok sebaya di faskes TBC RO bersama Tim Pendamping Komunitas dan OPT										
1.9 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Koordinasi Komunitas tingkat Kabupaten/Kota (Coordination meeting in sub-district level between district TB programmer, health facilities and stakeholders related led by community to develop startegic for TB control).	9.1 Output Kegiatan : 1. Adanya laporan naratif hasil pertemuan koordinasi antara pelaksana program TBC Penabulu-STPI, Puskesmas, RS PMDT, dan pemangku kepentingan kecamatan 2. Adanya daftar indeks kasus yang eligible untuk sasaran pelaksanaan investigasi kontak oleh kader 3. Adanya data pasien TBC RO per Januari 2024 yang eligible untuk sasaran pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pemberian enabler sejak terdiagnosis 4. Adanya strategi dan rencana tindak lanjut bersama antara Dinas Kesehatan, pemangku	Kali	1			7.650.000	1	-	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	kepentingan kecamatan, Puskesmas, SSR/IU, Koordinator Kader dan Manajer Kasus.										
	2.1 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Validasi Data dan Koordinasi antara Komunitas dan Layanan Kesehatan (Community and health services data validation quarterly meeting for TB program)	2.1 Output Kegiatan : 1. Adanya lembar sinkronisasi/validasi data antara hasil kontribusi komunitas dengan data yang ada di Fasyankes/Dinas Kesehatan disepakati bersama. 2. Adanya daftar inventaris masalah yang ditemukan dari hasil pertemuan. 3. Adanya strategi dan rencana tindak lanjut beserta timeline bersama antara tim SSR/IU, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kader.	Kali	8			39.816.000	4	4	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
	2.2 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pelatihan Penyegaran Kader TBC Komunitas (Refreshment community cadre for updating contact investigation)	2.2 Output Kegiatan : 1. Memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kader dalam upaya penanggulangan TBC agar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru kepada masyarakat 2. Hasil post-test peserta pelatihan minimal mencapai 80%, jika dibawah 80% SSR akan memberikan pendampingan/coaching kepada yang bersangkutan 3. Tersedianya kader yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kader dalam upaya penanggulangan TBC di seluruh Puskesmas setiap kabupaten/kota.	Kali	1			27.386.000	1	-	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
4. Tersedianya kader sebagai PS yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kader dalam upaya penanggulangan TBC di seluruh Puskesmas Inisiasi setiap kabupaten/kota. 5. Terdaftar nya seluruh kader di Puskesmas dan diberikan surat tugas.										
2.3 Output Kegiatan :										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tingkat Kabupaten/Kota (Commemoration of World Tuberculosis Day and National Health Day by Community TB SSR)	2.3 Output Kegiatan : Terselenggaranya kegiatan perayaan TB Day tingkat Kab/Kota.	Kali	1			2.750.000	1	-	Global fund	Lombok Barat	SSR InSPIRASI Lombok Barat
Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas											
INDIKATOR	4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun									
Dukungan Penguatan Kurikulum Merdeka Basis Literasi dan Pencegahan Perkawinan Anak	Tujuan: Menguatkan kesiapan madrasah sasaran dan ekosistem pendukung dalam Implementasi Kurikulum Merdeka	SD/MI	40 MI			639.567.318,00	April-Jun	Juli-Oktober	DFAT (Department of Foreign Affairs And Trading) sebagai Perwakilan Persemakmuran Australia	Kabupaten Lombok Timur	Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Implementasi Kurikulum Merdeka Literasi Dasar dan Pendidikan Inklusif – Disabilitas	Tujuan: Memperkuat kesiapan madrasah sasaran dan ekosistem pendukung dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Literasi dasar dan Pendidikan Inklusif Disabilitas	SD/MI	30 SD			636.119.210.	Maret-Juni	Juli-Oktober	DFAT (Department of Foreign Affairs And Trading) sebagai Perwakilan Persemakmuran Australia	Kabupaten Lombok Timur	Universitas Hamzanwadi
Semua Anak Cerdas dengan Kurikulum Merdeka	Tujuan: Membangun kesiapan guru dan ekosistem pendukung pendidikan di sekolah/madrasah yang di dalamnya terdapat banyak siswa dengan kerentanan akses dan partisipasi dalam pembelajaran.	SD/MI	30 SD/MI			494.792.101	Maret-Juni	Juli-September	Persemakmuran Australia diwakili oleh Departemen Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT)	Kabupaten Lombok Tengah	FKIP - Universitas Mataram
Dukungan Penguatan Sistem dan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di NTB	Memperkuat Sistem dan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di NTB	Komunitas	SD/MI			900.000.000,00	Januari-Juni	Juli-Des	Persemakmuran Australia diwakili oleh Departemen Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT)	Provinsi NTB	Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pengembangan bahan bacaan anak dengan ilustrasi	Penguatan Kapasitas guru dan relawan dalam pembuatan bahan bacaan anak dengan ilustrasi	SD/MI/Komunitas	50 SD/MI/Komunitas			50.000.000,00	Februari, Juni	Agustus	Persemakmuran Australia diwakili oleh Departemen Perdagangan dan Luar Negeri (DFAT)	Provinsi NTB	Konsorsium NTB Membaca
Tujuan 5.Kesetaraan Gender											
INDIKATOR	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.									
Prgram 1.											
Nama Kegiatan 1 (12): Diskusi Rutin Isu-isu Gender dan Anak	Output Kegiatan: Laporan Kegiatan	6 Kegiatan	2023			Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)	3	3	DIPA UIN Mataram 2023	Kampus II UIN Mataram	PSGA UIN Mataram
Nama Kegiatan 3: Pelatihan Dan Pendampingan Desa Ramah Perempuan di Lombok Barat	Output Kegiatan: Laporan Kegiatan	5 Kegiatan	2023			Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)	2	3	DIPA UIN Mataram 2023	2 Desa di Kab. Lombok Barat	PSGA UIN Mataram
Nama Kegiatan 6: Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa Baru 2023	Output Kegiatan: Laporan Kegiatan	1 Kegiatan	2023			Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)		1	DIPA UIN Mataram 2023	Kampus II UIN Mataram	PSGA UIN Mataram

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 7: Dialog Antar Generasi: Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pernikahan Anak bersama KUPI, DP3A Kota Mataram dan Duta Genre NTB	Output Kegiatan: Laporan Kegiatan	1 Kegiatan	2023			Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)		1	DIPA UIN Mataram 2023	Kampus II UIN Mataram	PSGA UIN Mataram
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak											
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 7.Energi Bersih dan Terjangkau											
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur											
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 10.Berkurangnya Kesenjangan											
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 11.Kota dan Pemukiman Berkelanjutan											
INDIKATOR											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program 1.											
Kegiatan 2.											
Tujuan 12.Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
INDIKATOR											
Program 1.											
Kegiatan 2.											
Tujuan 13.Penanganan Perubahan Iklim											
INDIKATOR		13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)								
Nama Program 1 : Meningkatkan Ketahanan melalui Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana di Nusa Tenggara (Increasing Resiliency through Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in Nusa Tenggara project /INCIDENT)											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tujuan 1: Masyarakat rentan di kabupaten sasaran secara efektif mempersiapkan dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan bencana melalui praktik pertanian yang lebih baik	Jumlah individu (penerima manfaat yaitu PPL, staf LSM, petani plus anggota keluarganya) yang telah menerapkan praktik atau teknologi manajemen yang lebih baik (PCH-teknologi pertanian cerdas iklim) dengan bantuan INCIDENT			994,9	994,9	567.561.750,00	0	994,9	World Neighbors	A. Tingkat Daerah: Kabupaten Lombok Timur B. Tingkat Desa: B.1. Desa Program, berlokasi di 8 desa: 1. Desa Perian, Kec. Montong Gading 2. Desa Montong Betok Kec. Montong Gading 3. Desa Jurit, Kec. Pringgasele 4. Desa Sugian, Kec. Sambelia 5. Desa Dara Kunci Kec. Sambelia 6. Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya 7. Desa Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya 8. Desa Sapit, Kec. Suela B.2. Desa Non	Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra
Sub-Tujuan 1.1: Petani mengadopsi sistem produksi yang beragam dan tahan iklim di desa-desa sasaran	Jumlah hektar dalam praktik atau teknologi pengelolaan (adopsi PCH) yang ditingkatkan dengan bantuan INCIDENT			315,675	315,675		0	315,675			
Sub-Tujuan 1.2: Petani meningkatkan sistem pengendalian hama mereka	Jumlah hektar yang dilindungi dari serangan penyakit atau hama			10,596	10,596		0	10,596			
	Persentase hektar yang dilindungi dari serangan penyakit			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 1.1.1: Penyuluh dan LSM/CBO dilatih dalam teknologi pertanian cerdas iklim dan praktik pertanian berkelanjutan	Jumlah individu (penerima manfaat) yang secara langsung memperoleh manfaat dari peningkatan produksi pertanian (adopsi PCH)			56	56		0	56		Program: Berlokasi di 50 Desa di Kabupaten Lombok Timur. Note: Desa Non Program juga mendapatkan intervensi program dalam beberapa kegiatan.	
1. Melakukan pelatihan teknis bagi penyuluh tentang alat pertanian cerdas iklim dan pertanian konservasi	Jumlah individu mengikuti pelatihan teknis bagi penyuluh (PPL) tentang alat pertanian cerdas iklim dan pertanian konservasi			53	53		53	0			
	Jumlah PPL yang mampu dan kontinue fasilitasi PCH (alat pertanian cerdas iklim) bagi petani			44	44		0	44			
	Jumlah staf mitra yang mampu dan kontinu fasilitasi PCH			5	5		0	5			
	Persentase rumah tangga yang menilai layanan dari penyuluhan pertanian (PPL) efektif			0,9	0,9		0	2,7			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 1.1.2: Kelompok tani memiliki pengetahuan yang meningkat dalam teknologi pertanian cerdas iklim dan praktik pertanian berkelanjutan	Jumlah individu (penerima manfaat yaitu petani/masyarakat) yang secara langsung memperoleh manfaat dari peningkatan produksi pertanian - akses alat pertanian cerdas iklim (PCH) dan pertanian berkelanjutan			5365,7	5365,7		0	5365,7			
Output 1.2.1: Petani dilatih dalam pendekatan yang efektif dan peka terhadap lingkungan untuk pengelolaan hama	Jumlah individu (penerima manfaat) yang terlatih dalam praktik perlindungan tanaman (IPM) yang sesuai			465,5625	465,5625		146,8875	318,675			
Output 1.2.1: Petani dilatih dalam pendekatan yang efektif dan peka terhadap lingkungan untuk pengelolaan hama	Jumlah individu (penerima manfaat) yang terlatih dalam praktik perlindungan tanaman (IPM) yang sesuai			349,171875	349,171875		110,165625	239,00625			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Persentase individu (penerima manfaat) yang menerima pelatihan yang mempraktikkan prosedur perlindungan tanaman (IPM) yang sesuai			0,75	0,75		2,25	6,75			
Melakukan pelatihan serta pendampingan dan pemantauan berkelanjutan oleh penyuluh mengenai alat pertanian cerdas iklim	Jumlah individu (petani/masyarakat) mengikuti pelatihan dan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan dari penyuluh (PPL) mengenai alat pertanian cerdas iklim (PCH) di desa dampingan PPL (desa program dan non program)			960	960		0	960			
1. Melakukan pelatihan serta pendampingan dan pemantauan berkelanjutan oleh penyuluh mengenai alat pertanian cerdas iklim	Jumlah individu (petani/masyarakat) mengikuti pelatihan dari penyuluh (PPL) mengenai alat pertanian cerdas iklim (PCH) di desa dampingan PPL (desa dampingan mitra)			240	240		0	240			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah individu (petani/masyarakat) mengikuti pelatihan dari penyuluh (PPL) mengenai alat pertanian cerdas iklim (PCH) di desa dampingan PPL (desa non sasaran program mitra)			720	720		0	720			
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan berkelanjutan oleh mitra lokal mengenai alat pertanian cerdas iklim				0	0		0	0			
2. Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan berkelanjutan oleh partner lokal mengenai alat pertanian cerdas iklim	Jumlah individu (petani/masyarakat) mengikuti pelatihan dan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan dari partner lokal (staf mitra/LSM) mengenai alat pertanian cerdas iklim (PCH) di desa dampingan mitra			809,9	809,9		0	809,9			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Melakukan pelatihan untuk petani kader oleh mitra lokal mengenai alat pertanian cerdas iklim	Jumlah individu (petani kader) mengikuti pelatihan dari partner lokal (staf mitra/LSM) mengenai alat pertanian cerdas iklim (PCH) di desa dampingan mitra			0	0		0	0			
Melakukan pelatihan untuk petani oleh petani kader mengenai alat pertanian cerdas iklim	Jumlah individu (petani/masyarakat) mengikuti pelatihan dari petani kader mengenai alat pertanian cerdas iklim (PCH) di desa dampingan mitra			0	0		0	0			
Seleksi Varietas Partisipatif (PVS-participatory varietal selection) untuk mengidentifikasi kebutuhan petani mengenai pangan lokal	Jumlah orang yang terlibat dalam survey (diskusi FGD) jenis tanaman pangan lokal yang dibutuhkan masyarakat			0	0		0	0			
	Jenis tanaman pangan lokal yang dibutuhkan masyarakat/peta ni setiap kabupaten			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Survey untuk mengkalkulasi kan jumlah benih dan bibit yang dibutuhkan	Jumlah orang yang terlibat dalam survey penghitungan jumlah benih tanaman pangan + sayur dan bibit TUP yang dibutuhkan masyarakat setiap kabupaten			0	0		0	0			
	Jumlah benih tanaman pangan dan bibit TUP yang dibutuhkan petani setiap kabupaten			0	0		0	0			
Survey untuk mengidentifika si kebutuhan pupuk	Jumlah orang yang terlibat dalam survey (diskusi FGD) ketersediaan kotoran ternak dan kebutuhan pupuk organik			0	0		0	0			
	Jumlah pupuk organik yang dibutuhkan petani			0	0		0	0			
3. Melakukan pelatihan dan pendampinga n serta monitoring berkelanjutan di bidang pertanian konservasi, termasuk IPM	Melakukan pelatihan dan pendampingan serta monitoring berkelanjutan di bidang pertanian konservasi, termasuk IPM			20	20		10	10			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Melakukan pelatihan di bidang pertanian konservasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pertanian konservasi (termasuk IPM)			239	239		119,5	119,5			
Melakukan pelatihan di bidang IPM pertanian konservasi (teori/konsep IPM, praktek meramu pestisida nabati, dan praktek menggunakan pestisida nabati)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan IPM untuk pertanian konservasi			179,25	179,25		35,85	143,4			
	Praktek pembuatan pupuk kompos/bokashi			0	0		0	0			
Melakukan pendampingan dan monitoring berkelanjutan di bidang pertanian konservasi	Jumlah orang yang telah mengadopsi/praktik pertanian konservasi (termasuk praktik IPM)			344,7625	344,7625		47,8	296,9625			
	Jumlah hektar lahan yang menerapkan praktik pertanian konservasi (termasuk IPM)			13,3905	13,3905		1,434	11,9565			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Praktek pembuatan pestisida nabati/herbal			0	0		0	0			
Melakukan pendampingan dan monitoring berkelanjutan di praktik/adopsi IPM dalam bidang pertanian konservasi	Jumlah orang yang telah mengadopsi/praktik IPM dalam pertanian konservasi			143,4	143,4		35,85	107,55			
	Jumlah hektar lahan yang menerapkan praktik IPM dalam pertanian konservasi			4,302	4,302		0	4,302			
4. Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan berkelanjutan mengenai produksi tanaman pangan lokal, termasuk IPM	Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan berkelanjutan mengenai produksi tanaman pangan lokal, termasuk IPM			20	20		10	10			
	Pengujian kualitas benih dan pengadaan benih tanaman pangan lokal			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Melakukan pelatihan mengenai produksi tanaman pangan lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan tanaman pangan lokal			435,5	435,5		67,5	368			
Melakukan pelatihan IPM mengenai produksi tanaman pangan lokal (teori/konsep IPM, praktek meramu pestisida nabati, dan praktek menggunakan pestisida nabati)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan IPM untuk budidaya tanaman pangan			202,5	202,5		40,5	162			
Melakukan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan mengenai produksi tanaman pangan lokal	Jumlah orang yang telah mengembangkan tanaman pangan lokal			381,5	381,5		43,2	338,3			
	Jumlah hektar lahan pengembangan tanaman pangan lokal (termasuk praktik IPM)			14,04	14,04		1,296	12,744			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Praktek pembuatan pestisida nabati/herbal			0	0		0	0			
Melakukan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan mengenai praktik/adopsi IPM dalam produksi tanaman pangan lokal	Jumlah orang yang telah mengembangkan/adopsi IPM dalam budidaya tanaman pangan lokal			162	162		0	162			
	Jumlah hektar lahan menerapkan IPM dalam pengembangan tanaman pangan lokal			4,86	4,86		0	4,86			
5. Melakukan pelatihan dan pendampingan serta monitoring berkelanjutan mengenai budidaya sayuran (kelompok tani perempuan), termasuk IPM	Melakukan pelatihan dan pendampingan serta monitoring berkelanjutan mengenai budidaya sayuran, termasuk IPM oleh kelompok wanita tani/kelompok UBSP)			40	40		20	20			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Melakukan pelatihan mengenai budidaya sayuran (kelompok tani perempuan/Ke I UBSP)	Jumlah orang perempuan yang dilatih budidaya tanaman sayur-sayuran termasuk IPM			345,4	345,4		146,1	199,3			
Melakukan pelatihan mengenai IPM budidaya sayuran (kelompok tani perempuan/Ke I UBSP)(teori/konsep IPM, praktek meramu pestisida nabati, dan praktek menggunakan pestisida nabati)	Jumlah orang perempuan yang dilatih IPM dalam budidaya tanaman sayur-sayuran			179,25	179,25		89,625	89,625			
Melakukan pendampingan dan monitoring berkelanjutan mengenai budidaya sayuran (kelompok tani perempuan/Ke I UBSP)	Jumlah orang perempuan yang telah mengembangkan tanaman sayur-sayuran termasuk IPM			297,6	297,6		132,84	164,76			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah hektar lahan yang telah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman sayur-sayuran termasuk praktik IPM			3,356	3,356		0,4021	2,9539			
Melakukan pendampingan dan monitoring berkelanjutan mengenai praktik/adopsi IPM dalam budidaya sayuran (kelompok tani perempuan/Ke I UBSP)	Jumlah orang perempuan yang telah menerapkan/adopsi IPM dalam budidaya tanaman sayur-sayuran			143,4	143,4		0	143,4			
	Jumlah hektar lahan yang telah diterapkan/praktik IPM dalam budidaya tanaman sayur-sayuran			1,434	1,434		0	1,434			
6. Melakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta pemantauan mengenai perencanaan pertanian agroforestry	Melakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta pemantauan dalam perencanaan pertanian agroforestry			6	6		6	6			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perencanaan kebun agroforestry			300	300		189	111			
	Jumlah orang yang membuat kebun agroforestry di lahannya sendiri			448,74	448,74		183	265,74			
	Jumlah hektar lahan di kebunnya yang telah dikelola dengan model agroforstry			57,4082	57,4082		16,43	40,9782			
	Jumlah TUP yang telah ditanam di kebun model agroforestrynya			19568,087	19568,087		6060,4	13507,687			
7. Membantu kelompok tani untuk mengembangkan demplot pada setiap topik yang telah dilatihkan di desa binaan melalui metode sekolah lapangan	Jumlah individu/demplot yang dibantu untuk mengembangkan demplot pada setiap topik yang telah dilatihkan : 1) demplot pertanian konservasi; 2) demplot tanaman pangan lokal; 3) demplot tanaman sayur-sayuran; 4) demplot kebun agroforestry			40	40		22	18			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah demplot (kebun pembelajaran) pertanian konservasi termasuk praktik IPM			8	8		0	8			
	Jumlah demplot (kebun pembelajaran) budidaya tanaman pangan lokal termasuk praktik IPM			8	8		0	8			
	Jumlah demplot (kebun pembelajaran) tanaman sayur-sayuran termasuk praktik IPM			8	8		0	8			
	Jumlah demplot kebun adopsi PCH vs Non PCH			16	16		0	16			
	Jumlah demplot kebun agroforestry			8	8		0	8			
8. Memfasilitasi keterlibatan kelompok tani dan demplot dengan lembaga berbasis masyarakat	Jumlah individu kelompok tani yang difasilitasi keterlibatannya dengan lembaga berbasis masyarakat (kelompok tani) dan pemerintah (Bupati,			55	55		22	33			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
dan pemerintah	Bappeda, OPD, DPRD, Camat, PPL, Pemdes, dll)										
9. Memantau adopsi alat agrometeorologi oleh petani	Jumlah individu petani yang mengakses alat agrometeorologi (alat pertanian cerdas iklim/PCH) telah mengadopsinya di desa dampingan mitra dan non dampingan mitra yang difasilitasi PPL			672	672		0	672			
	Jumlah individu yang mendapat akses PCH telah mengadopsinya di desa dampingan mitra yg difasilitasi PPL)			168	168		0	168			
	Jumlah individu yang mendapat akses PCH telah mengadopsinya di desa dampingan PPL (non desa mitra)			504	504		0	504			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah individu yang mendapat akses PCH telah mengadopsinya di desa dampingan mitra			646,425	646,425		0	646,425			
	Jumlah hektar adopsi PCH di desa dampingan mitra difasilitasi PPL			28,56	28,56		0	28,56			
	Jumlah hektar adopsi PCH di desa dampingan PPL			151,2	151,2		0	151,2			
	Jumlah hektar adopsi PCH di desa dampingan mitra			135,915	135,915		0	135,915			
10. Survei hasil tanaman pangan (CA, tanaman pangan lokal, adopsi curah hujan), bulan ketahanan pangan, dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan	Jumlah survey yang dilakukan oleh mitra : 1) hasil panen (padi, jagung) adopsi PCH vs non adopsi PCH; 2) hasil panen pertanian konservasi (CA); 3) hasil panen tanaman pangan lokal; 4) bulan kecukupan/ketahanan pangan; 5) pendapatan keluarga			32	32		6,4	25,6			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Pengukuran hasil panen demplot : 1) adopsi PCH vs no PCH; 2) pertanian konservasi; 3) pangan lokal; 4) sayur-sayuran			4	4		2	2			
	Jumlah dokumen hasil survey yang dihasilkan			8	8		2	6			
Output 1.1.3: Pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dan masyarakat meningkat dalam NRM	Jumlah individu (penerima manfaat) yang secara langsung memperoleh manfaat dari peningkatan produksi pertanian			72	72		36	36			
1. Mengorganisir kelompok tani dan kelompok NRM	Jumlah individu dalam kelompok tani atau kelompok NRM yang diorganisir (orang)			150	150		150	0			
	Jumlah kelompok tani/NRM yang diorganisir (kelompok)			5	5		5	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
2. Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan berkelanjutan tentang sistem tata guna lahan berkelanjutan dan manajemen kebakaran				0	0		0	0			
	Jumlah individu mengikuti pelatihan tentang sistem tata guna lahan berkelanjutan dan manajemen kebakaran			90	90		0	90			
Melakukan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan tentang sistem tata guna lahan berkelanjutan dan manajemen kebakaran	Jumlah orang telah mempraktikkan sistem tata guna lahan berkelanjutan (tidak lagi tebas bakar) dan manajemen kebakaran (kebun tidak lagi terbakar)			72	72		0	72			
	Jumlah hektar lahan kebun yang telah diterapkan sistem tata guna lahan berkelanjutan			7,2	7,2		0	7,2			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	dan manajemen kebakaran										
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta pemantauan teknologi DAS mikro (termasuk terasering, perangkap air, lubang resapan air hujan, pagar, dll)				0	0		0	0			
	Jumlah individu mengikuti pelatihan teknologi DAS mikro (termasuk terasering, perangkap air, lubang resapan air hujan, pagar, dll)			90	90		0	90			
Melakukan pendampingan berkelanjutan dan pemantauan teknologi DAS mikro (termasuk terasering,	Jumlah orang yang telah menerapkan teknologi DAS mikro di lahan kebunnya sendiri			72	72		0	72			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
perangkap air, lubang resapan air hujan, pagar, dll) -											
	Jumlah hektar lahan kebun yang telah diterapkan teknologi DAS mikro			7,2	7,2		0	7,2			
4. Memfasilitasi petani dan kelompok NRM untuk mengakses bibit tanaman tahunan dari instansi pemerintah terkait dan sektor swasta	Jumlah bibit tanaman tahunan dari instansi pemerintah dan sektor swasta yang dapat diakses petani			0	0		0	0			
	Jumlah individu yang difasilitasi akses bibit tanaman tahunan dari instansi pemerintah terkait dan sektor swasta			30	30		16	14			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah kelompok tani/NRM yang mendapat akses bibit tanaman tahunan dari instansi pemerintah terkait dan sektor swasta			11	11		5,75	5,25			
5. Memfasilitasi pemetaan kawasan konservasi oleh masyarakat	Jumlah area (hektar) dan peta (unit) kawasan konservasi			0	0		0	0			
6. Mengembangkan rencana konservasi NRM masyarakat (termasuk pagar, irigasi tetes, terasering, perangkap air, lubang resapan air hujan, penanggulangan kebakaran, penanaman anakan)	Jumlah rencana konservasi NRM masyarakat yang dikembangkan			5	5		5	0			
	Jumlah area lahan (hektar) yang ditentukan untuk pelaksanaan			9	9		6	6			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	rencana konservasi										
	Jumlah TUP yang telah ditanam di area lahan konservasi (pohon)			8851	8851		4425,5	4425,5			
	Jenis dan jumlah teknologi DAS mikro yang telah diterapkan di area lahan konservasi SMA			3	3		0	3			
	Jumlah orang/petani (anggota kelompok NRM dan masyarakat setempat) yang terlibat dalam konservasi SMA di wilayah mereka			305	305		140	165			
7. Pemantauan agroforestry dan kawasan konservasi	Jumlah area yang dilakukan pemantauan agroforestry dan kawasan konservasi SMA			8	8		0	16			
	Jumlah Pemantauan TUP hidup di kebun agroforestry (pohon)			13697,6609	13697,6609		0	24102,5218			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah area SMA yang dilakukan pemantauan kawasan (lokasi) konservasi SMA			5	5		0	5			
	Jumlah Pemantauan TUP hidup di area lahan konservasi SMA (pohon)			9107,7	9107,7		0	16202,55			
	Pengukuran debit air di setiap lokasi SMA yang telah dikonservasi			2	2		2	2			
	Jumlah laporan pemantauan yang dihasilkan			3,5	3,5		0	14			
8. Pertukaran kelompok tani untuk berbagi praktik terbaik	Jumlah kelompok tani telah berbagi praktik terbaik			8	8		0	8			
	Jumlah individu mengikuti pertukaran/kunjungan belajar			21	21		0	21			
	Frekuensi pertukaran/kunjungan belajar berbagi praktik terbaik			0,5	0,5		0	2			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 1.1.4: Kelompok tani memiliki akses ke input pertanian yang lebih baik	Jumlah rumah tangga penerima manfaat yang menggunakan praktik penyimpanan pascapanen (benih tanaman pangan) yang lebih baik			76	76		38	38			
1. Melakukan pelatihan bagi petani tentang pemilihan, penyiapan, dan penyimpanan benih	Jumlah individu/KK mengikuti pelatihan tentang pemilihan, persiapan-pengeringan, dan penyimpanan benih tanaman pangan			95	95		57	38			
	Jumlah orang/KK yang telah menerapkan/praktik pemilihan, persiapan-pengeringan dan penyimpanan benih tanaman pangan			76	76		41,8	34,2			
	Jenis dan jumlah (Kg) benih tanaman pangan telah disimpan sesuai dengan petunjuk teknis			204,04	204,04		102,02	102,02			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Mendistribusikan alat penyimpanan benih kepada petani yang melakukan penyimpanan	Jumlah individu yang menerima alat penyimpanan benih dari program INCIDENT			76	76		45,6	30,4			
2. Berbagi informasi dengan petani tentang varietas benih dan pilihan akses	Jumlah individu/KK yang mendapat informasi tentang varietas benih dan pilihan akses ke pihak penyedia benih tanaman pangan			25	25		0	25			
3. Mempromosikan kemitraan dengan organisasi publik, swasta dan koperasi yang relevan, pertanian dan pembibitan untuk pasokan bahan tanam berkualitas	Jumlah individu/KK yang mendapat dukungan kemitraan dengan organisasi publik, swasta dan koperasi yang relevan, pertanian untuk pasokan tanam yang berkualitas			17,5	17,5		0	17,5			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tujuan 2: Pada tahun 2024, masyarakat, otoritas pemerintah daerah (OPD), LSM/Ormas dan pemangku kepentingan utama lainnya di kabupaten sasaran secara efektif mempersiapkan, memitigasi dan beradaptasi dengan risiko bencana & iklim	Jumlah individu (penerima manfaat) dari masyarakat, perwakilan OPD dan staf LSM/Ormas yang melaporkan kemampuan mereka untuk kesiapsiagaan, beradaptasi dan memitigasi dengan risiko iklim dan bencana telah meningkat			1288	1288		1288	0			
	Persentase anggota masyarakat, perwakilan OPD dan staf LSM/Ormas yang melaporkan kemampuan mereka untuk kesiapsiagaan, beradaptasi dan memitigasi dengan risiko iklim dan bencana telah meningkat			0,7	0,7		4,2	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sub-Tujuan 2.1: Masyarakat menerapkan rencana untuk mengurangi risiko bencana & iklim	Persentase individu yang merasakan/mengakui kemungkinan besar terkena dampak parah oleh ancaman tertentu			0,8	0,8		1,6	0			
Sub-Tujuan 2.1: Masyarakat menerapkan rencana untuk mengurangi risiko bencana & iklim	Persentase rencana PRB masyarakat yang diadopsi oleh dan dibiayai oleh pemerintah desa, kabupaten dan pelaku sektor swasta			0,65	0,65		0	1,3			
Sub-Tujuan 2.1: Masyarakat menerapkan rencana untuk mengurangi risiko bencana & iklim	Jumlah individu yang mendapat manfaat langsung dari aksi PRB tingkat masyarakat			1258	1258		0	1258			
Output 2.1.1: Kelompok masyarakat PRB/perubahan iklim, terkait dengan inisiatif pemerintah yang relevan, beroperasi & diakui oleh pemerintah kabupaten	Jumlah individu dalam masyarakat yang dimobilisasi dan menyelesaikan kajian risiko bencana (ancaman, kerentanan dan kapasitas) dan kerentanan iklim secara partisipatif			370	370		370	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2.1.1: Kelompok masyarakat PRB/perubahan iklim, terkait dengan inisiatif pemerintah terkait, beroperasi & diakui oleh pemerintah kabupaten	Persentase kelompok/komite PRB dan Proklam yang diakui melalui peraturan pemerintah desa dan daerah			1	1		2	0			
1. Melakukan pelatihan/peningkatan kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah desa tentang PRB dan CCA (Desa Tangguh, KSB, Proklam) (termasuk kajian risiko bencana dan kerentanan iklim)	Jumlah individu mengikuti pelatihan/kajian/ peningkatan kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah desa tentang CCA (kerentanan iklim) dan PRB (risiko bencana) di desa			370	370		370	0			
	Jumlah desa yang difasilitasi pelatihan peningkatan kesadaran bagi masyarakat dan Pemdes ttg CCA dan PRB			8	8		8	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
2. Pembentukan kelompok/panitia	Jumlah kelompok/panitia bencana tingkat desa yang dibentuk			8	8		8	0			
	Jumlah individu anggota kelompok/panitia bencana yang dibentuk (orang)			319	319		319	0			
	Jumlah kelompok proklam di tingkat dusun/kampung yang dibentuk			8	8		8	0			
	Jumlah individu anggota kelompok proklam yang dibentuk (orang)			253	253		253	0			
3. Memfasilitasi penerbitan surat keputusan pemerintah yang mengakui kelompok/panitia PRB/Adaptasi Perubahan Iklim (CCA)	Jumlah kelompok/panitia bencana dan Proklam yang diakui pemerintah desa melalui surat keputusan			11	11		11	0			
	Jumlah kelompok/panitia Proklam yang diakui pemerintah desa dan daerah melalui surat keputusan			16	16		6	10			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
4. Melatih kelompok/komite desa (TSBD dan Proklam) tentang tugas dan fungsi masing-masing bagian struktur organisasi, risk assessment, simulasi, kajian desa tangguh, advokasi, pembangunan jaringan, dll)	Jumlah kelompok/panitia bencana tingkat desa dan kelompok Proklam tingkat dusun yang dilatih			16	16		6	10			
	Jumlah kelompok/panitia bencana tingkat desa yang dilatih			8	8		3	5			
	Jumlah individu/anggota kelompok bencana yang dilatih			171	171		90	81			
	Jumlah kelompok Proklam tingkat dusun/kampung yang dilatih			8	8		3	5			
	Jumlah individu/anggota kelompok Proklam yang dilatih			195,6	195,6		90	105,6			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
5. Memfasilitasi rapat rutin komite/kelompok	Jumlah individu anggota kelompok bencana dan proklam yang mengikuti rapat rutin			342,7	342,7		342,7	1028,1			
	Jumlah rapat kelompok bencana dan proklam yang dilaksanakan			16	16		4	12			
	Jumlah individu anggota kelompok bencana yang mengikuti rapat rutin			178,7	178,7		178,7	536,1			
	Jumlah rapat kelompok bencana yang dilaksanakan			8	8		2	6			
	Jumlah individu anggota kelompok proklam yang mengikuti rapat rutin			164	164		164	492			
	Jumlah rapat kelompok proklam yang dilaksanakan			8	8		2	6			
6. Mendaftarkan kelompok/panitia PRB/CCA ke instansi pemerintah kabupaten yang sesuai	Jumlah kelompok/panitia bencana dan Proklam yang terdaftar di instansi pemerintah			11	11		6	5			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah kelompok bencana yang terdaftar di instansi pemerintah			3	3		3	0			
	Jumlah kelompok iklim yang terdaftar di instansi pemerintah			8	8		3	5			
Output 2.1.2: Rencana aksi PRB masyarakat, perubahan iklim dan NRM dikembangkan oleh kelompok desa	Jumlah rencana aksi masyarakat yang dikembangkan dari kajian partisipatif risiko bencana (ancaman, kerentanan dan kapasitas) dan kerentanan iklim			20	20		20	0			
1. Memfasilitasi kajian risiko komunitas secara partisipatif	Kajian risiko bencana dan kerentanan di masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan perwakilan kelompok di masyarakat			3	3		3	0			
	Jumlah individu masyarakat yang terlibat dalam kajian risiko bencana dan kerentanan			370	370		370	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
2. Mendukung pengembangan aksi/ketahanan PRB masyarakat dan rencana NRM	Jumlah desa memiliki rencana aksi ketahanan iklim (Proklam), PRB (Desa Tangguh) dan NRM (konservasi SMA)			8	8		8	0			
	Jumlah desa memiliki rencana aksi Proklam			8	8		8	0			
	Jumlah desa memiliki rencana aksi PRB			8	8		8	0			
	Jumlah desa memiliki rencana aksi konservasi SMA			4	4		4	0			
	Jumlah rencana aksi masyarakat yang dikembangkan : 1) rencana aksi PRB; 2) rencana aksi Proklam; 3) rencana aksi konservasi NRM (SMA)			20	20		20	0			
	Jumlah rencana aksi masyarakat - PRB			8	8		8	0			
	Jumlah rencana aksi masyarakat - Proklam			8	8		8	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah rencana aksi masyarakat - NRM (SMA)			4	4		4	0			
3. Menyusun SOP penanggulangan an bencana	Jumlah desa yang memiliki SOP penanggulangan bencana			8	8		8	0			
	Jumlah individu yang mengikuti proses penyusunan SOP/Protap penanggulangan bencana			175	175		175	0			
	Jumlah SOP penanggulangan bencana yang telah disusun dan disahkan Pemdes			8	8		8	0			
4. Penilaian desa tangguh dan kapasitas panitia/kelompok bencana	Jumlah desa yang dilakukan penilaian desa tangguh dan kapasitas kelompok bencana			8	8		5	8			
	Jumlah penilaian desa tangguh dan kapasitas kelompok bencana yang dilakukan			2	2		1	2			
	Jumlah orang/anggota yang terlibat dalam penilaian			175	175		0	175			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	desa tangguh bencana										
5. Kajian pengembangan dan pendaftaran kelompok Proklam	Jumlah desa yang dilakukan penilaian Proklam			8	8		0	16			
	Jumlah penilaian Proklam yang dilakukan			2	2		0	3			
	Jumlah Proklam yang diregistrasi SRN-KLHK			5	5		0	5			
	Jumlah orang/anggota yang terlibat dalam penilaian Proklam			176	176		0	176			
Output 2.1.3: Pemerintah desa mengintegrasikan rencana aksi PRB, perubahan iklim & NRM ke dalam rencana pembangunan desa	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana, dan rencana tanggap darurat PRB yang ditulis atau direvisi untuk mencerminkan informasi dan prosedur yang lebih baik			19	19		19	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2.1.3: Pemerintah desa mengintegrasikan rencana aksi PRB, perubahan iklim & NRM ke dalam rencana pembangunan desa	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan rencana tanggap darurat PRB sedang diadopsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa			19	19		19	0			
PRB 1. Meninjau rencana pembangunan desa yang ada	Jumlah rencana pembangunan desa (RPJMDes/APB Des) yang direview berdasarkan rencana aksi PRB, Proklamasi dan NRM			8	8		8	0			
	Jumlah orang yang mengikuti peninjauan (review) rencana pembangunan desa			160	160		160	0			
	Jumlah desa yang rencananya (RPJMDes/APB Des) direview			8	8		8	0			
PRB 2. Memfasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat PRB/Ketahan	0			103	103		48	55			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
an dengan pemerintah desa											
Memfasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat PRB (TSBD) dengan pemerintah desa	Jumlah individu dari kelompok masyarakat/OPD yang mengikuti pertemuan dengan Pemdes			41	41		57	25			
	Jumlah desa yang difasilitasi pertemuan Pemdes dengan kelompok PRB, Proklam dan NRM			8	8		11	5			
Memfasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat Proklam/kerentanan dengan pemerintah desa	Jumlah individu dari kelompok masyarakat Proklam dan OPD yang mengikuti pertemuan dengan Pemdes			41	41		57	25			
	Jumlah desa yang difasilitasi pertemuan Pemdes dengan kelompok Proklam			8	8		11	5			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Memfasilitasi pertemuan antara kelompok masyarakat NRM dengan pemerintah desa	Jumlah individu dari kelompok masyarakat NRM dan OPD yang mengikuti pertemuan dengan Pemdes			21	21		16	5			
	Jumlah desa yang difasilitasi pertemuan Pemdes dengan kelompok NRM			4	4		3	1			
PRB 3. Mendukung perumusan RPJMDes untuk memasukkan rencana aksi PRB	Jumlah RPJMDes (RKPDDes/APBD es) yang diurus-utamakan rencana aksi Proklam, PRB dan NRM			8	8		8	0			
	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes (RKPDDes/APBD es) yang diurus-utamakan rencana aksi Proklam, PRB dan NRM			8	8		8	0			
	Jumlah rencana aksi Proklam, PRB dan NRM yang telah disusun oleh			20	20		20	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	kelompok bencana/Proklam /NRM										
	Jumlah rencana aksi Proklam, PRB dan NRM yang terakomodir ke dalam RPJMDes			20	20		0	20			
	Jumlah realisasi dana desa (APBDes) yang telah dipakai untuk melaksanakan rencana aksi Proklam, PRB, dan NRM (Rp)			105000 000	1050 0000 0		0	105000000			
PRB 4. Advokasi rencana aksi kelompok/pantia PRB, Proklam, NRM dengan instansi pemerintah kabupaten terkait	Jumlah OPD yang terlibat dalam advokasi rencana aksi Proklam, dan PRB			6	6		0	12			
	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan rencana tanggap darurat (PRB), Proklam, dan NRM yang diadopsi atau dimanfaatkan			8	8		0	8			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	oleh masyarakat dan/atau (diterima) oleh pemerintah										
	Jumlah desa (kelompok Proklamasi, Kelompok Bencana) yang rencana aksinya didukung pemerintah kabupaten terkait			4,5	4,5		0	4,5			
	Jumlah dana Pemda yang telah direalisasikan untuk mendukung rencana aksi PRB, Proklamasi, dan NRM (Rp)			120000000	120000000		0	120000000			
NRM 1. Advokasi rencana NRM ke pemerintah desa	Jumlah OPD yang terlibat dalam advokasi rencana NRM-SMA (Sumber Mata Air)			1	1		2	0			
	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan rencana NRM sedang diadopsi			4	4		0	4			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau (diterima) oleh pemerintah										
	Jumlah desa yang rencana NRMnya didukung pemerintah kabupaten terkait			3	3		0	3			
	Jumlah dana Pemdes yang telah direalisasikan untuk mendukung rencana aksi NRM (Rp)			150000 00	1500 0000		0	15000000			
NRM 2. Pendampingan dan pemantauan praktik konservasi (termasuk pengukuran aliran air)	Jumlah individu/orang masyarakat dari kelompok, aparat desa, OPD, dll yang mendapatkan pendampingan, terlibat dalam pemantauan dalam praktik konservasi SMA (NRM)			155	155		145	105			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
NRM 3. Membantu penyusunan kebijakan NRM desa (termasuk manajemen kebakaran terpadu, konservasi dan jelajah ternak, dll.)	Jumlah kebijakan NRM desa (konservasi SMA) yang disusun			3	3		0	3			
	Jumlah individu terlibat dalam penyusunan kebijakan NRM desa			63	63		0	63			
NRM 4. Konsultasi kebijakan NRM desa dengan instansi pemerintah terkait	Jumlah kebijakan NRM desa (konservasi SMA) yang disusun dan dikonsultasikan dengan instansi terkait (DLH, Biro Hukum Pemda)			3	3		0	3			
NRM 5. Audiensi publik dengan masyarakat, perbaikan dan pengesahan oleh kepala desa	Jumlah audiensi publik yang dilaksanakan untuk kebijakan (Perdes konservasi SMA)			3	3		0	3			
	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam audiensi			75	75		0	75			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	publik Perdes Konservasi SMA										
NRM 6. Sosialisasi kebijakan NRM desa kepada masyarakat	Jumlah dokumen kebijakan (Perdes konservasi SMA) yang telah disahkan pemerintah desa			4	4		0	4			
	Jumlah sosialisasi Perdes Konservasi SMA yang dilaksanakan			3	3		0	3			
	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam diskusi sosialisasi Perdes Konservasi SMA			105	105		0	105			
Kegiatan mitigasi/kesiapan pelengkap skala kecil yang diidentifikasi dalam rencana PRB masyarakat didukung	Jumlah desa yang mendapat dukungan kegiatan mitigasi/kesiapan pelengkap skala kecil			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
1. Mengidentifikasi kesenjangan sumber daya (masuk material, dukungan teknis, tenaga kerja dan uang) dalam melaksanakan rencana aksi/ketahanan masyarakat	Jumlah desa yang diidentifikasi memiliki kesenjangan sumber daya dalam melaksanakan rencana aksi/ketahanan masyarakat			0	0		0	0			
2. Memfasilitasi identifikasi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan yang akan didukung	Jumlah desa yang difasilitasi melakukan identifikasi kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan yang akan didukung			0	0		0	0			
3. Menyediakan sumber daya untuk mengimplementasikan aktivitas yang teridentifikasi	Jumlah desa yang disediakan sumber daya untuk mengimplementasikan aktivitas			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2.1.4: Masyarakat mengembangkan rencana darurat (Contingency Plan=CP) dan menetapkan EWS (Early Warning System) last mile	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan rencana tanggap (CP) dan EWS darurat PRB sedang diadopsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau pemerintah			3	3		0	3			
Output 2.1.4: Masyarakat mengembangkan rencana darurat (CP) dan menetapkan EWS last mile	Jumlah kampanye dan/atau latihan kesadaran publik yang diselesaikan			6	6		0	6			
Output 2.1.4: Masyarakat mengembangkan rencana darurat (CP) dan menetapkan EWS last mile	Jumlah individu yang dijangkau melalui kampanye kesadaran publik dan/atau berpartisipasi dalam latihan			300	300		0	300			
CP 1. Memfasilitasi pertemuan perencanaan kontijensi (CP) di tingkat masyarakat	Jumlah pertemuan perencanaan CP yang difasilitasi tingkat masyarakat			3	3		3	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah individu dari masyarakat, Pemdes, instansi, dll yang mengikuti pertemuan penyusunan CP			75	75		75	0			
CP 2. Memfasilitasi penentuan prioritas kontijensi berdasarkan dampak dan kemungkinan risiko yang teridentifikasi (sesuai dengan prioritas bencana kabupaten)	Jumlah dokumen prioritas kontijensi plan yang dibuat			3	3		3	0			
CP 3. Konsultasi fasilitasi perencanaan kontijensi dengan instansi pemerintah terkait perbaikan dan pengesahan oleh kepala desa	Jumlah instansi pemerintah terkait yang terlibat dalam penyusunan renkon (rencana kontijensi)			2	2		2	0			
	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang diperbaiki dan disahkan			1	1		0	1			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
CP 4. Mendukung diseminasi rencana kontigensi masyarakat	Jumlah instansi pemerintah terkait yang terlibat dalam desiminasi renkon			2	2		0	2			
	Jumlah desa yang desiminasikan dokumen renkon yang diperbaiki dan disahkan			3	3		0	3			
	Jumlah individu yang mengikuti desiminasi renkon			90	90		0	90			
EWS 1. Identifikasi parameter untuk memantau dan kemampuan respons	Jumlah dokumen hasil identifikasi parameter pemantauan dan kapasitas respons yang dibuat			3	3		3	0			
EWS 2. Pilih sistem yang sesuai	Jumlah EWS system yang dipilih untuk diimplementasikan			3	3		3	0			
EWS 3. Mendukung pengembangan sistem kerja	Jumlah sistem kerja EWS yang dikembangkan			3	3		3	0			
EWS 4. Mendukung simulasi	Jumlah simulasi yang dilakukan di tingkat dusun/desa			3	3		0	6			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah individu berpartisipasi dalam kegiatan simulasi			300	300		0	300			
EWS 5. Sesuaikan sistem berdasarkan kajian pasca acara	Jumlah sistem kerja EWS yang disesuaikan (revisi) pasca simulasi			3	3		0	3			
Pusat Evakuasi Berbasis Agama 1. Memetakan fasilitas evakuasi dan isolasi COVID-19 yang ada dan menilai potensi dan kesenjangan dalam mengelola pengungsi	Jumlah fasilitas layak dalam mengelola pengungsi dan kesenjangan infrastruktur untuk evakuasi Jumlah dokumen hasil pemetaan/identifikasi yang dihasilkan			0	0		0	0			
Pusat Evakuasi Berbasis Agama 2. Memfasilitasi pertemuan kesiapsiagaan evakuasi, melibatkan pimpinan desa, tokoh agama dan pemangku kepentingan terkait lainnya	Jumlah individu yang terlibat Jumlah instansi/kelembagaan/LSM/Ormas yang terlibat Jumlah pertemuan yang dilakukan			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pusat Evakuasi Berbasis Agama 3. Latih dan berikan pendampingan kepada organisasi berbasis agama, staf dan sukarelawan di lokasi, dan pemerintah daerah seputar standar untuk pusat evakuasi	Jumlah individu (staf) yang mengikuti pelatihan dan pendampingan Jumlah individu (relawan) yang mengikuti pelatihan dan pendampingan Jumlah organisasi berbasis agama dan pemerintah yang dilatih			0	0		0	0			
Pusat Evakuasi Berbasis Agama 4. Mendukung peningkatan perencanaan evakuasi	Jumlah perencanaan evakuasi yang ditingkatkan			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sub-Tujuan 2.2: Pemda dan LSM/Ormas dari kabupaten sasaran telah meningkatkan kapasitas untuk mengembangk kebijakan dan rencana manajemen risiko dan perubahan iklim yang efektif	Jumlah kabupaten sasaran yang melaporkan bahwa kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan dan rencana PRB telah meningkat			1	1		0	1			
0	D16: Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan rencana tanggap darurat (CP dan EWS) PRB yang diadopsi atau digunakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah			3	3		0	3			
Output 2.2.1: Pengetahuan dan keterampilan OPD yang ditargetkan, LSM/CBO meningkat	Jumlah individu yang terlatih dalam kesiapsiagaan bencana, PRB dan/atau PRB			30	30		0	30			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2.2.1: Pengetahuan dan keterampilan OPD yang ditargetkan, LSM/CBO meningkat	Persentase individu yang mempertahankan kesiapsiagaan bencana, keterampilan dan pengetahuan PRB dan/atau PRB dua bulan setelah pelatihan			0,8	0,8		0	0,8			
1. Melakukan asesment kapasitas OPD di tingkat kabupaten	Jumlah assement kapasitas OPD yang dilakukan			0	0		0	0			
	Jumlah individu dari instansi Pemda yang terlibat			0	0		0	0			
2. Melakukan kajian kapasitas LSM/CSO	Jumlah assement kapasitas LSM/CSO/anggota FPRB non Pemda yang dilakukan			0	0		0	0			
	Jumlah individu dari LSM/CSO/anggota FPRB non Pemda yang terlibat dlm assement			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
3. Mengembangkan rencana penguatan kapasitas CCA & CBDRM; InaRisk, SIDIK, IKD/SPDAB**;	Jumlah rencana penguatan kapasitas yang perlu dikembangkan			3	3		0	3			
	Jumlah instansi OPD/LSM/Ormas yang akan mendapat penguatan kapasitas			13	13		0	13			
	Jumlah orang yang akan mendapat penguatan kapasitas			30	30		0	30			
	Jumlah individu (staf pemerintah) yang dilatih CCA & CBDRM; InaRISK/IKD; dan SIDIK			15	15		0	15			
	Jumlah individu (staf LSM/Ormas/anggota FPRB non Pemda yang dilatih CCA &			12	12		0	12			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	CBDRM; IKD/InaRISK; dan SIDIK										
	Jumlah individu (relawan) yang dilatih CCA & CBDRM; InaRISK/IKD; dan SIDIK			3	3		0	3			
4. Berdasarkan rencana penguatan kapasitas, lakukan pelatihan untuk OPD, relawan kabupaten & LSM/Ormas	Jumlah individu (staf pemerintah) yang dilatih			0	0		0	0			
	Jumlah individu (staf LSM/Ormas/anggota FPRB non Pemda yang dilatih			0	0		0	0			
	Jumlah individu (relawan) yang dilatih			0	0		0	0			
	Jumlah instansi OPD/LSM/Ormas, dll yang telah dilatih			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
5. Memberikan pembinaan dan pendampingan perumusan kebijakan dan perencanaan bagi Pemda dan LSM/Ormas	Jumlah individu yang mendapat pendampingan untuk perumusan kebijakan dan perencanaan ttg penguatan kapasitas			24	24		0	24			
	Jumlah instansi/LSM/Ormas yang mendapat pendampingan untuk perumusan kebijakan dan perencanaan ttg penguatan kapasitas			9,6	9,6		0	9,6			
6. Penguatan kapasitas yang disesuaikan untuk staf pemerintah	Jumlah penguatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi Pemda			0	0		0	0			
	Jumlah instansi Pemda yang mendapatkan penguatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Sub-Tujuan 2.3: Pemda, LSM/Ormas dan pemangku kepentingan utama lainnya dari kabupaten sasaran menerapkan sistem dan perangkat PRB & perubahan iklim yang lebih baik	Persentase pemangku kepentingan PRB yang melaporkan peningkatan koordinasi pada akhir proyek			0,75	0,75		0	0,75			
Output 2.3.1: Lembaga PRB kabupaten & provinsi, LSM dan pemangku kepentingan sektor swasta berkolaborasi secara efektif dalam inisiatif PRB dan perubahan iklim	Jumlah orang yang berpartisipasi dalam diskusi F PRB tentang strategi PRB sebagai hasil dari program			36,8475	36,8475		0	36,8475			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2.3.1: Lembaga PRB kabupaten & provinsi, LSM dan pemangku kepentingan sektor swasta berkolaborasi secara efektif dalam inisiatif PRB dan perubahan iklim	Jumlah peserta pada acara yang diselenggarakan bersama untuk berbagi pembelajaran dan praktik terbaik			35	35		35	0			
Forum PRB 1. Memfasilitasi pembentukan/ penguatan Forum PRB kabupaten	Jumlah forum PRB dibentuk atau revitalisasi (pergantian kepengurusan, SK)			1	1		0	1			
	Jumlah orang yang terlibat dalam pertemuan pembentukan atau revitalisasi forum PRB (pergantian kepengurusan)			43,35	43,35		0	43,35			
	Jumlah forum PRB yang telah mendapat pengakuan/SK Bupati			1	1		0	1			
	Jumlah instansi yang terlibat dalam forum PRB			20	20		0	20			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah semua anggota forum PRB			43,35	43,35		0	43,35			
Forum PRB 2. Memfasilitasi pertemuan rutin Forum PRB kabupaten	Jumlah individu/orang yang terlibat/mengikuti pertemuan			36,8475	36,8475		0	73,695			
	Jumlah pertemuan FPRB yang dilakukan			2	2		0	2			
Forum PRB 3. Memfasilitasi koordinasi FPRB kabupaten pada tingkat provinsi	Jumlah individu yang mengikuti pertemuan pada tingkat provinsi			5	5		0	5			
	Jumlah pertemuan yang dilakukan pada tk provinsi			1	1		0	1			
Forum PRB 4. Advokasi untuk pengakuan resmi dan dukungan keuangan untuk Forum PRB	Jumlah instansi yang dilakukan advokasi untuk mendukung finansial dan pengakuan resmi FPRB			2	2		1	1			
	Jumlah pertemuan advokasi yang dilakukan FPRB dengan instansi			3	3		0	3			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	yang diharapkan bisa mendukung										
	Jumlah pengakuan dan dukungan finansial yang telah direalisasikan untuk mendukung operasional dan rencana aksi FPRB (Rp)			250000 00	2500 0000		0	25000000			
Forum PRB 5. Memperkuat/ mendukung hubungan forum PRB kabupaten dengan sektor swasta untuk dukungan finansial dan bantuan barang/alat	Jumlah forum yang difasilitasi koneksinya dengan sektor swasta			1	1		0	1			
0	Jumlah pihak swasta yang diajukan proposal oleh FPRB			2	2		0	2			
0	Jumlah pihak swasta yang memberikan dukungan finansial kepada FPRB			1	1		0	1			
0	Jumlah finansial yang telah diberikan oleh			100000 00	1000 0000		0	10000000			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan FPRB										
Pertukaran dan Pembelajaran 1. Menyelenggarakan acara pertukaran di tingkat komunitas/kabupaten/provinsi untuk berbagi keprihatinan, praktik terbaik, pelajaran, dan implikasi bagi kebijakan dan pengembangan masyarakat	Jumlah individu yang mengikuti pertukaran dan pembelajaran antara berbagai stakeholder pada tingkat komunitas/kabupaten/provinsi			30	30		0	30			
	Jumlah kegiatan pertukaran dan pembelajaran yang dilakukan antara berbagai stakeholder tingkat komunitas/kabupaten/provinsi			2	2		0	2			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pertukaran dan Pembelajaran 2. Mendukung berbagi dan hubungan melalui komunitas praktik dengan tema khusus: mata pencaharian, NRM, dll.	Jumlah orang masyarakat yang didukung untuk berbagi, pembelajaran dan berjejaring dengan topik khusus NRM (konservasi SMA)			20	20		0	20			
	Jumlah desa yang didukung untuk berbagi, pembelajaran dan berjejaring dengan topik khusus (NRM-konservasi SMA)			4	4		0	4			
Output 2.3.2 Prosedur, rencana, dan kebijakan PRB dan perubahan iklim diperkuat	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana, dan rencana tanggap darurat (CP/Renkon) PRB yang ditulis atau direvisi untuk mencerminkan informasi dan prosedur yang lebih baik			1	1		0	1			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Output 2.3.2 Prosedur, rencana, dan kebijakan PRB dan perubahan iklim diperkuat	Jumlah strategi, kebijakan, kesiapsiagaan bencana dan rencana tanggap darurat (CP/Renkon) PRB sedang diadopsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau pemerintah			1	1		0	1			
Tindak Lanjut Kajian 1. Menyebarluaskan informasi kajian risiko yang ada kepada OPDs yang relevan	Jumlah dokumen informasi hasil kajian risiko bencana dan kerentanan iklim dibuat dan yang disebarluaskan			8	8		0	8			
	Jumlah OPD yang didiseminasikan dokumen informasi hasil kajian risiko bencana dan kerentanan tk desa			7	7		0	7			
Tindak Lanjut Kajian 2. Pelaksanaan kajian kapasitas Kabupaten menggunakan IKD/InaRISK	Jumlah dokumen hasil kajian IKD/InaRISK yang dihasilkan			1	1		0	1			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah OPD kabupaten yang terlibat/melakukan kajian (assessment) IKD/InaRISK			0	0		0	0			
	Jumlah orang OPD dan FPRB yang berpartisipasi dalam penilaian kapasitas IKD/InaRISK			27,635 625	27,63 5625		0	27,635625			
Tindak Lanjut Kajian 3. Melakukan kajian kerentanan di tingkat kabupaten melalui SIDIK	Jumlah dokumen hasil kajian SIDIK yang dihasilkan			1	1		0	1			
	Jumlah OPD kabupaten yang terlibat dalam kajian SIDIK			0	0		0	0			
	Jumlah orang OPD dan FPRB yang berpartisipasi dalam penilaian kapasitas SIDIK			27,635 625	27,63 5625		0	27,635625			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tindak Lanjut Kajian 4. Advokasi hasil kajian risiko dan kerentanan untuk menginformasikan perencanaan dan penganggaran pemerintah (IKD/SPDAB & SIDIK)	Jumlah instansi OPD yang terlibat dalam advokasi hasil IKD/InaRISK dan SIDIK			5	5		0	5			
0	Jumlah kebijakan, strategi, kesiapsiagaan bencana dan rencana tanggap darurat PRB yang diadopsi masyarakat/pemerintah dari hasil kajian IKD/InaRISK dan SIDIK			2	2		0	2			
0	Jumlah alokasi dana Pemda yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari rekomendasi IKD/InaRISK dan SIDIK			500000 00	5000 0000		0	50000000			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Tindak Lanjut Kajian 5. Melakukan pelatihan kajian risiko berbasis masyarakat untuk staf dan relawan kabupaten terkait	Jumlah individu (staf) dari OPD yang mengikuti pelatihan kajian risiko bencana dan kerentanan iklim berbasis masyarakat			10	10		10	0			
	Jumlah individu (relawan) yang mengikuti pelatihan kajian risiko bencana dan kerentanan iklim berbasis masyarakat			0	0		0	0			
	Jumlah individu staf OPD yang fasilitasi kajian risiko bencana dan kerentanan iklim tk masyarakat desa			8	8		8	0			
	Jumlah individu (relawan, LSM, ormas, Anggota FPRB non pemerintah) yang fasilitasi kajian risiko bencana dan kerentanan iklim di tk masyarakat desa			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Alat Pertanian Cerdas Iklim (PCH) 1. Lokakarya penerapan prakiraan iklim dan perangkat informasi.	Jumlah individu yang mengikuti lokakarya perangkat informasi dan penerapan prakiraan iklim (alat PCH)			25	25		25	0			
Alat Pertanian Cerdas Iklim (PCH) 2. Mengembangkan alat prediksi curah hujan digital (aplikasi web dan Android)	Jumlah alat digital PCH (aplikasi web dan android) yang dikembangkan			1	1		1	0			
0	Jumlah OPD yang mengaplikasi alat digital prediksi curah hujan (PCH)			7	7		0	7			
Alat Pertanian Cerdas Iklim (PCH) 3. Mengembangkan hubungan (integrasi) dengan sistem informasi desa	Jumlah SOP/sistem aplikasi PCH yang dikoordinasikan dengan sistem informasi desa			1	1		0	1			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah desa yang telah mengintegrasikan alat pertanian cerdas iklim (aplikasi PCH) dengan sistem informasi desa			8	8		0	8			
Alat Pertanian Cerdas Iklim (PCH) 4. Advokasi untuk pemutakhiran versi aplikasi online dan Android menggunakan anggaran pemerintah kabupaten.	Jumlah OPD yang berkomitmen menganggarkan pemutakhiran (update) aplikasi PCH			1	1		0	1			
Alat Pertanian Cerdas Iklim (PCH) 5. Menjajaki kemungkinan keterkaitan dengan EWS dari BMKG untuk pengguna alat informasi dan prakiraan iklim	Jumlah EWS bencana hidrology (banjir, kekeringan, dll) yang dikoordinasikan dengan BMKG			1	1		0	1			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Alat Pertanian Cerdas Iklim (PCH) 6. Menyelenggarakan seminar nasional untuk menunjukkan manfaat dan keberhasilan alat digital pertanian cerdas iklim.	Jumlah seminar nasional yang dilaksanakan			1	1		0	1			
	Jumlah peserta seminar nasional tentang keberhasilan alat digital pertanian cerdas iklim (aplikasi PCH)			5	5		0	5			
CP dan EWS 1. Menilai kesenjangan dalam prosedur kabupaten yang ada untuk CP dan evakuasi	Jumlah dokumen hasil kajian kesenjangan terkait dengan CP, EWS, dan evakuasi			1	1		0	1			
CP dan EWS 2. Melakukan pelatihan pelatih tentang CP, komando insiden dan evakuasi	Jumlah individu yang dilatih CP, EWS dan rencana evakuasi			30	30		0	30			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
CP dan EWS 3. Memfasilitasi lokakarya untuk mengembangkan CP kabupaten dan rencana evakuasi	Jumlah individu yang mengikuti lokakarya CP, EWS dan rencana evakuasi tingkat kabupaten			30	30		0	30			
	Jumlah CP, EWS dan rencana evakuasi kabupaten yang dikembangkan/dibuat			1	1		0	1			
CP dan EWS 4. Lakukan latihan di atas meja untuk menguji dan memodifikasi rencana yang dikembangkan	Jumlah OPD/instansi/LS M/Ormas yang terlibat dalam kegiatan pembuatan/penulisan CP, EWS dan rencana evakuasi			5	5		0	5			
	Jumlah rencana CP dan EWS yang dimodifikasi dan/atau dibuat			1	1		0	1			
CP dan EWS 5. Konsultasi dengan BPBD Provinsi tentang rencana yang dikembangkan	Jumlah meeting konsultasi yang dilakukan			3	3		0	3			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
CP dan EWS 6. Memfasilitasi persetujuan rencana yang dikembangkan dengan instansi terkait dan disahkan oleh Bupati	Jumlah rencana/strategi/ kebijakan yang disetujui dan disahkan oleh Bupati			1	1		0	1			
Output 2.3.3: Pelaku publik dan swasta berinvestasi dalam prakarsa PRB dan perubahan iklim	Persentase strategi atau rencana PRB masyarakat dan OPD yang menerima dukungan sektor publik atau swasta.			0,6	0,6		0	0,6			
1. Memfasilitasi lokakarya integrasi rencana aksi PRB masyarakat dalam rencana dan anggaran pembangunan kabupaten	Jumlah individu yang mengikuti lokakarya integrasi rencana aksi PRB masyarakat dalam rencana dan anggaran pembangunan kabupaten			44,847 5	44,84 75		0	44,8475			
1. Memfasilitasi lokakarya integrasi rencana aksi PRB masyarakat dalam rencana dan anggaran	Jumlah strategi atau rencana PRB masyarakat yang terintegrasi dalam anggaran pembangunan kabupaten (RPJM Daerah)			8	8		0	8			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
pembangunan kabupaten (RPJM)											
	Jumlah proposal yang diajukan kelompok masyarakat (bencana, proklam, dll) tentang rencana aksi CCA dan CBDRR kepada OPD-OPD			11	11		0	11			
	Jumlah OPD-OPD yang memberikan dukungan terhadap rencana aksi CCA dan CBDRR masyarakat			3	3		0	3			
	Jumlah proposal yang diajukan kelompok masyarakat (bencana, proklam, NRM, dll) tentang rencana aksi CCA dan CBDRR yang mendapat dukungan dari OPD-OPD			5,5	5,5		0	5,5			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah realisasi dana dukungan dari OPD-OPD terhadap rencana aksi CBDRR dan CCA yang diusulkan kelompok masyarakat			300000 00	3000 0000		0	30000000			
2.	Memfasilitasi hubungan dengan sektor swasta untuk mendukung inisiatif CBDRR dan CCA			8	8		0	8			
	Jumlah inisiatif rencana aksi CBDRR dan CCA yang didukung sektor swasta			2	2		0	2			
	Jumlah sektor swasta yang memberikan dukungan terhadap rencana aksi CBDRR dan CCA dari masyarakat			2	2		0	2			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Jumlah realisasi dana dukungan dari sektor swasta terhadap rencana kasi CBDRR dan CCA kelompok masyarakat (kelompok bencana, kelompok proklam, dll)			100000 00	1000 0000		0	10000000			
Tujuan 3: Pada tahun 2024, rumah tangga rentan di kabupaten sasaran lebih tangguh secara finansial	Jumlah individu (penerima manfaat) yang melaporkan peningkatan ketahanan finansial (hasil survey pendapatan keluarga)			495,6	495,6		0	495,6			
	Persentase individu (penerima manfaat) yang melaporkan peningkatan ketahanan finansial (hasil survey pendapatan rumah tangga)			0,7	0,7		0	1,4			
Sub-Tujuan 3.1: Rumah tangga rentan memiliki peningkatan akses ke layanan keuangan	Persentase akun/kelompok layanan keuangan (UBSP) yang didukung oleh INCIDENT yang			0,85	0,85		0	1,7			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	berfungsi dengan baik										
Output 3.1.1: Kelompok simpan pinjam (SLG) dibentuk & diperkuat	Jumlah individu dan/atau UMKM peserta jasa keuangan dengan bantuan INCIDENT			236	236		236	0			
1. Sesi peningkatan kesadaran di daerah sasaran untuk mendorong partisipasi dalam kelompok simpan pinjam	Jumlah individu yang mengikuti sesi peningkatan kesadaran untuk mendorong partisipasi dalam kelompok simpan pinjam			105	105		105	0			
2. Pembentukan kelompok simpan pinjam	Jumlah kelompok simpan-pinjam yang dibentuk			15	15		15	0			
	Jumlah anggota perempuan dalam kelompok UBSP yang terbentuk			236	236		236	0			
	Jumlah dana simpanan (SP, SW, SS) kelompok (Rp)			4347700	43477000		0	43477000			
	Jumlah dana simpanan kebencanaan kelompok (Rp)			5818600	5818600		0	5818600			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
3. Pelatihan pendidikan keuangan, pembukuan dan administrasi untuk pengurus kelompok dan perwakilan anggota	Jumlah individu mengikuti pelatihan pendidikan keuangan, pembukuan dan administrasi, pembagian SHU			30	30		30	0			
	Jumlah orang yang dilatih bisnis/wirausaha			28	28		0	28			
	Jumlah orang yang dilatih bisnis telah mengembangkan bisnis pribadinya			74,9	74,9		0	74,9			
	Jumlah kelompok yang mengembangkan bisnis bersama dalam kelompok			7	7		0	7			
4. Pemantauan berkala dan bantuan teknis kepada anggota kelompok	Jumlah individu anggota kelompok yang menerima bantuan teknis (pembukuan, keuangan, bisnis)			70	70		70	0			
	Perkembangan jumlah modal/simpanan anggota UBSP			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Perkembangan dana kebencanaan dan penggunaannya			0	0		0	0			
	Perkembangan bisnis dan keuntungan dari bisnis (% dana pinjaman untuk bisnis, keuntungan bersih/pendapatan dari bisnis per orang per tahun, jumlah kelompok yg menjalankan bisnis bersama dlm kelompok, % modal simpanan kelompok UBSP yang dipakai untuk menjalankan bisnis, keuntungan bisnis kelompok per kelompok per tahun)			0	0		0	0			
	Perkembangan jumlah kelompok yg menjalankan bisnis bersama dlm kelompok, % modal simpanan kelompok UBSP yang dipakai untuk			0	0		0	0			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	menjalankan bisnis, keuntungan bisnis kelompok per kelompok per tahun)										
	Perkembangan jumlah kelompok UBSP yang berfungsi dengan baik (kelompok UBSP yang efektif)			0	0		0	0			
	Monitoring kelompok UBSP dan/UMKM : 1) perkembangan anggota, dan perkembangan modal/simpanan ; 2) perkembangan dana kebencanaan dan penggunaannya; 3) perkembangan bisnis dan keuntungan dari bisnis (% dana pinjaman untuk bisnis, keuntungan bersih/pendapatan dari bisnis per orang per tahun, jumlah			14	14		6,2	7,8			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	kelompok yg menjalankan bisnis bersama dlm kelompok, % modal simpanan kelompok UBSP yang dipakai untuk menjalankan bisnis, keuntungan bisnis kelompok per kelompok per tahun).										
5. Lokakarya tentang advokasi dukungan dari pemerintah daerah	Jumlah individu mengikuti lokakarya advokasi dukungan pemerintah daerah			35	35		0	35			
Nama Kegiatan 2 : Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience (BUDLOCAD-CR) Project	2.1 Output Kegiatan : Reduced conflict at forest-agricultural interface at 20 communities in Bima City, Bima District, and Dompu District - Sumbawa Island, West Nusa Tenggara	5 desa di Bima , Dompu dan kota bima	kelompok perdamaian di 5 desa dan 1 kabupaten kota dalam pengelolaan sumber daya alam			Rp 300.000.100,-			YRII	Propinsi NTB, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima	Mitra Samya Konsorsium

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	province by 2025										
	2.2 Output Kegiatan : establishment of gender justice principle in the whole project cycle in the three targeted districts: gender analysis, gender responsive support, gender age marker registration under UN system (support to 200 women with revolving mechanism follow on)	5 desa di Bima , Dompu dan kota bima	kelompok perdamaian di 5 desa dan 1 kabupaten kota dalam pengelolaan sumber daya alam			Rp 400.000.100,-			YRII	NTB, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima	Mitra Samya Konsorsium
Nama Program : Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience Project (BUDLOC-DCR)											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 1 (12)	1.1 Output : Pembentukan, penguatan, dan pengesahan 3 platform multi-stakeholder (MSP) berbasis kabupaten untuk revisi rencana tata ruang di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu – Pulau Sumbawa pada tahun 2025 Kegiatan : 1.1.1. Pembentukan, penguatan, dan legalisasi platform multipihak (MSP) untuk revisi rencana tata ruang 1.1.2. Pelatihan untuk MSP mengenai food estate ramah lingkungan iklim dan perencanaan tata ruang 1.1.3. Pertemuan dan Lobi untuk mempengaruhi penyusunan Rencana Pembangunan	2000 petani Laki dan Perempuan	2025			USD. 2,000,000			Islamic Relief (IR USA)	Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa	YRII bekerjasama dengan : 1. LP2DPM (Kabupaten Dompu dan Sumbawa); 2. LP2DER (Kota dan Kabupaten Bima); 3. Konsorsium Transform (Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima)

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Jangka Menengah (RPJMD) guna menjamin masuknya prinsip Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu 1.1.4. Dukungan penerapan food estate ramah lingkungan iklim untuk satu kabupaten siap pakai (Kota Bima, atau Kabupaten Bima, atau Kabupaten Dimpu) dengan menanam jagung dengan 50 pohon permanen yang terus tumbuh per hektar 1.1.5. Dukungan terhadap pemodelan pembangunan rendah karbon di sektor kehutanan sebagai tonggak sejarah Zero Net										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Emission pada tahun 2050.										

[illegible]

komunitas dan sekitarnya di wilayah proyek yang ditargetkan 1.2.4. Penyediaan keuangan mikro bagi 335 anggota masyarakat untuk mengadopsi pertanian cerdas iklim yang diujicobakan melalui inisiatif mereka 1.2.5. Pelatihan MRV (monitoring, pelaporan dan verifikasi) dan SRN PPI (Registrasi Nasional Pengelolaan Perubahan Iklim) untuk fasilitator 20 komunitas sasaran 1.2.6. Fasilitasi registrasi SRN PPI untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi Karbon untuk Perdagangan Karbon (nasional dan internasional) 1.2.7. penetapan prinsip keadilan gender di										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	seluruh siklus proyek di tiga kabupaten sasaran: analisis gender, dukungan responsif gender, pendaftaran penanda usia gender di bawah sistem PBB (dukungan untuk 200 perempuan dengan mekanisme bergulir lanjutan) 1.2.8. pembentukan/pe nguatan wirausaha sosial (koperasi) untuk mendorong siklus bisnis yang dijalankan oleh komunitas pertanian cerdas iklim di kabupaten Bima dan kota serta kabupaten dompu.										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2.1.8. Lokakarya multi-stakeholder untuk Kemitraan Pemerintah dan Swasta (P4).										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR		13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)								
Nama Program 1 (11) :	Indonesian Climate and Disaster Resilient Communities (ICDRC)										
Nama Kegiatan 1 (12) : Pelatihan Respons Bencana bagi Tim Siaga Bencana Desa Berbasis CSDRM	Output Kegiatan : Terbitnya Surat Keputusan/ SK Kepala Desa tentang Pengurus Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung;					54.050.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
	Output Kegiatan : Disahkannya Peraturan Desa Tentang Penyelenggaraan Penanggulanga n Bencana Berbasis Masyarakat di Desa Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	1.3 Output Kegiatan : Terbitnya Dokumen Rencana Aksi Komunitas (RAK) TSBD Sembalun Lawang & Sembalun Bumbung										
	1.4 Output Kegiatan : Terbitnya Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana Gempa Bumi Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung										
	1.5 Output Kegiatan : Adanya Sosial Media Komunitas TSBD.										
	1.6 Output Kegiatan : Meningkatkan kerja-kerja kolaborasi lintas sector dalam kerangka penanggulangan bencana berbasis Climate Smart Disaster Risk										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Management (CSDRM).										
	1.7 Output Kegiatan : Regenerasi Kepengurusan Komunitas TSBD yang diisi oleh anak muda (20-35th)										
Nama Kegiatan 2 : Sosialisasi Rencana Aksi Komunitas terkait CSDRM di Level Desa	Output Kegiatan : Terlibatnya 47 orang dalam proses sosialisasi Rencana Aksi Komunitas.					10.200.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
	2.2 Output Kegiatan : Adanya feedback komitmen masyarakat dalam mendukung										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	implementasi RAK di 2 desa										
Nama Kegiatan 3 : Pelatihan CSDRM Bagi Pelaku Pariwisata di Wilayah Wisata Rawan Bencana	Output Kegiatan : Terlibatnya 36 orang masyarakat yang bekerja di sector wisata dan penghidupannya di kawasan wisata rawan bencana.					8.750.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	
	3.2 Output Kegiatan : Kapasitas pelaku pariwisata meningkat terkait dengan CSDRM.										KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 4 : Advokasi Legalisasi Rencana Aksi Komunitas Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Kepala Desa	Output Kegiatan : - Disahkan dokumen Rencana Aksi Komunitas (RAK) oleh Pemerintah Desa di 2 desa. - Adanya komitmen Pemerintah Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang untuk mendukung implementasi RAK melalui anggaran dana desa (ADDdes). - Pemerintah Desa Sembalun Bumbung mengalokasikan anggaran senilai Rp10.000.000 untuk Implementasi RAK TSBD Sembalun Bumbung. - Pemerintah Desa Sembalun Lawang mengalokasikan anggaran senilai Rp17.225.000 untuk Implementasi RAK TSBD					11.200.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Sembalun Lawang.										
Nama Kegiatan 5 : Workshop Integrasi CSDRM/CRS AL ke dalam Program Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi	Output Kegiatan : Terlibatnya 13 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di NTB tergabung dalam FPTPRB NTB.					88.150.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Provinsi NTB	KONSEPSI NTB
	5.2 Output Kegiatan : Adanya MoU										KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	KONSEPSI dan Perguruan Tinggi Anggota FPTPRB NTB.										
	5.3 Output Kegiatan : Adanya Draft Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kebencanaan dan UMKM Tangguh.										
Nama Kegiatan 6 : Sosialisasi Kebijakan PUG dan Perlindungan Anak di Level Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat	Output Kegiatan : Terlibatnya 58 orang yang terdiri dari unsur OPD & Camat Se-Kabupaten Lombok Timur.					13.500.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB
	6.2 Output Kegiatan : Peserta yang hadir meningkat kapasitasnya dalam memahami kebijakan tentang										KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2021 ttg RAD PUG Lombok Timur.										
Nama Kegiatan 7 : Pembuatan Buku Panduan Penyusun Perdes PRB berperspektif CSDRM, Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender dan Inklusi Disabilitas	Output Kegiatan : - Adanya Tim Penyusun Buku Panduan Penyusunan Perdes PRBBM. - Adanya Dokumen Buku Panduan Penyusunan Perdes PRBBM.					25.950.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	
Nama Kegiatan 8 : Advokasi Peraturan Bupati tentang RAD API di Level Pemerintah Daerah Kab. Lombok Timur	Output Kegiatan : Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang RAD API Kab. Lombok Timur sejumlah 10 orang dari lintas sektor dan Draft SK Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang RAD API Kab. Lombok Timur.					36.850.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	8.2 Output Kegiatan : Disahkannya Peraturan Bupati Lombok Timur No. 58 ttg Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API)										KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 9 : Pelatihan PUG & PPRG bagi Pokja PUG Kab. Lombok Timur	Output Kegiatan : Terlibatnya 53 orang dalam kegiatan pelatihan yang terdiri dari unsur OPD Kab. Lombok Timur & Akademisi.					103.500.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	
	9.2 Output Kegiatan : Penyusunan Kegiatan OPD yang perspektifnya Analisis Responsif Gender (ARG) Kab. Lombok Timur yang tertuang dalam RKPD/ Renstra.										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 10 : Pembentukan Forum Anak Desa di 2 Desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 37 orang dalam kegiatan pembentukan yang terdiri unsur DP3AKB, Pemerintah Kecamatan Sembalun, Pemerintah Desa dan CSO. - Adanya Rencana Tindak Lanjut kegiatan yakni; - Penyusunan Program Kerja Forum Anak Desa di 2 desa. - Lembar Aspirasi Forum Anak Desa di 2 desa. - Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Forum Anak Desa di 2 desa.					6.750.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 11 : Pelatihan Penguatan Kelembagaan Forum Anak Desa	Output Kegiatan : - Meningkatnya kapasitas Forum Anak Desa di 2 desa dalam mengelola kelembagaan. - Adanya komitmen pemerintah kecamatan dan desa dalam penguatan dan mendukung akses partisipasi anak dalam Musrenbangdes. - Adanya komitmen dalam menginisiasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 2 desa. - Adanya komitmen para pihak sekolah dalam mendorong implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sembalun.					19.763.500			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 12 : Pelatihan Mediator (paralegal) dalam Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak pada masa bencana	Output Kegiatan : - Terlibatnya 47 orang dalam kegiatan pelatihan OPD Kab. Lombok Timur dan CSO local. - Tersertifikasinya 47 orang menjadi mediator local dari Bale Mediasi Prov. NTB					103.400.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Levek Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 13 : Legalisasi Kelembagaan Jaringan Kerja Usaha Koperasi (JKUK) NTB	Output Kegiatan : - Terlibatnya 10 unit koperasi di Pulau Lombok untuk membentuk Jaringan Kerja Usaha Koperasi dengan nama Pusat Koperasi Syariah Bersinar NTB. - Terbentuknya Pengurus Pusat Koperasi Syariah Bersinar NTB - Disepakatinya Rencana Tindak Lanjut, yakni; - Akan disahkannya JKUK					8.350.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Provinsi NTB	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	PUSKOPSYAH Bersinar NTB. - Akan diterbitkannya Badan Hukum Pusat Koperasi Syariah Bersinar NTB										
Nama Kegiatan 14 : Sosialisasi Dampak Bencana Terhadap Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat Desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 83 orang di 2 desa dalam proses sosialisasi. - Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak bencana terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat.					16.850.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 15 : Sosialisasi Dampak Perubahan Iklim Bagi Pertanian Berkelanjutan	Output Kegiatan : - Terlibatnya 56 orang dalam kegiatan sosialisasi. - Kegiatan sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Sekolah Lapang Iklim (SLI).					14.750.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 16 : Pelatihan Integrasi CSDRM/CRS AL dalam Perencanaan & Pembangunan Desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 63 orang dalam kegiatan pelatihan tersebut. - Pemahaman pemerintah desa meningkat terkait integrasi CSDRM/ CRSAL dalam Perencanaan & Pembangunan Desa. - Terbentuknya program kerja Pemerintah Desa di 2 desa terkait CSDRM/ CRSAL yang tertuang dalam Rencana Kerja					10.800.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Pembangunan Desa (RKPDes).										
Nama Kegiatan 17 : Bimbingan Teknis Pengembangan Pupuk Organik Berbasis Komunitas Untuk Pertanian Berkelanjutan	Output Kegiatan : - Terlibatnya 37 orang dalam kegiatan. - 15 orang mampu melakukan praktik pembuatan pupuk organik secara mandiri pasca pelatihan dengan memanfaatkan limbah rumah tangga dan limbah pertanian.					16.650.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 18 : Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) bagi Masyarakat di 2 Desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 59 orang dalam kegiatan. - Adanya integrasi indicator program kampung iklim (proklim) dengan Rencana Aksi Komunitas TSBD melalui Program Rumah Pangan Lestari (RPL). - Adanya akses tindak lanjut Pemerintah Desa di 2 desa untuk masuk sebagai Desa Proklim					11.000.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 19 : Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk Membangun Pertanian Berkelanjutan	Output Kegiatan : - Terlibatnya 30 orang petani lokal (muda dan dewasa) secara aktif dan konsisten sebanyak 5x pertemuan. - Adanya peningkatan kapasitas pengetahuan petani mengenai informasi iklim dan					27.450.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	pemanfaatannya dalam kegiatan bertani. - Adanya peningkatan kapasitas petani dalam mengambil keputusan sikap bertani yang adaptif iklim.										
Nama Kegiatan 20 : Pelatihan Penguatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam Menghadapi Perubahan Iklim Bagi Masyarakat, Pemerintah Desa.	Output Kegiatan : - Adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. - Penanaman 1500 bibit pohon di kawasan sumber mata air di wilayah Sembalun.					12.000.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 21 : Workshop Penyusunan Peta Ketahanan & Kerawanan Pangan Perspektif CRSAL	Output Kegiatan : - Adanya dokumen Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Sembalun. - Adanya komitmen Pemerintah Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang dalam proses integrasi penyesuaian data ketahanan dan kerawanan pangan masyarakat yang terdapat di Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur.					13.500.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 22 : Pelatihan Pengemasan Produk Pangan Olahan Hasil Pertanian bagi Kelompok Wanita Tani & Pelaku UMKM	Output Kegiatan : - Terlibatnya 33 UMKM lokal yang telah difasilitasi perizinan usaha. - Peningkatan pengetahuan pelaku UMKM dalam menentukan kemasan produknya. - 25 orang pelaku UMKM mampu mempraktikkan teknik pengemasan produk dengan jenis bahan plastic. - Adanya komitmen Pemerintah Desa Sembalun Bumbung untuk memberikan 2 mesin kemasan kepada pelaku UMKM Desa Sembalun Bumbung.					20.350.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 23 : Pelatihan Pemasaran Produk Pangan Olahan Pertanian bagi Kelompok Wanita Tani & Pelaku UMKM	Output Kegiatan : - Terlibatnya 33 orang pelaku UMKM yang telah memiliki perizinan produk usaha. - Adanya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran melalui platform digital sosial media. - 10 orang pelaku UMKM menerapkan pemasaran produknya melalui sosial media pasca pelatihan. - Adanya komitmen Dinas Perdagangan Lombok Timur untuk memberikan akses pemasaran kepada pelaku UMKM Sembalun melalui Dekranasda Lombok Timur sebagai unit					13.500.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	pelaksana teknis untuk memasarkan produk lokal daerah.										
Nama Kegiatan 24 : Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Black Garlic	Output Kegiatan : - Adanya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM untuk akses dan mekanisme dalam mengurus izin edar BPOM. - Adanya komitmen antara Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Pelaku UMKM Sembalun dalam					12.700.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	memfasilitasi proses perizinan produk UMKM Sembalun.										
Nama Kegiatan 25 : Workshop Membangun Komitmen Para Pihak dalam mendukung Praktik CRSAL	Output Kegiatan : - Adanya dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KONSEPSI NTB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur - Adanya komitmen para pihak dalam rangka pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim di Lombok Timur.					15.500.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 26 : Workshop Tata Kelola BUMDES Dalam Penguatan UMKM	Output Kegiatan : - Pemerintah Desa Sembalun Bumbung memberikan akses pemasaran kepada pelaku UMKM melalui BUMDES Sembalun Bumbung. - Pemerintah Desa Sembalun Lawang menganggarkan sekitar 15% dari Anggaran Dana Desa dalam pengembangan BUMDES.					6.000.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 27 : Sosialisasi Pencegahan Penularan dan Penanganan Covid-19 di Level Desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 63 orang dalam kegiatan tersebut. - Tersosialisasikannya ke 100 orang masyarakat di 2 desa melalui poster covid-19.					15.000.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 28 : Aksi Peningkatan Kapasitas Aliran Sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Kawasan Untuk Mitigasi Bencana	Output Kegiatan : - Terlibatnya 126 orang dalam pelaksanaan aksi yang terdiri dari masyarakat, CSO, Pemerintah Desa dan Organisasi Perangkat Daerah. - Meningkatkan kapasitas kebersihan jalur air sungai sepanjang 1.5 km di Desa Sembalun Lawang. - Meningkatkan kapasitas kebersihan dan kedalaman sungai dengan ukuran kedalaman 6 meter dari permukaan jalan dan rumah warga di Desa Sembalun Bumbung. - Adanya kontribusi anggaran dari para pihak untuk mendukung upaya mitigasi bencana melalui					15.350.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
kegiatan ini, seperti; a. BPBD : Rp700.000 b. Dinas Lingkungan Hidup : Rp1.000.000 c. Pemerintah Desa Sembalun Lawang : Rp1.000.000 d. Pemerintah Desa Sembalun Bumbung : Rp1.000.000										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 29 : Pelatihan Pemanfaatan Informasi Hidrometeorologi dan Geofisika Berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Bagi Tim Siaga Bencana (TSBD) di 2 desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 58 orang dalam kegiatan ini. - Adanya Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KONSEPSI dan BMKG NTB untuk Pemanfaatan Informasi MKG dalam PRB. - Terpasangnya Program Display Informasi MKG di 2 desa. - Adanya Tim PIC Lokal sebagai penanggungjawab pengembangan Display Informasi MKG di level desa. - Adanya komitmen BMKG RI melalui BMKG NTB untuk melaksanakan Program Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk tahun 2023 dengan penganggaran					91.950.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
penuh dari BMKG RI di desa dampingan KONSEPSI melalui Program ICDRC. - Adanya kontribusi para pihak sebagai komitmen multi-pihak dalam pengembangan Display Informasi MKG, seperti : a. BMKG : menyediakan program. b. Pemerintah Desa di 2 desa : menyediakan akses internet. c. KONSEPSI : penyediaan TV Android sebagai akses informasi.										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 30 : Pelatihan Manajemen Media Komunikasi Untuk Memperkuat Kesiapsiagaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Dalam Pengurangan Risiko Bencana	Output Kegiatan : - Terlibatnya 44 orang dalam kegiatan ini. - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan TSBD dalam mengelola Radio Komunikasi Kebencanaan, Disaster Information System berbasis Website dan pemanfaatan Display Informasi MKG level desa.					15.350.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 31 : Fasilitasi Media Komunikasi Untuk Memperkuat Early Warning System (EWS) Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)	Output Kegiatan : - Terpasangnya Radio Komunikasi Kebencanaan di level desa. - Tersedianya Disaster Information System berbasis Website di level komunitas.					22.700.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 32 : Diseminasi Buku Panduan Penyusunan Perdes PRBBM (Instruksi Bupati/PMD)	Output Kegiatan : - Terlibatnya 4 orang sebagai Tim Penyusun Instruksi Bupati Lombok Timur. - Adanya Surat Edaran Bupati tentang Membangun Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana & Perubahan Iklim - Adanya Buku Panduan Penyusunan Perdes PRBBM					23.350.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 33 : Training of Trainer Manajemen Bencana Bagi FPTPRB Nusa Tenggara Barat	Output Kegiatan : - Adanya peningkatan kapasitas peserta/ pengurus FPTPRB NTB terkait manajemen bencana - Adanya komitmen FPTPRB NTB dalam melanjutkan program penanggulangan bencana yang melibatkan Perguruan					104.550.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Provinsi NTB	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Tinggi.										
Nama Kegiatan 34 : Fasilitas Integrasi CSDRM ke dalam Kurikulum Program Studi Perguruan Tinggi	Output Kegiatan : - Terlibatnya 80 orang dalam kegiatan ini. - Adanya komitmen 1 perguruan tinggi, yakni Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) untuk integrasi CSDRM ke dalam kurikulum perguruan tinggi. - Adanya Dokumen Draft Kurikulum Hukum Kebencanaan di Fak. Hukum					22.100.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Provinsi NTB	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	UMMAT										
Nama Kegiatan 35 : Penyusunan Bahan Ajar Berbasis CSDRM Bagi FPTPRB	Output Kegiatan : - Adanya tim penyusun buku bahan ajar berbasis CSDRM - Dokumen 3 Buku Bahan Ajar berbasis CSDRM : > Hukum Kebencanaan - Fak Hukum Univ. Muhammadiyah Mataram > Sosiologi Bencana - Prodi Sosiologi Univ. Mataram > Keperawatan di Kebencanaan - Prodi					41.700.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Provinsi NTB	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	Keperawatan STIKES Yarsi Mataram										
Nama Kegiatan 36 : Workshop Membangun Jejaring Forum Anak Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim di Lombok Timur	Output Kegiatan : - Terlibatnya 59 orang dalam kegiatan ini. - Adanya SK Tim Penyusun Perda PPA Lombok Timur - Adanya Draft Naskah Akademik (NA) Perda PPA Lombok Timur					11.750.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI NTB

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 37 : Pelatihan Manajemen Bencana dan Iklim Bagi Forum Anak Desa di Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung	Output Kegiatan : - Terlibatnya 101 orang dalam kegiatan tersebut. - Terdistribusinya logistic emergency respons kepada TSBD di 2 desa. - Adanya Dokumen Berita Acara Serah Terima Logistik					26.700.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Nama Kegiatan 38 : Pelatihan Rencana Keberlanjutan Usaha (RKU) Bagi Perempuan Pelaku UMKM di 2 Desa	Output Kegiatan : - Terlibatnya 68 orang dalam kegiatan tersebut. - Adanya 43 Dokumen Rencana Keberlanjutan Usaha (RKU) Pelaku UMKM.					11.850.000			OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade)	Level Desa Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur	KONSEPSI NTB
Tujuan 14.Ekosistem Lautan											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 15.Ekosistem Daratan											
INDIKATOR											
Prgram 1.											
Kegiatan 1.											
Tujuan 16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh											
INDIKATOR		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.								
Nama Program 1 (11) : PERLINDUNG AN ANAK											
Nama Kegiatan 1 Pembentukan Sekolah Ramah Anak		Pemimpin	2			Rp 80.000.000,-	6	0	MH	Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan dan Desa Salut Kecamatan Kayangan	YASERA
		1.1 Output Kegiatan : Jumlah Pemimpin yang dilatih tentang sekolah ramah anak									
		1.2 Output Kegiatan : Jumlah sekolah ramah anak yang terbentuk									

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 2 Penguatan Kapasitas Pengurus dan Anggota Forum Anak Desa	2.1 Output Kegiatan : Jumlah Anak Remaja yang terlibat dalam pertemuan bulanan dan terlatih	Anak Remaja	300				62	117			
	2.2 Output Kegiatan : Jumlah anak remaja yang berkomitmen tidak menikah dini	Anak Remaja	300				309	321			
	2.3 Output Kegiatan : Jumlah Anak Remaja yang menyelesaikan pendidikan non formal (Kelas Komputer dan Kelas Bahasa Inggris)	Anak Remaja	100				62	117			
Nama Kegiatan 3 Kampanye Peraturan Desa terkait Anti Pernikahan Dini kepada para pemangku kepentingan Desa dan Keluarga dampingan	3.1 Output Kegiatan : Jumlah Pemangku Kepentingan Desa dampingan yang mendukung dan berpartisipasi	Pemimpin	35				30	58			

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	3.2 Output Kegiatan : Jumlah keluarga yang mengikuti kampanye Anti Pernikahan Dini	Keluarga	1100				615	1345			
Nama Kegiatan 1 : Diskusi komunitas pendalaman materi dan ajang calon advokat muda untuk memfasilitasi dasar-dasar GTA dan MIYP kepada teman sebayanya di Lombok Timur	1.1 Output Kegiatan : Anak dan Remaja yang ada di 4 desa intervensi di kabupaten Lombok Timur meningkat kapasitasnya terkait dengan MIYP dan dapat memfasilitasi diskusi dengan teman sebaya					Rp. 25.440.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)
Nama Kegiatan 2: Training of Trainer (ToT) Gender Transformativ e Approach kepada orang muda yang teridentifikasi potensi menjadi champion dan advokat muda di Kabupaten Lombok Timur	1.2 Output Kegiatan : Orang muda yang sudah menyelesaikan nilai dan normanya dan teridentifikasi berpotensi champion dan advokat muda akan berlatih menjadi fasilitator pada untuk membicarakan norma-norma dan mengajak teman sebaya					Rp. 51. 380.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
	untuk bertindak. Kegiatan ini akan dilaksanakan di kota mataram, mengingat tidak ada hotel yang memadai di Lotim dengan jumlah 12 peserta yang terdiri dari 3 orang muda dari masing-masing desa intervensi di Lombok Timur.										
Nama Kegiatan 3: Pertemuan Rutin Pendidik Sebaya di Lombok Timur	Pendidik Sebaya di sekolah intervensi mendapat penguatan kapasitas terkait issue pencegahan pernikahan anak, kehamilan Remaja dan kekerasan Berbasis Gender					Rp. 13.360.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 4: Pertemuan rutin konsolidasi kemitraan orang muda dan orang dewasa ditingkat desa di Lombok Timur	Orang muda di 4 desa intervensi dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di level Desa					Rp. 19.328.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)
Nama Kegiatan 5: Pertemuan plano inisiatif dari orang muda terkait pembentukan tim RKPDes 2024 di Lombok Timur	orang muda di desa intervensi mendapatkan ruang menjadi salah satu tim dalam penyusunan RKPDES					Rp. 11.284.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)
Nama Kegiatan 6: Pertemuan inisiatif orang muda untuk pelaksanaan kegiatan Musrembangd es dan Musdes di Lombok Timur	Anak muda di desa intervensi mendapatkan ruang untuk memberikan masukan dan usulan program agar masuk dalam dokumen RPJMDES					Rp. 15.404.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Nama Kegiatan 7: Diskusi Komunitas Orang Tua di Lombok Timur	Orang tua mendapatkan peningkatan kapasitas alternatif dalam pengasuhan anak di lingkungan sekitar					Rp. 28.440.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)
Nama Kegiatan 8: Pertemuan pembahasan Drafft Perda perlindungan perempuan dan perlindungan anak di Kab. Lombok Tengah dan Lombok Timur	Lahirnya perda terkait penyelenggraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak di Kab. Lombok Timur					Rp. 84.948.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)
Nama Kegiatan 9: Pertemuan Rutin Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Lombok Timur	mendapatkan gambaran kondisi penilaiaan KLA di Kab. Lombok Timur					Rp. 15.090.000			Kedutaan Besar Belanda	Kabupaten Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Pare Mas, Desa Menceh dan Desa Gereneng Timur)	YGSI (Yayasan Gemilang Sehat Indonesia)

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program 1 : WE for JET	Kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan (disabilitas) dalam trasisi energi yang berkeadilan	1. 396 orang laki-laki,perempuan dan disabilitas. 2. Tiga dokumen kajian partisipatif. 3. Enam dokumen rencana aksi inklusi disabilitas. 4 Enam perencanaan partisipatif	400 orang laki-laki, perempuan dan disabilitas. 2. Satu dokumen pendataan. 3. Enam dokumen rencana aksi inklusi disabilitas			Rp 1, 3 Miliar Juli 2023-Juni 2024			DFAT	1. Lombok Barat : Dasan Geria dan Taman Ayu. 2. Lombok Tengah : Pandan Indah dan Lantan. 3. Lombok Timur : Tete Batu Selatan dan Rarang	Gema Alam NTB
Kegiatan 1 : Kajian partisipatif : Participatory Rural Apraisal (PRA)	Output: Dokumen PRA (potensi sumber daya alam untuk pengembangan energi terbarukan)	Proses penulisan laporan	Dokumen akan jadi pada tanggal 9 Maret 2024. Pleno desa untuk menyusun perencanaan partisipatif di tingkat desa yang akan dilaksanakan bulan Maret 2024								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Kegiata 2 : Rapid Care Analysis (RCA)	Output: Dokumen RCA (hubungan kerja perawatan dengan transiis energi).	Proses wawancara dan observasi	Dokumen akan jadi pada tanggal April 2024								
Kegiatan 3: Pendatataan disabilitas menggunakan kuisioner washinton group dan UNICEF	Output : Data base dsabilitas 6 Desa , 6 peta digital sebaran disabilitas	Dokemen pendataan dan peta digital sebaran disabilitas	Bahan advokasi								
Kegiatan 4 : Peningkatan kapasitas	1. TOT Disabilitas.2. GEDSI Training.3. Pelatihan pengorganisasia n.4. Pelatihan PRA. 5. TOF RCA. 6. Sekolah SETARA	396 orang laki-laki, perempuan dan disabilitas	400 orang laki-laki, perempuan dan disabilitas.								
Kegiatan 5 : Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten	Update perkembangan program WE for JET sejak Sept 2023-Januari 2024	1 kali	2 kali								
Kegiatan 6 : Workshop penyusunan rencana aksi inklusi disabilitas	6 Dokumen rencana aksi inklusi disabilitas di tingkat desa	6 dokumen	Menjadi bahan advokasi pemerintah desa								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Program 2 : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pedagang kecil mendapatkan pinjaman modal, pendampingan usaha dan peningkatan kapasitas untuk usaha	1). Modal. 2). 70 orang peminjam dengan kapasitas menjalankan usaha	100 orang peminjam			317.274.000 untuk dana/modal yang digulirkan			Global Micro Initiative (GMI) Jerman	15 Desa di Kabupaten Lombok Timur	Gema Alam NTB
Kegiatan 1 : Simpan pinjam dengan pola syariah	Modal usaha sebesar 1.500.000-4.000.000	30 orang	70 orang								
Kegiatan 2 : Pendampingan pedagang kecil	Pedagang memiliki pencatatan yang rapi sehingga bisa mengembangkan usahanya dengan modal yang dipinjam	Pembukuan/pencatatan arus kas									
Kegiatan 3: Penguatan kapasitas peminjam	Manajemen usaha										
INDIKATOR		16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.								
		16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).								

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Penyusunan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) tentang Pemberlakuan Peraturan Desa (PERDES) tentang Perlindungan TKI	Memperkuat kebijakan dan program yang memfasilitasi migrasi yang aman dan anti perdagangan manusia di tingkat desa dan kabupaten					Rp 173.585.000			AWO International Jerman	Kabupaten Lombok Utara (Medana, Teniga, Tegal Maja, Rempek, Sambik Bangkol)	PERKUMPULAN PANCA KARSA
Workshop kebijakan anggaran yang responsif terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga di tingkat kabupaten & desa											
Lokakarya MSC (Most Significant Change) tentang migrasi aman											
Perayaan dan kampanye dalam rangka memperingati Hari Migran Sedunia (Migrant Day)											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pertemuan dalam rangka mengintegrasikan Data Mobilitas PMI ke dalam SID Desa										
Dialog Publik untuk mendorong Perda Perlindungan PMI di Kabupaten Lombok Utara										
Sosialisasi Rancangan Draft Peraturan Daerah KLU tentang Perlindungan PMI & Keluarga										
Pelatihan Jurnalistik untuk Jaringan PMI, Kader dan Kelompok PMI	Meningkatkan struktur sosial dan kolaborasi pemangku kepentingan terkait tentang migrasi yang aman dan anti perdagangan manusia				Rp 237.315.000			AWO International Jerman	Kabupaten Lombok Utara (Medana, Teniga, Tegal Maja, Rempek, Sambik Bangkol)	PERKUMPULAN PANCA KARSA

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan		Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
				Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Pelatihan Advokasi dan Penanganan Kasus PMI untuk Jaringan PMI Tingkat Kabupaten											
Pelatihan Advokasi Kebijakan Anggaran pada Musrenbangn tingkat Desa dan Kabupaten											
Pertemuan Konsolidasi Jaringan PMI tingkat Kabupaten											
Diskusi Tematik Jaringan PMI Tingkat Desa											
Penanganan Kasus PMI											
Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender	Penguatan Pengelolaan usaha sebagai sumber penghidupan					Rp 106.225.000			AWO International Jerman	Kabupaten Lombok Utara (Medana, Teniga, Tegal Maja, Rempek, Sambik Bangkol)	PERKUMPULAN PANCA KARSA
Pelatihan Manajemen											

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
usaha dan Pemasaran										
Pertemuan dengan perwakilan PLUT/Pusat Layana Usaha Terpadu kabupaten untuk membantu kelompok migran mengembangkan pasar melalui e-commerce										
Pertemuan dengan perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk memfasilitasi kelompok migran untuk mengakses layanan keuangan dan bantuan teknis (BUMDES)										

Program/Kegiatan/ Output Kegiatan	Satuan	Target tahun (n)	Realisasi Target tahun (n)		Alokasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)	Realisasi Anggaran tahun (n) (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
Memfasilitasi usaha kelompok PMI untuk memperoleh sertifikat usaha berdasarkan skala usaha mereka										
Tujuan 17.Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
INDIKATOR										
Prgram 1.										
Kegiatan 1.										